

**FORMULASI DAN MEKANISME PENERBITAN
KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK) SEBAGAI DASAR
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
DI KOTA TEGAL**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Kelulusan
Program Studi Magister Teknik Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota



Oleh :

**ROOSYUNI ERNAWATI
L4D 002131**

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
(MPPWK)
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2004**

**FORMULASI DAN MEKANISME PENERBITAN
KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK) SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DI KOTA TEGAL**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:
ROOSYUNI ERNAWATI
L4D002131

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal, 6 April 2004

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 6 April 2004

Pembimbing Pendamping

Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP

Pembimbing Utama

PM. Brotosunaryo, SE, MSP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebut dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 6 April 2004



ROOSYUNI ERNAWATI

NIM. L4D 002131

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tugas tesis dengan judul “ **Formulasi dan Mekanisme Penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal** ”. Tesis ini sebagai salah satu tugas yang harus diselesaikan dalam rangka studi di Program Pasca Sarjana, Magister Perencanaan dan Pembangunan Wilayah dan Kota (MPPWK), Universitas Diponegoro Semarang.

Keterangan Rencana Kota (KRK) merupakan salah satu sarana pengendalian rencana tata ruang kota dari aspek legalitas yang dikelola oleh Dinas Perkotaan Kota Tegal melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). KRK merupakan acuan dalam pemberian perijinan yang lainnya seperti IMB, Ijin lokasi, Ijin gangguan, serta Ijin sewa tanah pemerintah kota. KRK berisi data tentang rencana tata ruang kota dengan dilampiri dengan peta sebagai keterangan keadaan di lapangan, yang bisa dipungut retribusi penggantian biaya cetak peta.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Soegiono Soetomo, DEA. sebagai Ketua Program Pasca Sarjana MPPWK- UNDIP Semarang, atas segala arahnya;
2. Bapak Ir. Sidharta Saelan, MM sebagai Ketua Balai Kerjasama Pendidikan D4 dan S2, LPPU Dept. Kimpraswil Semarang, atas segala arahnya;
3. Bapak PM. Brotosunaryo, SE, MSP sebagai Mentor (Pembimbing Utama) dari tesis, atas segala bimbingannya;
4. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP sebagai Co-Mentor (Pembimbing Pendamping) dari tesis, atas segala bimbingannya;
5. Bapak Samsul Ma’rif, SP, MT sebagai Dosen Pembahas dari tesis, atas segala saran dan pendapatnya;
6. Bapak Dr. Ir. Suripin, M.Eng. sebagai Dosen Penguji dari tesis , atas segala saran dan pendapatnya;
7. Rekan – rekan MPPWK UNDIP angkatan 2002, Rina, Meidy, atas segala dukungan, bantuan dan kerjasamanya selama penulis menyelesaikan tugas ini;
8. Bapak / Ibu / Saudara di lingkungan sekretariat MPPWK baik yang berada di LPPU Dept. Kimpraswil atau di Kampus UNDIP Semarang, serta saudara – saudara yang bertugas di perpustakaan UNDIP atas segala bantuannya;
9. Bapak / Ibu / Saudara dari Pemerintah Kota Tegal, Ir. A. Sugeng Prihadi, Ir. Supriyatno, Ir. Eko Setyawan, MUM yang telah membantu selama survey dan pengumpulan data pada penulis dalam menyelesaikan tugas ini;
10. Semua anggota keluarga, orang tuaku : Ibu R.Ngt. Soewasni Roostany, saudara - saudaraku : Roosawaty, Rooswardhany, Roosmawaty, Roosarjani, dan Roosantosa, yang telah banyak memberikan dukungan baik moril dan materiil pada penulis selama menyelesaikan tugas ini.

Demikian pengantar singkat dari penulis dengan tidak lupa mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak kami sengaja, saran dan pendapat yang positif untuk perbaikan tugas selanjutnya sangat kami harapkan. Semoga hasil penulisan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saudara semuanya. Terimakasih . Wass. Wr. Wb.

Semarang, 6 April 2004
Penulis,

ROOSYUNI ERNAWATI

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xv
Abstrak	xvi
Abstract	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Sasaran Studi	6
1.3.1. Tujuan Studi	6
1.3.2. Sasaran Studi	6
1.4. Ruang Lingkup Studi	7
1.4.1. Ruang Lingkup Materi	7
1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah	8
1.5. Kerangka Pemikiran	10
1.6. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Studi	13
1.6.1. Pendekatan Studi	13
1.6.2. Metode Pelaksanaan Studi	14
1.6.2.1. Kebutuhan Data	14
1.6.2.2. Teknik Pengumpulan Data	16
1.6.2.3. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	16
1.6.2.4. Teknik Sampling	16
1.6.2.5. Kerangka Analisis	18
1.6.2.6. Teknik Analisis	20
1.7. Sistematika Penulisan	29

BAB II	FORMULASI DAN MEKANISME PENERBITAN KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK) SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.....	31
2.1.	Otonomi Daerah.....	31
2.2.	Keterangan Rencana Kota	33
2.3.	Pelayanan Publik dan Retribusi Daerah.....	36
2.3.1.	Pelayanan Publik	36
2.3.2.	Retribusi Daerah	44
2.4.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.....	45
2.5.	Peranan Pemerintah dalam Penerbitan KRK	46
2.6.	Kriteria dan Prinsip Penetapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	48
2.6.1.	Dasar Pemungutan Retribusi	48
2.6.2.	Kemampuan dan Kemauan Membayar Retribusi.....	50
2.6.3.	Prinsip Keadilan dalam Pemungutan Retribusi.....	50
2.7.	Keterkaitan Antara KRK Dengan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	52
2.8.	Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak	53
BAB III	KAJIAN UMUM DAN FORMULASI SERTA MEKANISME PENERBITAN KRK SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DI WIL. STUDI	56
3.1.	Kajian Umum Kota Tegal	56
3.1.1.	Kajian Keruangan Kota Tegal	56
3.1.2.	Keadaan Sosial Ekonomi Kota Tegal	59
3.1.3.	Kuangan Pemerintah Kota Tegal	61
3.2.	Kota Semarang dan Kota Surakarta Sebagai Wilayah Komparatif	62
3.2.1.	Perbandingan Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Tegal	62

3.2.2. Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK / AP Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Semarang dan Kota Surakarta	66
3.3. Gambaran dan Kajian Umum Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Kota Tegal	70
3.3.1. Gambaran dan Kajian Umum Formulasi Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal	70
3.3.2. Kajian Umum Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal	73
3.4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Sebagai Hasil Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK di Kota Tegal	74
BAB IV ANALISIS, FORMULASI DAN MEKANISME PENERBITAN KRK SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DI KOTA TEGAL.....	76
4.1. Analisis Formulasi Keterangan Rencana Kota Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.....	76
4.2. Analisis Keadilan dan Kemampuan Membayar Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	87
4.2.1. Analisis Keadilan Dalam Membayar Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	87
4.2.2. Analisis Kemampuan Membayar Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	87
4.3. Analisis Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.....	87
4.4. Analisis Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.....	93
4.5. Formulasi Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal	104

4.6.	Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal	104
4.7.	Program Rencana Tindak Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal	104
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	112
5.1	Kesimpulan	112
5.2.	Rekomendasi	113
5.2.1.	Rekomendasi Kepada Pemerintah Kota Tegal	113
5.2.2.	Rekomendasi Studi Lanjut	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN – LAMPIRAN		
A.	Hasil Analisis	
B.	Kuesioner	
C.	Berita Acara dan Lembar Assistensi	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Tegal	9
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran	12
Gambar 1.3 Kerangka Analisis Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	19
Gambar 1.4 Model Hierarki Dalam Metode PHA	27
Gambar 2.1 Model 1: Mekanisme KRK Pada KPT Bagian Pelayanan KRK	39
Gambar 2.2 Model 2 : Mekanisme KRK Pada Dinas Perkotaan Subdin Program	40
Gambar 2.3 Struktur Hierarki Alternatif Mekanisme Penerbitan KRK	43
Gambar 3.1 Peta Rencana Tata Guna Lahan Kota Tegal	58
Gambar 3.2 Komposisi Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Berdasarkan Mata Pencapaian Tahun 2002	59
Gambar 3.3 Produk Domestik Regional Bruto Kota Tegal Tahun 2000 - 2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993	61
Gambar 3.4 Ruangan Pelayanan Perijinan di KPT Kota Tegal	62
Gambar 3.5 Bagian Informasi pada UPT Kota Surakarta	65
Gambar 3.6 Bagan Alur Proses Perijinan pada UPT Kota Surakarta	66
Gambar 3.7 Mekanisme Penerbitan KRK / AP di Kota Semarang.....	67
Gambar 3.8 Mekanisme Penerbitan KRK / AP di Kota Surakarta.....	69
Gambar 3.9 Peta Potensi KRK Yang Telah Terbit	72
Gambar 4.1 Struktur Hierarki Alternatif Mekanisme Penerbitan KRK di Kota Tegal	95
Gambar 4.2 Model 1 : Mekanisme KRK Pada KPT Bagian Pelayanan KRK	96
Gambar 4.3 Model 2 : Mekanisme KRK Pada Dinas Perkotaan Subdin Program	97

Gambar 4.4	Model 3 : Mekanisme KRK Pada KPT dan Dinas Perkotaan Sub Dinas Program	98
Gambar 4.5	Kantor Pelayanan Terpadu Kota Tegal	101
Gambar 4.6	Kantor Dinas Perkotaan Kota Tegal	101
Gambar 4.7	Mekanisme Penerbitan KRK Pada KPT Bagian Pelayanan KRK Di Kota Tegal	103

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Kebutuhan Data Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal	15
Tabel I.2. Komposisi Narasumber Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal	18
Tabel I.3. Analisis Skoring Kelayakan Normatif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal	23
Tabel I.4. Skala Banding Secara Berpasangan Dalam Model PHA	26
Tabel III.1. Komposisi Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2002.....	59
Tabel III.2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tegal 2000 – 2001 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993	60
Tabel III.3. Penerimaan Daerah Otonom Kota Tegal Tahun 2001.....	61
Tabel III.4. Perbandingan Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Tegal Tahun 2001	64
Tabel III.5. Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Semarang	66
Tabel III.6. Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Surakarta	68
Tabel III.7. Penerimaan Retribusi Daerah Otonom Kota Tegal Tahun 2001....	71
Tabel IV.1. Retribusi Untuk Fungsi Zoning dan Klas Jalan	84
Tabel IV.2. Daftar Klas Jalan di Kota Tegal	85
Tabel IV.3. Analisis Skoring Kelayakan Normatif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal	89
Tabel IV.4. Keterkaitan Tupoksi Instansi Dengan Penerbitan KRK	91
Tabel IV.5. Keterkaitan Instansi Dengan Mekanisme Penerbitan KRK	92

Tabel IV.6.	Hasil Kuesioner Perbandingan Berpasangan Hierarki Dari Kriteria Pelayanan Publik	99
Tabel IV.7.	Hasil Kuesioner Perbandingan Berpasangan Hierarki Alternatif Mekanisme KRK di Kota Tegal	100
Tabel IV.8.	Pemetaan Interaksi Faktor	108

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A.1. Hasil Kuesioner Perbandingan Hierarki Dari Kriteria Pelayanan Publik	119
Lampiran A.2. Hasil Kuesioner Perbandingan Hierarki Dari Alternatif Mekanisme KRK	120
Lampiran A.3. Perbandingan Kepentingan Dari Kriteria Pelayanan Publik ..	121
Lampiran A.4. Perbandingan Alternatif Mekanisme Terhadap Kriteria Kesederhanaan	122
Lampiran A.5. Perbandingan Alternatif Mekanisme Terhadap Kriteria Keamanan	122
Lampiran A.6. Perbandingan Alternatif Mekanisme Terhadap Kriteria Keterbukaan	122
Lampiran A.7. Perbandingan Alternatif Mekanisme Terhadap Kriteria Effisiensi	123
Lampiran A.8. Perbandingan Alternatif Mekanisme Terhadap Kriteria Ekonomis	123
Lampiran A.9. Perbandingan Alternatif Mekanisme Terhadap Kriteria Keadilan Yang Merata	123
Lampiran A.10. Perbandingan Alternatif Mekanisme Terhadap Kriteria Kejelasan dan Kepastian	124
Lampiran A.11. Perbandingan Alternatif Mekanisme Terhadap Kriteria Kepastian Waktu	124
Lampiran A.12. Prioritas Dari Alternatif Mekanisme	124
Lampiran B Kuesioner	125
Lampiran C Berita Acara dan Lembar Assistensi	140

ABSTRAK

Sejak diberlakukan UU No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang yang berisi hak dan kewajiban Daerah Otonom dalam hal perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah, maka daerah otonom bisa mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku. Rencana Tata Ruang Kota sebagai suatu kebijakan yang mempunyai dasar hukum yang kuat berupa peraturan daerah bersifat mengikat bagi seluruh warga di daerah tersebut sehingga harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaksana pembangunan / stakeholder. Salah satu bentuk pengendalian Rencana Tata Ruang Kota adalah Keterangan Rencana Kota (KRK) yang meliputi pengendalian perencanaan tata ruang serta pelaksanaan bangunannya.

Untuk di Kota Tegal, KRK dipakai sebagai salah satu acuan dalam pemberian perijinan yang meliputi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan, Ijin Lokasi, Ijin Sewa Tanah Pemerintah Kota. Permasalahan – permasalahan di Kota Tegal dalam pengendalian rencana tata ruang antara lain adalah mekanisme KRK yang belum jelas, meningkatnya pelanggaran akibat aktivitas perkotaan serta belum adanya retribusi penggantian biaya cetak peta. Dari permasalahan tersebut maka permasalahan yang penting adalah bagaimana formulasi dan mekanisme penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, maka daerah otonom mempunyai otoritas atas kelembagaan, kebijakan dan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku. Dalam peraturan tersebut, salah satu dari retribusi jasa umum adalah retribusi penggantian biaya cetak peta yang merupakan lampiran dari KRK, tetapi di kota Tegal peraturan retribusi tersebut belum ada sehingga belum bisa diberlakukan. Jumlah KRK yang sudah diterbitkan dari tahun 2000 - 2003 sebanyak 725 buah, sedangkan selama tahun 2003 berjumlah 178 buah. Selama ini proses KRK melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang koordinasi dengan instansi pengelola yaitu Dinas Perkotaan Kota Tegal.

Hasil penelitian yang berdasarkan data primer, data sekunder dengan analisis kualitatif dan kuantitatif serta komparasi dengan kota Semarang dan kota Surakarta maka didapat hasil penelitian adalah formulasi dan mekanisme penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK). Formulasi Retribusi penggantian biaya cetak peta yang merupakan lampiran dari KRK merupakan fungsi dari nilai ekonomis, zoning dan klas jalan, sedangkan nilai ekonomis, zoning dan klas jalan tergantung dari letak tanah yang diajukan KRK. Sedangkan mekanisme penerbitan KRK di Kota Tegal yang terpilih dari berbagai alternatif adalah mekanisme model 1 yaitu proses permohonan KRK dimulai dan selesai di KPT, yang pada prosesnya KPT berkoordinasi dengan Dinas Perkotaan Kota Tegal.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ditetapkan formulasi pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta yang merupakan lampiran dari KRK yang dibagi dalam luas tanah > 300m² serta luas tanah ≤ 300 m². Selain itu mekanisme penerbitan KRK yang terpilih adalah proses pelayanan KRK dimulai dan selesai di KPT. Rekomendasi penelitian ini untuk Pemerintah Kota Tegal adalah mengusulkan agar segera dibuat peraturan daerah tentang penerbitan KRK beserta retribusi penggantian biaya cetak peta, serta mengharapkan agar segera direvisi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada KPT karena belum adanya pelayanan KRK di KPT Kota Tegal.

ABSTRACT

Ever since the validity of UU No.24 / 1992 about the space order which consists of the rights and obligations of the Autonomous Region in planning, utilizing and regional space order controlling, therefore the Autonomous region is able to have the authority in the organization as the legitimate rules. Urban Space Order Plan as a policy has the strong law foundation in form of the regional rules, which is compulsory to all citizens in the country, thus it should be obeyed and conducted by all stakeholders or development performers. One of the controlling forms of the Urban Space Order Plan is the Urban Plan Explanation (KRK) consisted of space order planning control and also the performance of the development.

For Tegal city, KRK is used as one of the reference in issuing license consisting Building Establishment Permit (IMB), Disturbance Permit, Location Permit, Municipality Land Rental Permit. The problems of Tegal city in the space order planning are such as KRK mechanism which is still unclear, the increased violations as the replacement / substitution of the map printing cost. From those problems, the most important problem is how the formulation and the mechanism of the KRK issuance as the foundation of the Retribution Collection and as the substitute of the Map Printing Cost in Tegal City.

Based on UU No.22 / 1999, UU No.25 / 1999, and also PP No 66 / 2001 about regional retribution, therefore the autonomous region has authority over regional institutions, policies and finance as the legitimate rules. In those rules, one of the public service retributions is the retribution of map printing cost substitution which is the attachment of KRK. However, in Tegal city, retribution rule does not exist yet thus it hasn't been able to implement. The number of KRK issued from 2000-2003 is 725, while in the year 2003 is 178. During this period, KRK process is conducted through Integrated Service Bureau (KPT) coordinated with the organizing institution, Urban Service of Tegal Municipality.

The research's result based on primary data, secondary data with Qualitative and Quantitative analyses and also the comparisons to Semarang & Surakarta Municipality, thus achieved the research result, which is the formulation & mechanism of the issuance of the Urban Plan Explanation (KRK). The Map Printing Cost Retribution Formulation which is the attachment of KRK is a function of economic value, zoning and road class, whereas the economic value, zoning and road class depend on the land location proposed in KRK. While the KRK issuance mechanism in Tegal Municipality chosen from various alternatives is the model 1 mechanism, which the KRK proposal process commenced and accomplished in KPT, in the process KPT coordinated with Tegal's Urban Service.

The conclusion in this research is the establishment of the collecting formulation of map printing cost substitution which is the attachment of KRK divided in the size of land which is $> 300 \text{ m}^2$ and also the size of land which is $\leq 300 \text{ m}^2$. Besides, the KRK issuance mechanism chosen is the KRK service process commenced and accomplished in KPT. This research recommendation for Tegal Municipality is suggesting the urgency of the formulation of the regional policy concerning the KRK issuance along with the map printing cost substitution retribution, and also expecting that there is a revision on the main task and function of KPT because there hasn't been any service of KRK in KPT of Tegal city.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukan UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang berisi tentang hak dan kewajiban Daerah Otonom dalam hal perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah, maka daerah otonom bisa mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraannya sesuai peraturan yang berlaku. Di Indonesia, rencana tata ruang disusun dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota (RTRWK), Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan Rencana Teknis Tata Ruang Kota (RTRK). (Eko Budihardjo, 1991).

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan jawaban atas tuntutan akan adanya suatu pedoman atau arahan dasar dalam kegiatan pengelolaan ruang dan ditujukan untuk memberikan arahan yang jelas bagi para *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan ruang dalam upaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada ruang, serta untuk meminimalkan konflik – konflik yang mungkin terjadi akibat perbedaan kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan sumber daya yang ada pada ruang. Pada lingkup perkotaan / kota, kebutuhan terhadap adanya Rencana Tata Ruang Kota yang muncul sebagai akibat terjadinya proses pertumbuhan suatu perkotaan / kota, yang menyebabkan perlu dirumuskan suatu kebijakan dasar kota yang mampu berfungsi sebagai pedoman tindak bagi seluruh komponen kota dalam kegiatan pengelolaan kota. (Bryant, 1987).

Suatu rencana tata ruang kota berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat, serta acuan dalam pemberian *advice planning* / keterangan rencana kota dan ijin lokasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang kota yang dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan penataan ruang. Secara umum rencana tata ruang kota bermanfaat bagi *stakeholders* sebagai pedoman dalam mengembangkan beragam aktivitas sosial ekonomi lainnya pada lahan sesuai dengan tata ruang kota yang ada.

Rencana Tata Ruang Kota sebagai kebijakan yang mempunyai dasar hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah, bersifat mengikat bagi semuanya sehingga harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen pelaksana pembangunan. Penyimpangan terhadap Rencana tata ruang kota adalah suatu penyimpangan terhadap peraturan hukum yang secara sah berlaku di wilayah kota tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi penyimpangan Rencana tata ruang kota adalah pengendalian tata ruang dengan memberikan keterangan rencana kota kepada masyarakat sebagai dasar untuk proses perijinan selanjutnya.

Kota Tegal merupakan salah satu kota yang terletak di pantura Jawa Tengah yang berkembang dengan pesat, dengan pertumbuhan ekonomi 5,22 % pada tahun 2001, sehingga sangat memerlukan pengendalian tata ruang kota yang efektif. Keterangan Rencana Kota (KRK) merupakan salah satu bentuk pengendalian tata ruang kota yang meliputi pengendalian perencanaan dan pengendalian bangunan. KRK dipakai acuan dalam pemberian ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan, ijin lokasi, ijin sewa tanah pemerintah kota di kota Tegal. Masing – masing perijinan tersebut sudah disahkan dengan Peraturan daerah lengkap dengan retribusinya, tetapi sampai saat ini untuk KRK yang merupakan dasar acuan bagi perijinan yang lainnya belum disahkan dengan peraturan

daerah yang bisa dipakai sebagai landasan hukumnya. Penerbitan KRK pada saat ini hanya berdasarkan pada SK Walikota tanggal 24 Oktober 1998 yang menunjuk Dinas Perkotaan (dahulu Dinas Tata Kota) sebagai instansi pengelola advice planning / KRK. KRK merupakan suatu bentuk dari rencana tata ruang kota yang telah dirumuskan dan diterbitkan dalam bentuk publikasi yang dicetak, pembagian zoning merupakan salah satu cara untuk mengatur kegiatan yang diperbolehkan diatas sebidang tanah (Branch, Melville C, 1996 : 135).

Adanya Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kota Tegal berdasarkan SK Walikota Tegal No. 13 tahun 1999, maka semua proses perijinan melalui melalui KPT, termasuk juga pelayanan KRK, tetapi secara teknis pelaksanaanya koordinasi dengan Dinas Perkotaan. KPT dibentuk dalam rangka pencerminan suatu bentuk pelayanan umum dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. Data pada Dinas Perkotaan menunjukkan jumlah KRK yang sudah terbit mulai tahun 2000 - 2003 sebanyak 725 buah, sedangkan selama tahun 2003 sebanyak 178 buah. Berdasarkan data tersebut dan kepentingan KRK terhadap perijinan yang lainnya maka penerbitan KRK perlu lebih diperhatikan lagi apakah kedudukan KRK hanya akan seperti sekarang atau diperlukan semacam langkah konkrit untuk kemajuan KRK di masa datang. Saat ini KRK baru bersifat himbauan, karena belum didukung dengan peraturan daerahnya, sedangkan KRK dipakai sebagai acuan pengendalian tata ruang kota dalam proses perijinan yang lainnya, yaitu ijin gangguan, ijin sewa tanah pemerintah kota, ijin lokasi dan IMB.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka daerah otonom mempunyai kewenangan didalam

mengelola sumber – sumber daya, serta memiliki otoritas atas kelembagaan, kebijakan dan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku. Salah satu retribusi jasa umum yang saat ini belum dilaksanakan di kota Tegal adalah retribusi penggantian biaya cetak peta, karena belum ada perda yang mengaturnya. Peta merupakan lampiran dari KRK, sehingga apabila mekanisme / prosedur KRK sudah ada peraturan daerahnya maka retribusi penggantian biaya cetak peta kemungkinan bisa segera dapat direalisasi karena merupakan kesatuan antara KRK dan peta.

Salah satu cara untuk peningkatan pelayanan publik adalah membandingkan dengan daerah lain yang telah melaksanakan mekanisme / prosedur KRK dan retribusi penggantian biaya cetak peta yang berdasarkan peraturan daerah, yaitu Kota Semarang dengan Perda No. 14 tahun 1998 dan Kota Surakarta dengan Perda No. 9 tahun 1999, dua kota tersebut pertumbuhan fisik kotanya sangat pesat, serta merupakan perwakilan dari kota pesisir dan bukan pesisir yang terdapat di Jawa Tengah.

Menurut B. Kombaitan (1995 : 18), sehubungan dengan tugas sebagai pengendali tata ruang wilayah, maka pemerintah mengatur perizinan pembangunan kawasan yang meliputi :

- a. Ijin Kegiatan / sektor
- b. Ijin Pertanahan
- c. Ijin Perencanaan dan Bangunan
- d. Ijin Lingkungan

Kota Tegal telah melaksanakan perijinan tersebut diatas, dengan istilah KRK, ijin lokasi, IMB, ijin gangguan, serta ijin sewa tanah Pemerintah Kota. KRK dikelola oleh Dinas Perkotaan, ijin lokasi dikelola BPN, IMB dikelola oleh Dinas Perkotaan, ijin gangguan dikelola oleh Bagian Hukum, ijin sewa tanah Pemerintah Kota dikelola oleh

Bagian Tata Pemerintahan Kota Tegal. Semua perijinan sudah ada perdanya kecuali KRK dan ijin lokasi sehingga kedua perijinan tersebut belum bisa ditarik retribusinya, sedangkan KRK merupakan acuan untuk penerbitan segala perijinan yang ada.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data diatas , dapat diketahui bahwa di Kota Tegal telah dilaksanakan penerbitan Keterangan Rencana Kota yang merupakan salah satu bentuk pengendalian tata ruang kota yang prosesnya melalui KPT dengan koordinasi dengan instansi teknis yaitu Dinas Perkotaan. Selama tahun 2003 jumlah KRK yang terbit sebanyak 178 buah, dan dimasa mendatang jumlah tersebut bisa bertambah lagi karena KRK merupakan acuan bagi perijinan yang lainnya. Pada saat ini, belum seluruh perijinan yang terbit mensyaratkan adanya KRK terlebih dahulu, sehingga potensi yang besar dari jumlah KRK belum tertangani dengan baik. Hal ini disebabkan karena salah satunya adalah mekanisme KRK yang belum jelas / tegas , karena selama ini pelaksanaan KRK hanya berdasarkan surat edaran dari Walikota Tegal tanggal 24 Oktober 1998 dan perijinan yang lain belum secara tegas mensyaratkan KRK hanya sebatas himbauan. Berdasarkan PP No. 66 tahun 2001 maka pemerintah kota mempunyai kewenangan dalam memungut retribusi penggantian biaya cetak peta sebagai lampiran dari KRK, tetapi sampai saat ini di Kota Tegal belum dilaksanakan karena belum adanya peraturan daerahnya. Sehingga dalam studi ini perlu dikaji formulasi dana mekanisme penerbitan KRK sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Tegal. Pada penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah *Bagaimana formulasi dan mekanisme penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Tegal ?*

Untuk memudahkan operasionalisasi atas rumusan masalah tersebut diatas, maka Penelitian yang akan dicari jawabannya adalah :

1. Bagaimana formulasi penetapan retribusi penggantian biaya cetak peta yang merupakan lampiran KRK di Kota Tegal ?
2. Bagaimana mekanisme penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) di kota Tegal ?

1.3. Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1. Tujuan Studi

Tujuan dari dilaksanakan Studi ini adalah menetapkan formulasi dan mekanisme penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) yang dapat digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Tegal.

1.3.2. Sasaran Studi

Untuk mencapai tujuan studi seperti disebutkan dalam Bab 1.3.1 , sasaran – sasaran studi yang akan dilakukan adalah :

- a. Mendiskripsikan potensi pemohon yang mengajukan KRK di Kota Tegal mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2003
- b. Merumuskan formulasi pemungutan retribusi KRK sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Tegal
- c. Menetapkan mekanisme penerbitan KRK sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Tegal
- d. Menganalisis formulasi dan mekanisme penerbitan KRK sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta, dengan menggunakan analisa PHA dan SWOT

- e. Merekomendasikan pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal

1.4. Ruang Lingkup Studi

1.4.1. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah aspek – aspek yang mempengaruhi kelancaran penetapan formulasi dan mekanisme penerbitan KRK sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Tegal yang meliputi sebagai berikut :

- a. Menghitung potensi KRK berdasarkan jumlah yang telah diterbitkan tahun 2000 – 2003 sebanyak 725 buah , sedangkan selama tahun 2003 sebanyak 178 buah telah diterbitkan oleh Dinas Perkotaan berdasarkan Surat Edaran Walikota Tegal tahun 1998.
- b. Merumuskan formulasi pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta sebagai lampiran dari KRK, yang merupakan salah satu retribusi jasa umum berdasarkan PP No. 66 tahun 2001.
- c. Merumuskan mekanisme penerbitan KRK sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta
- d. Menganalisis formulasi dan mekanisme penerbitan KRK sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta
- e. Menetapkan rencana program pelaksanaan penerbitan KRK beserta retribusi penggantian biaya cetak peta

1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah studi adalah di Kota Tegal yang secara administratif meliputi luas 38,50 Km², dengan batas – batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes
- Sebelah selatan : Kabupaten Tegal
- Sebelah timur : Kabupaten Tegal

Gambaran yang lebih jelas tentang ruang lingkup wilayah studi dapat dilihat pada Gambar

1.1 dibawah ini :

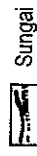


MAGISTER TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2004

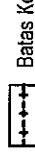
FORMULASI DAN MEKANISME PENERBITAN
KETERANGAN RENCANA KOTA SEBAGAI DASAR
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA
CETAK PETA DI KOTA TEGAL

PETA ADMINISTRASI KOTA TEGAL

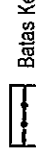
KETERANGAN



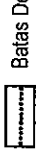
Sungai



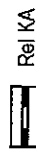
Batas Kota Tegal



Batas Kecamatan



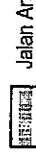
Batas Desa



Rel KA



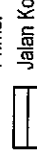
Jalan Arteri Primer



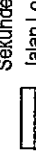
Jalan Arteri Sekunder



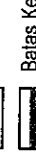
Jalan Kolektor
Primer



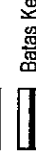
Jalan Kolektor
Sekunder



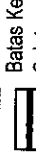
Jalan Lokal



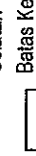
Batas Kec. Tegal Barat



Batas Kec. Margadawa



Batas Kec. Tegal
Selatan



Batas Kec. Tegal
Timur

UTARA

SKALA



0 1 2 3 4 5
0 400 800 1200
M

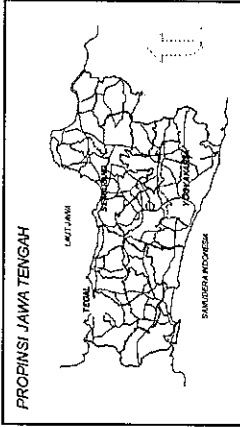
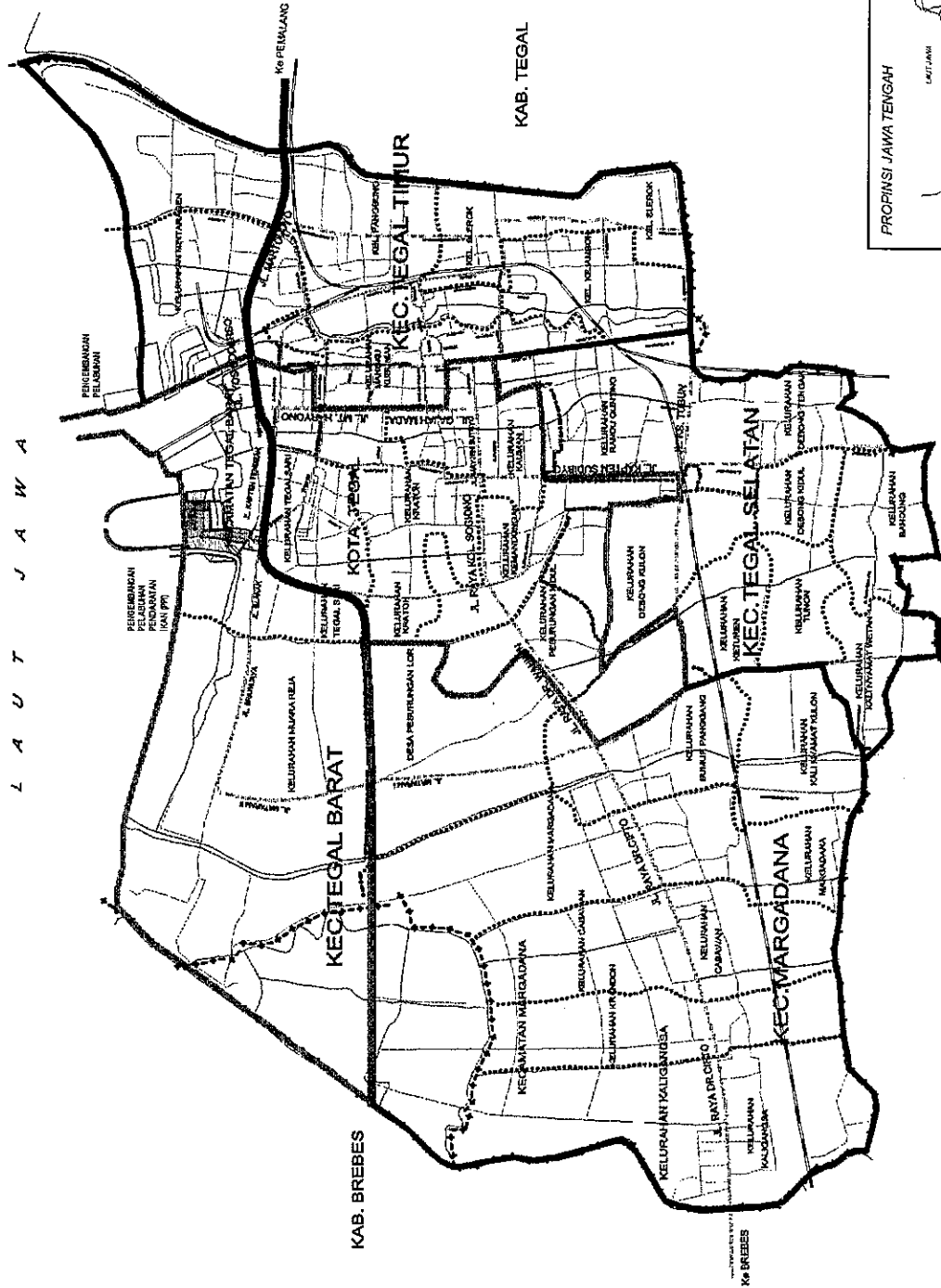
GAMBAR

HALAMAN

G.1.1 --- 9

SUMBER

BAPPEDA KOTA TEGAL



1.5. Kerangka Pemikiran

Kota Tegal merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang terletak di pantai utara dengan luas wilayah 38,50 Km². Dengan wilayah yang terbatas serta jumlah penduduk 242.067 jiwa belum termasuk pendatang temporer, maka kota Tegal termasuk kota yang padat dengan segala aktivitas perekonomian. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sedangkan jumlah wilayah yang terbatas maka pemanfaatan ruang kota akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan aktivitas masyarakat.

Adanya berbagai permasalahan perkotaan yang terjadi di Kota Tegal, maka akan terjadi suatu konflik kepentingan, dimana disatu sisi meningkatnya kebutuhan lahan akibat aktivitas perekonomian dan disatu sisi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan umum. Dengan berbagai kepentingan tersebut maka merupakan suatu tantangan bagi pemerintah Kota Tegal dalam rangka perencanaan dan pengendalian rencana tata ruang kota. Penerbitan Keterangan Rencana Kota (K RK) merupakan salah satu alat pengendalian rencana tata ruang kota, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal dengan instansi pengelola Dinas Perkotaan berdasarkan Surat Edaran Walikota Tegal pada tahun 1998.

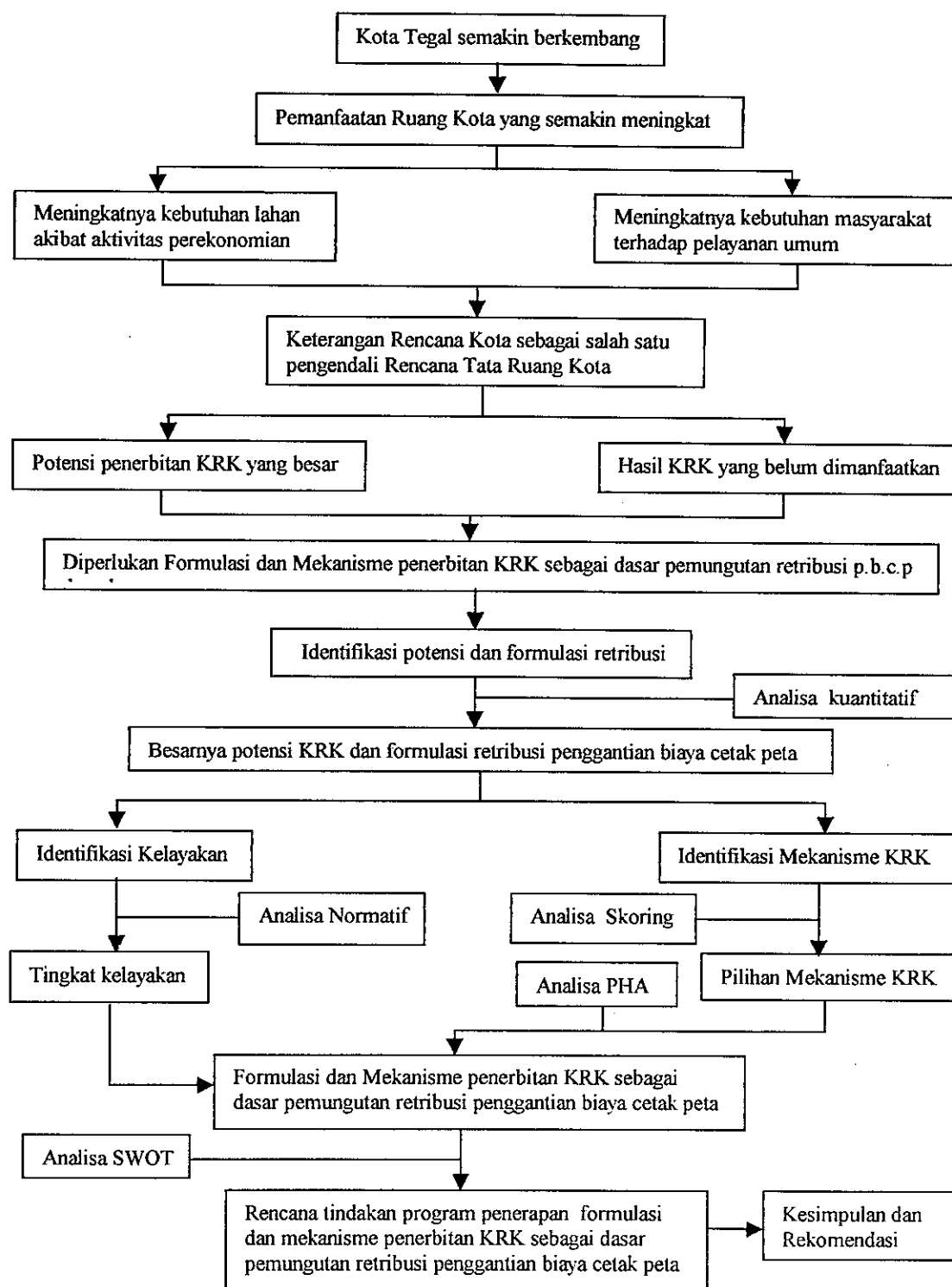
KRK merupakan pengendali tata ruang kota dengan potensi yang semakin meningkat karena sudah dipakai sebagai acuan bagi perijinan yang lainnya seperti IMB, Ijin gangguan, Ijin sewa tanah Pemko, Ijin lokasi. Jumlah K RK yang telah diterbitkan selama tahun 2000 – 2003 sebanyak 725 buah, tetapi hasil dari K RK belum dimanfaatkan secara optimal, karena belum adanya peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaannya. Sehingga saat ini pelaksanaannya baru sebatas penerbitan K RK, belum bisa dipungut retribusi penggantian biaya cetak peta yang merupakan lampiran dari K RK, karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang persyaratan, prosedur serta retribusinya.

Dengan berdasarkan pada potensi KRK yang ada serta hasil KRK yang belum dimanfaatkan secara optimal maka untuk menangani permasalahan tersebut diperlukan suatu rumusan untuk menetapkan formulasi dan mekanisme penerbitan KRK. Sehingga diperlukan tahapan – tahapan untuk menganalisis potensi serta segala yang berkaitan dengan KRK untuk menetapkan formulasi dan mekanisme penerbitan KRK sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Tegal.

Proses menganalisis dimulai dengan mengidentifikasi potensi KRK yang ada serta formulasi retribusi penggantian biaya cetak peta yang berdasarkan analisis dengan data hasil kuesioner (data primer) serta data sekunder. Dari hasil analisis tersebut, maka dapat diteruskan dengan analisis berikutnya untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan – permasalahan tersebut diatas. Selanjutnya dengan analisis untuk mengidentifikasi kelayakan retribusi serta mekanisme penerbitan KRK maka didapat formulasi dan mekanisme penerbitan KRK sebagai penggantian biaya cetak peta di Kota Tegal.

Analisis yang terakhir dengan menggunakan analisis SWOT untuk menentukan rencana program – program pelaksanaan bagi penerapan formulasi dan mekanisme penerbitan KRK. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan kesimpulan dan rekomendasi bagi peneliti serta pemerintah Kota Tegal, sehingga diharapkan bisa segera ditindak lanjuti oleh instansi yang bersangkutan.

Secara skematis maka kerangka pemikiran seperti pada Gambar 1.2 dibawah ini :



GAMBAR 1.2.
KERANGKA PEMIKIRAN

1.6. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Studi

1.6.1 Pendekatan Studi

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji Formulasi dan Mekanisme Penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, maka pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif dan deskriptif. Yang dimaksud mekanisme penerbitan KRK disini adalah proses mulai dari permohonan sampai selesai proses pembuatan KRK yang merupakan hasil dari proses administrasi, suvey lapangan, kemudian ditinjau dari segi perencanaan tata ruang kota. Pendekatan **normatif** adalah pendekatan yang didasarkan pada suatu aturan atau pedoman ideal tertentu yang ditetapkan oleh instansi tertentu maupun landasan hukum lainnya. Pendekatan **deskriptif** memaparkan bagaimana mekanisme penerbitan KRK yang selama ini telah dilaksanakan.

Survey dilakukan untuk mengetahui bagaimana menetapkan formulasi dan mekanisme penerbitan KRK agar dapat dipungut retribusi penggantian biaya cetak peta. Tujuan survey adalah masyarakat, instansi yang berwenang yaitu Dinas Perkotaan Kota Tegal, KPT, instansi terkait, pendapat dari praktisi / akademik serta melihat Kota Semarang dan kota Surakarta yang sudah melaksanakan pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta. Selain itu juga dilakukan kajian literatur untuk mengetahui jenis-jenis retribusi yang bisa dikelola oleh Pemerintah Kota. Untuk memperoleh data dan informasi yang aktual, dapat juga diperoleh dari data sekunder dan data primer / hasil survey.

Selanjutnya setelah data didapatkan maka dilakukan analisis kuantitatif untuk mengetahui potensi KRK serta menetapkan formulasinya, kemudian analisa normatif yaitu dengan melihat kesesuaian dengan kriteria dan prinsip dari retribusi seperti dalam Undang – Undang No. 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001. Setelah

dianalisis untuk mengetahui keterkaitan tupoksi instansi dengan penerbitan KRK, kemudian dilakukan analisis **Proses Hierarki Analitik (PHA)**, yang didasarkan dari pada pendapat narasumber yang terdiri dari unsur pemerintah, akademik / praktisi ekonomi, serta dari anggota DPR. Pendapat narasumber didapat lewat kuesioner yang dibagikan, sesuai tahapan proses analisis PHA. Dengan analisa AHP , untuk mendapatkan model mekanisme penerbitan KRK yang sesuai dengan pendapat nara sumber. Kemudian dengan SWOT yang memperhatikan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang ada di Kota Tegal untuk menyusun rencana tindak untuk pemilihan mekanisme penerbitan KRK serta formulasi dari retribusi penggantian biaya cetak peta sebagai lampirannya.

1.6.2 Metode Pelaksanaan Studi

1.6.2.1 Kebutuhan Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Data dapat dibagi menjadi dua yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. (Sugiarto, 2001). Kebutuhan data seperti terlihat pada Tabel I.1 dibawah ini .

TABEL I.1
KEBUTUHAN DATA FORMULASI DAN MEKANISME PENERBITAN KRK
SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
PETA DI KOTA TEGAL

DATA	ANALISA	INSTANSI	KETERANGAN
a. Data KRK 2000-2003	Kuantitatif	DPK	Data sekunder
b. BPS Kota Semarang dan Surakarta	Kuantitatif	BPS	Data sekunder
c. Perda tentang Retribusi penggantian biaya cetak peta di Semarang dan Surakarta	Normatif	DTK Semarang & Surakarta	Data sekunder
d. Pendapatan masyarakat	Kuantitatif	Masyarakat	Data Primer
e. Jumlah IMB, Ijin gangguan, Ijin lokasi, Ijin sewa tanah pmda	Kuantitatif	DPK, Bag. Hukum, Bag. Tapem, BPN	Data sekunder
f. Upah Minimum Regional / Kota	Kuantitatif	Disnaker	Data sekunder
g. Jumlah pegawai pada tugas KRK	Skoring	DPK, KPT, Bappeda	Data sekunder
h. SOT pada 6 instansi / Bagian	Skoring	DPK, KPT, Bappeda, Bag. Hukum, Bag. Tapem, BPN	Data sekunder
i. Kuesioner tentang pendapat masyarakat terhadap retribusi	Kuantitatif	Masyarakat	Data primer

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2004

1.6.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperoleh data yang akan dijadikan input dalam melakukan tahap kegiatan analisis.

- a. Data dari masyarakat, untuk mendapatkan data tentang pendapat tentang kemampuan masyarakat serta penetapan formulasi retribusi penggantian biaya cetak peta, sedangkan jumlahnya diambil sampel berdasarkan jumlah pemohon KRK selama 1 tahun
- b. Data dari instansi , untuk mendapatkan data tentang pendapat tentang mekanisme penerbitan KRK yang meliputi Bappeda, Dinas Perkotaan, KPT, BPN, Bagian Tata pemerintahan, Bagian Hukum, Praktisi / Universitas, dan DPR. Selain instansi tersebut juga ke BPS untuk mencari data – data sekunder yang diperlukan seperti pada Gambar 1.3.

1.6.2.3. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah diperoleh, selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk tabulasi, yaitu pengolahan data dengan cara menyajikan angka – angka dalam bentuk tabel – tabel sesuai keperluan. Disamping itu data yang berhasil dikumpulkan melalui studi ini, juga diolah dan disajikan dalam bentuk gambar / peta dan bentuk – bentuk penyajian lain yang informatif.

1.6.2.4. Teknik Sampling

Pemilihan sampel dengan sampling non probability ada 4 macam yaitu : accidental sampling, net work sampling, quota sampling, purposive sampling, tetapi pada bagian ini hanya menggunakan 2 macam sampling saja disesuaikan dengan tujuan dan

sasaran penelitian serta metode analisis yang digunakan ditambah informasi dari narasumber, teknik sampling yang digunakan adalah :

A. *Accidental Sampling* / sampling kebetulan yaitu : suatu bentuk sampling non probabilitas , dimana anggota sampelnya yang dipilih / diambil berdasarkan kemudahan mendapatkan data yang diperlukan, sampel yang diambil pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga hemat biaya dan waktu. Sampel ini digunakan untuk mewakili masyarakat dalam pemberian pendapatnya. Jumlah populasi diambil jumlah KRK pada tahun 2003 sebanyak 178 buah. Menurut M. Iqbal Hasan (2002 : 60), maka pengambilan sampel dengan Rumus yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2} \dots\dots\dots(1)$$

dimana : n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = penyimpangan / kesalahan yang diinginkan (%)

Dengan N = 178 orang, e = 5 %, maka dari rumus diatas didapat n = 123 orang, dengan sampel 123 orang, diambilkan dari populasi yang pernah mengajukan KRK tahun 2003

B. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja, misal akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai , maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. (Sugiyono, 2002). Dari definisi tersebut maka pengambilan jumlah sampel tidak menggunakan rumus, tetapi untuk penelitian ini maka Instansi terkait yang akan dijadikan respondentnya. Instansi yang merupakan narasumber yaitu instansi yang mengelola perijinan di Kota Tegal yang ada keterkaitan dengan penerbitan KRK serta anggota DPR dan Akademik yang merupakan perwakilan masyarakat yang dianggap memahami tentang KRK, seperti dalam Tabel 1.2.

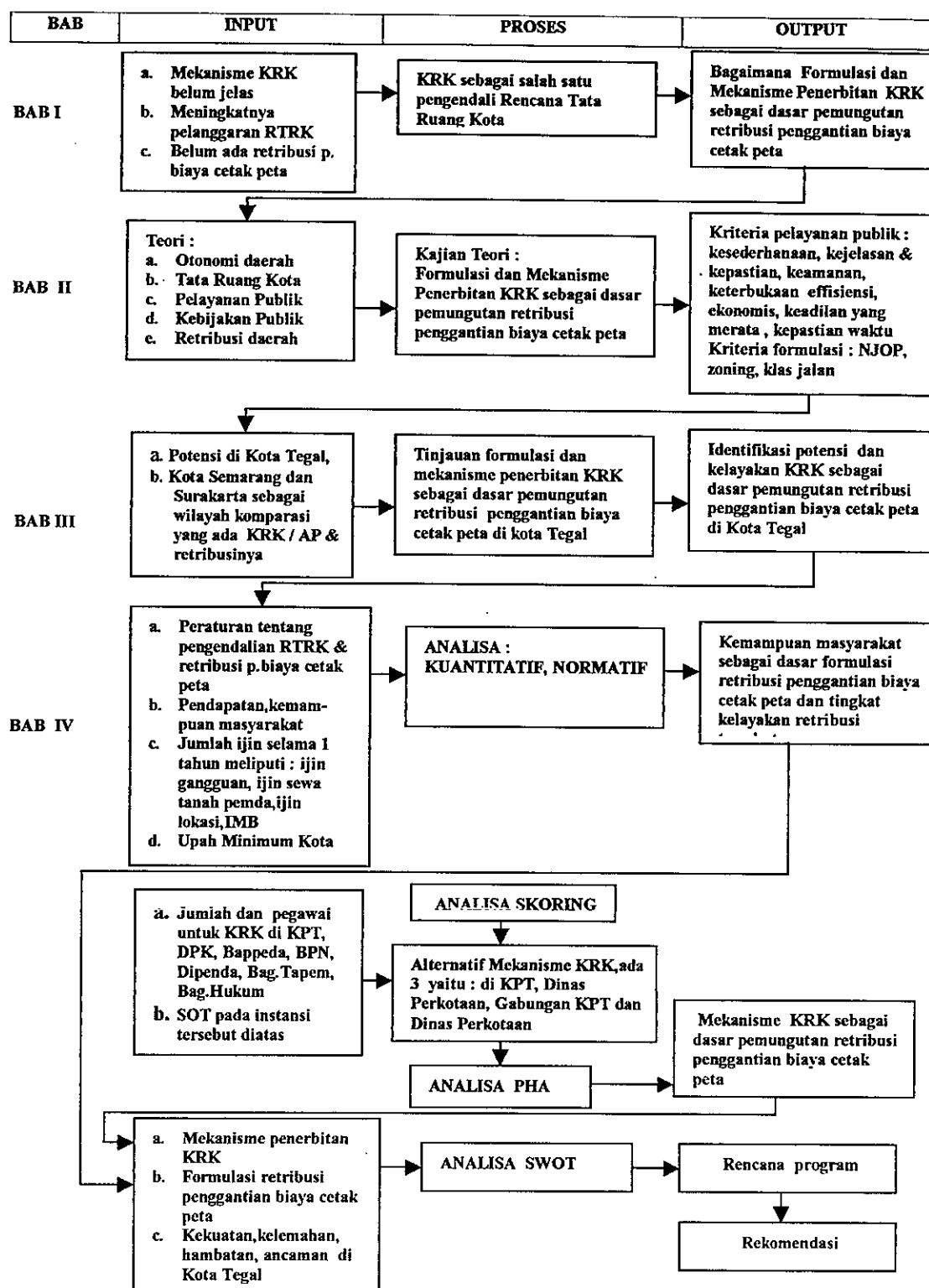
TABEL I.2
KOMPOSISI NARASUMBER FORMULASI DAN MEKANISME PENERBITAN
KRK SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGgantian BIAYA
CETAK PETA DI KOTA TEGAL

NO	NARASUMBER	JUMLAH (orang)	KETERKAITAN DENGAN KRK
1	Dinas Perkotaan	2	KRK, IMB
2	Bappeda	2	Perencanaan Ruang Kota
3	Dinas Pendapatan Daerah	2	Retribusi Daerah
4	Bag. Hukum Setda	2	Ijin Gangguan
5	Bag. Tata Pemerintahan Setda	2	Ijin sewa tanah Pemda
6	BPN	2	Ijin Lokasi
7	UPT	2	Pelayanan perijinan
8	Praktisi Ekonomi / Akademik	1	Teori tentang mekanisme KRK dan retribusi
9	Anggota DPR	1	Legalitas dari Peraturan Daerah dan wakil rakyat
JUMLAH TOTAL NARASUMBER		16	

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2004

1.6.2.5. Kerangka Analisis

Hasil dari studi “ Formulasi dan Mekanisme Penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal “ seperti terlihat pada Gambar 1.3



GAMBAR 1.3
KERANGKA ANALISIS
FORMULASI DAN MEKANISME PENERBITAN KRK SEBAGAI DASAR
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

1.6.2.6. Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dipakai untuk data yang bersifat terukur, sedangkan untuk data yang tidak terukur dipakai analisis kualitatif.

A. Analisis Kuantitatif

Analisa kuantitatif yang digunakan untuk menghitung efisiensi dari rencana pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta. Efisiensi yaitu perbandingan antara jumlah pendapatan yang diperoleh dari retribusi penggantian biaya cetak peta dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh retribusi tersebut. Pada analisis efisiensi diperhitungkan output atau hasil yang akan diperoleh dengan input atau modal yang digunakan, apabila ratio (r) > 1 maka retribusi tersebut layak untuk dipungut, apabila (r) < 1 maka retribusi tersebut tidak layak untuk dipungut.

Berdasarkan rumus dari Mardiasmo (2002) maka :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Jumlah output}}{\text{Jumlah input}} \dots\dots\dots (2)$$

Biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah dalam pemungutan retribusi daerah yang baru, menurut pendapat Gray,et.al.(1993:274), yang intinya adalah Biaya pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menurut :

- (1) Barang – barang modal, seperti gedung, kendaraan, peralatan dan lain – lain
- (2) Biaya operasional atau rutin, mencakup gaji pegawai, perjalanan dinas, biaya administrasi dan lain – lain
- (3) Subsidi , misal untuk biaya administrasi

Metode ini akan digunakan untuk mengetahui perbandingan antara perkiraan hasil atau pendapatan yang akan diperoleh dari retribusi penggantian biaya cetak peta, dengan perkiraan biaya atau modal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bila hasil perbandingan (r) > 1 maka retribusi tersebut layak untuk dilaksanakan.

Jumlah pendapatan adalah jumlah perkiraan pendapatan retribusi apabila digunakan formulasi retribusi yang disetujui sebagian besar dari respondent, dengan jumlah sampel sebanyak 123 orang. Batas minimal retribusi penggantian biaya cetak peta berdasarkan Perda pada daerah komparasi yaitu kota Semarang , serta batas maximal retribusi sesuai dan Perda di kota Surakarta.

Jumlah pengeluaran adalah jumlah perkiraan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelayanan publik berupa penggantian biaya cetak peta serta jasa pelayananan, dengan jangka waktu selama satu tahun, dengan jumlah pemohon KRK sebanyak 178 orang.

Rumus / formulasi retribusi per m^2 pada retribusi penggantian biaya cetak peta yang berdasarkan prinsip – prinsip pemungutan retribusi jasa umum dengan mempertimbangkan : a. biaya penyediaan, b. kemampuan masyarakat, c. aspek keadilan. Dengan memperhatikan aspek tersebut, serta manfaat KRK maka dibuat formulasi retribusi per m^2 adalah :

$$R = f (\text{nilai ekonomis}) + f (\text{zoning}) + f (\text{klas jalan}) \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan :

Nilai ekonomis adalah besarnya NJOP pada tanah tersebut untuk tahun terakhir, berdasarkan PBB

Zoning tergantung pada letak tanah tersebut pada zoning tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kota , zoning dibagi dalam beberapa macam

yaitu : perumahan; fasilitas sosial / rekreasi / pendidikan / kesehatan; perkantoran; jasa campuran; perdagangan; pergudangan; industri.

Kelas jalan tergantung pada letak tanah tersebut pada klas jalan tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang klas jalan, yang dibagi dalam beberapa macam yaitu : klas I, klas II, klas III, klas IV.

Untuk hasil akhir dari penentuan formulasi retribusi penggantian biaya cetak peta, tergantung dari hasil kuesioner pada respondent, komparasi dengan kota Semarang dan Kota Surakarta yang telah ada peraturan daerah tentang retribusi penggantian biaya cetak peta, serta peraturan daerah Kota Tegal tentang Bangunan .

B. Analisis Kualitatif

B.1. Kelayakan Normatif, yaitu analisis berdasarkan suatu aturan atau pedoman ideal tertentu. Aturan tersebut dapat merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh instansi tertentu, maupun landasan hukum atau lainnya. Dalam studi ini analisis normatif digunakan untuk menganalisa kelayakan dari retribusi cetak peta merupakan salah satu ekstensifikasi retribusi dalam upaya peningkatan PAD di Kota Tegal. Berdasarkan Undang – undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka terdapat 7 kriteria untuk retribusi jasa umum (a-g), serta ditambah 3 kriteria tambahan yaitu h. sudah ditetapkan di daerah lain, i. termasuk bidang Kimpraswil, j. sudah ada pelaksanaannya di Kota Tegal.

Penilaian dilakukan dengan memberi skoring untuk setiap kriteria dengan tanda (√) menyatakan bahwa kriteria tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dan tanda (x) menyatakan bahwa kriteria tersebut tidak sesuai dengan kondisi di Kota Tegal. Untuk Kota

Tegal retribusi jasa umum yang belum ada adalah : retribusi penggantian biaya cetak peta.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.3. sebagai berikut :

TABEL I.3
ANALISIS SKORING KELAYAKAN NORMATIF
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DIKOTA TEGAL

NO	JENIS RETRIBUSI	RETRIBUSI JASA UMUM										KETERANGAN (layak / tidak layak)
		KRITERIA										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
1	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta											

Sumber : UU No. 18 / 1997

Keterangan :

- a. Retribusi Jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang atau pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan / atau kualitas pelayanan yang lebih baik;
- h. Sudah diterapkan di daerah lain;
- i. Termasuk dalam bidang Kimpraswil dan perencanaan wilayah dan kota;
- j. Sudah ada pelaksanaan tahap awal di Kota Tegal, meskipun belum optimal.

Tanda (√) menunjukkan bahwa retribusi penggantian biaya cetak peta memenuhi kriteria diatas. Apabila retribusi penggantian cetak peta bisa memenuhi minimal 7 kriteria dari 10 kriteria yang ada maka retribusi tersebut layak untuk diterapkan di kota Tegal. Kriteria tersebut diatas berdasarkan peraturan yang telah ada dan komparasi dengan daerah lainnya.

B.2. Analisa Skoring

Analisa skoring yang digunakan 2 macam, yang pertama untuk menganalisa tupoksi dan yang kedua untuk alternatif mekanisme penerbitan KRK. Analisa skoring yang pertama digunakan untuk menganalisa keterkaitan tupoksi instansi dengan penerbitan KRK. Kriteria tupoksi yang dianalisa meliputi perencanaan tata ruang, pengendalian tata

ruang, pemungut retribusi, pelayanan perijinan, serta instansi pemerintah daerah. Hasil dari analisa tersebut akan didapatkan beberapa instansi yang ada keterkaitan dengan tupoksi penerbitan KRK. Bobot untuk kriteria tupoksi adalah : perencanaan tata ruang (35%), pengendalian tata ruang (35%), pemungut retribusi (30%). Penilaian bobot tersebut karena perencanaan sama pentingnya dengan pengendalian tata ruang, sedangkan retribusi merupakan implementasi lanjutan dari KRK sehingga nilainya sedikit dibawah pengendalian tata ruang. Penilaian diasumsikan dengan angka 1 - 5 sesuai dengan penilaian penulis berdasarkan tupoksi yang ada, dimana hasil akhir yang mempunyai nilai tertinggi ke 1,2,3 merupakan instansi yang ada keterkaitan dengan penerbitan KRK sesuai dengan tupoksinya.

Analisa skoring yang kedua digunakan untuk menganalisa beberapa alternatif mekanisme penerbitan KRK . Analisa ini menggunakan kriteria SDM di bidang tata ruang, dan SOT yang telah ada. Nilai bobot sama yaitu masing – masing 50 % kerana dianggap sama pentingnya. Penilaian antara 1 – 5 sesuai asumsi dari penulis berdasarkan tupoksi serta SOT yang ada, sedangkan hasil akhir yang mempunyai nilai tertinggi ke 1,2,3 merupakan alternatif mekanisme penerbitan KRK.

B.3. Proses Hirarki Analitik (PHA)

Analisis kualitatif lainnya yang dilakukan adalah Proses Hierarki Analitik (PHA) pada pemilihan alternatif mekanisme KRK. Penggunaan ini didasarkan pada pertimbangan antara lain : metode ini mempunyai kemampuan untuk mengkuantitatifkan data kualitatif dan mampu menangkap persepsi dari mereka yang dianggap mengetahui dan mengerti tentang persoalan yang dihadapi. Kelebihan metode Proses Hirarki Analitik (PHA) ini adalah data yang bersifat kualitatif dapat dikuantitatifkan, dapat digunakan untuk

memecahkan masalah dengan tujuan majemuk dan kriteria majemuk. PHA ini juga mempunyai kemampuan dalam menentukan keputusan yang didasarkan pada aspek akademis, aspek kepakaran dan aspek intuisi dan terakhir dapat digunakan untuk merinci keadaan yang bersifat kompleks dan tidak terukur sehingga menghasilkan keputusan terbaik.

Pemilihan Alternatif mekanisme penerbitan KRK berdasarkan pada hasil analisa scoring dari tupoksi instansi serta keterkaitan instansi tersebut dengan KRK. Dari hasil analisa scoring tersebut diambil 3 alternatif mekanisme yang paling tinggi nilainya, karena nantinya hanya akan dipilih satu alternatif yang paling sesuai dengan tupoksi dan keterkaitan dengan KRK. Penilaian perbandingan kriteria 1 dengan kriteria 2 dinyatakan dengan tingkat kepentingan elemen yang satu terhadap elemen yang lainnya dengan skala penilaian antara 1 sampai 9 , bisa dilihat pada Tabel I.4. dibawah ini :

TABEL I.4
SKALA BANDING SECARA BERPASANGAN DALAM MODEL PHA

BOBOT	DEFINISI	PENJELASAN
1	Elemen yang satu sama pentingnya daripada elemen lainnya	Kedua elemen menyumbangkan sama besar pada sifat itu
2	Nilai diantara pertimbangan 1 dan 3	Kompromi diperlukan antara 2 pertimbangan tersebut
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit mendukung satu elemen atas yang lainnya
4	Nilai diantara pertimbangan 3 dan 5	Kompromi diperlukan antara 2 pertimbangan tersebut
5	Elemen yang satu sangat penting dibandingkan yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat mendukung satu elemen atas yang elemen lainnya
6	Nilai diantara pertimbangan 5 dan 7	Kompromi diperlukan antara 2 pertimbangan tersebut
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen yang lainnya	Satu elemen dengan kuat didukung dan dominannya terlihat dalam praktek
8	Nilai diantara pertimbangan 8 dan 9	Kompromi diperlukan antara 2 pertimbangan tersebut
9	Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen yang lainnya	Bukti yang mendukung elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas j mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas k, maka k mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan j	

Sumber : Saaty, 1993 : 85

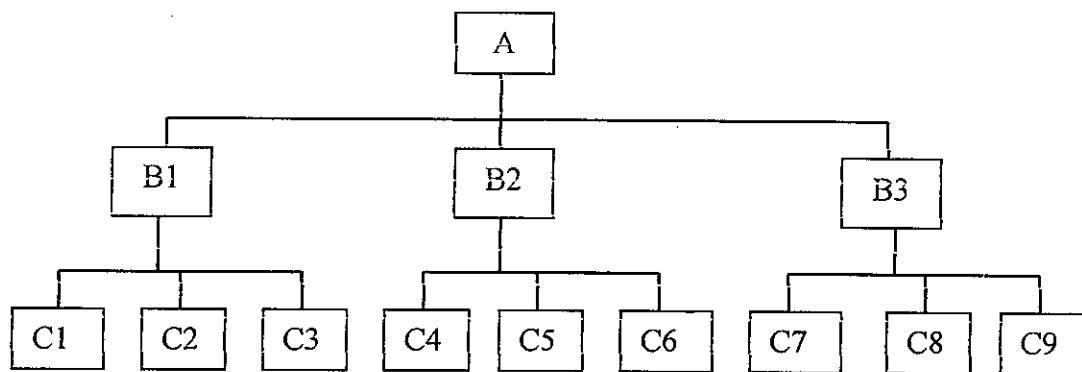
□ Tahapan Operasional dalam Analisa Hierarki Proses

(a) Penyusunan Hierarki

Penyusunan hierarki yang terpenting adalah kemampuan untuk menyusun, untuk memadukan wawasan, pengalaman, rasionalitas dan intuisi dalam menghasilkan hierarki yang handal dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh pengetahuan terinci, maka menyusun realitas kompleks ke dalam bagian yang menjadi

pokoknya, kemudian bagian ini ke dalam bagian seterusnya lagi secara hirarki. Dengan memecah realitas menjadi gugusan – gugusan yang lebih kecil, sehingga dapat memadukan sejumlah besar informasi ke dalam struktur suatu masalah yang membentuk gambaran yang lengkap dari keseluruhan sistem. (Saaty, 1993 : 17)

Pemilihan prioritas / alternatif hierarki disusun berupa diagram pohon , secara skematis seperti Gambar 1.4 sebagai berikut :



Keterangan : Hierarki terdiri dari 4 tingkat yaitu :

Tingkat 1 : Tujuan yang ingin dicapai (A)

Tingkat 2 : Pengelompokan elemen – elemen atas beberapa kriteria utama (B)

Tingkat 3 : Sub kriteria (C)

Sumber : Saaty (1993 : 33)

GAMBAR 1.4
MODEL HIERARKI DALAM METODE PHA

(b) Penentuan Prioritas

Proses pengisian persepsi dilakukan dengan skala penilaian antara 1 sampai 9. Berdasarkan nilai – nilai perbandingan tadi , dapat disusun matriks penilaian untuk setiap hierarki mulai tingkat teratas sampai dengan tingkat hierarki terendah. Apabila telah berada dalam matriks , maka setiap matriks perlu dinormalisasikan dengan menggunakan operasi matriks tertentu sebelum masuk dalam analisis berikutnya. Hubungan yang

menggambarkan pengaruh relatif elemen pada setiap tingkatan hirarki tertentu terhadap setiap elemen pada tingkat yang lebih tinggi. Perbandingan berpasangan diulangi lagi untuk semua elemen dalam tiap tingkat. Langkah terakhir adalah dengan memberi bobot setiap vektor dengan prioritas sifatnya. (Saaty, 1993:18)

(c) Perhitungan Bobot dan Uji Konsistensi

Bobot prioritas masing – masing elemen dalam masing – masing matriks ditentukan sesuai dengan nilai eigen vektornya. Nilai – nilai ini menggambarkan prioritas suatu elemen dalam matriks. Pemberian bobot dalam metode ini dimaksudkan untuk melihat prioritas dalam pengambilan keputusan dengan sederetan kriteria atau alternatif yang ditentukan melalui perbandingan masing – masing kriteria yang diberi bobot dari skala terendah hingga tertinggi (1 – 9).

□ Analisis PHA Terhadap Mekanisme Penerbitan KRK di Kota Tegal

Analisis PHA terhadap mekanisme pengelolaan KRK dilakukan dengan cara / langkah dengan level II adalah persyaratan dan prosedur, biaya dan waktu, sedangkan level III adalah sendi – sendi manajemen dalam hal pelayanan publik seperti yang ditentukan dalam bukunya Warsito, et all (2001:184). Kriteria pelayanan publik adalah : Kesederhanaan, Keamanan, Keterbukaan, Efisiensi, Ekonomis, Keadilan yang merata , Kejelasan dan Kepastian, Kepastian waktu .

B.4. Analisa SWOT

Program Rencana Penerapan Mekanisme dan Formulasi Penerbitan KRK sebagai dasar pemungutan retribusi daerah di Kota Tegal disusun menggunakan pendekatan rasional berdasarkan hasil dari analisa SWOT, dalam arti bahwa rencana tindakan yang

diprogramkan mampu dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dan sistem administrasi yang berlaku pada Dinas / Instansi Pelaksana.

Langkah – langkah dalam menyusun rencana tindakan antara lain :

- Mengidentifikasi semua hal yang merupakan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (oportunity) dan ancaman (threat)
- Memberi skoring pada masing – masing perihal sesuai tingkatannya
- Menggabungkan strategi antara S – O, W – O, S – T dan W – T
- Menilai penggabungan tersebut dengan skoring yang ada, untuk menentukan peringkat yang utama
- Membuat program – program untuk pelaksanaan strategi utama yang telah terpilih dari skoring diatas

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian tentang Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal, disusun dengan sistematika laporan dibawah ini :

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup materi dan wilayah studi , kerangka pemikiran, pendekatan dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, yang berisi kajian terhadap beberapa literatur berupa teori yang berhubungan dengan otonomi daerah, pengendalian tata ruang kota, pelayanan publik, kebijakan publik, retribusi daerah, retribusi penggantian biaya cetak peta, kriteria mekanisme penerbitan KRK, kriteria formulasi

retribusi penggantian biaya cetak peta serta teori – teori yang mendasari penelitian ini.

BAB III : Gambaran Umum Wilayah Studi, yang berisi tinjauan umum Kota Tegal sebagai wilayah studi serta data sekunder yang berkaitan dengan formulasi dan mekanisme penerbitan KRK sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Tegal , serta tinjauan wilayah komparatif yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta yang telah ada Perda tentang retribusi penggantian biaya cetak peta.

BAB IV : Analisis Formulasi dan Mekanisme Penerbitan Mekanisme Penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal, yang meliputi analisa kuantitatif, normatif, scoring, Proses Hierarki Analitik (PHA), dan SWOT .

BAB V : Kesimpulan dan Rekomendasi yang berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian / studi ini dan rekomendasi kepada pemerintah Kota Tegal yang berisi tentang program – program serta rekomendasi untuk studi lanjut yang berisi usulan untuk penelitian yang akan datang, sehingga diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan berkelanjutan bagi dunia akademik.

BAB II

FORMULASI DAN MEKANISME PENERBITAN KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK) SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

2.1. Otonomi Daerah

Konsekuensi pelaksanaan asas desentralisasi sesuai UU No. 22 / 1999 dan UU No. 25 / 1999 dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengelola kepentingan daerahnya. Hal ini berarti otonomi daerah adalah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu UU No. 22 /1999 tentang Pemerintah Daerah; UU No. 25 / 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Kota atau Kabupaten berhak dan berwenang atas kelembagaan, kebijakan dan keuangan daerah.

Perubahan sistem pemerintah dari sentralistik menjadi demokrasi dengan diberlakukan Otda, maka terdapat banyak permasalahan , antara lain : adanya indikasi sulitnya meningkatkan PAD meskipun ada penyerahan urusan – urusan pemerintahan kepada Kota / Kabupaten. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. (Malarangeng dkk, 2001 : 107).

Beberapa studi keuangan daerah menunjukkan sekitar 60 % sampai 65 % total pendapatan pemerintah daerah datang dari pemerintah pusat, utamanya dari penjatahan . Berbagai hasil observasi membuktikan bahwa administrasi keuangan lokal sangat bergantung kepada sumber keuangan luar , sementara optimalisasi sumber keuangan lokal sangat rendah akibat sistem dan metode pengumpulan pajak yang tidak efisien. (Malarangeng dkk, 2001 : 133). Salah satu perwujudan dari prinsip Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab itu adalah ketentuan tentang titik berat Otonomi daerah yang diletakkan pada Kota / Kabupaten. Menurut UU No. 22 / 1999 tentang Pemerintah Daerah pasal 10 ayat (1) bahwa Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pelaksanaan *good governance* di daerah, setidaknya terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu : prinsip kepastian hukum, transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan partisipasi. *Good Governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai – nilai dan yang bersifat mengarahkan , mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai – nilai itu didalam tindakan dan kehidupan keseharian.(Warsito, 2001 : 66)

Berdasarkan uraian diatas maka kewenangan daerah otonom makin ditingkatkan sejak diberlakukan peraturan -- peraturan tentang otonomi daerah, sehingga diharapkan daerah bisa mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola kebutuhannya sendiri dengan menerapkan prinsip – prinsip *good governance* yang telah ada.

2.2. Keterangan Rencana Kota

Kota adalah wadah tempat tinggal / permukiman, kesempatan kerja dan kegiatan usaha serta kegiatan pemerintah dan lain – lain. Pembangunan kota tidak lepas dari pembangunan wilayah, termasuk pedesaan sekitar kota tersebut. Kebijakan yang ditujukan pada pembangunan wilayah dan pedesaan akan mempengaruhi perkembangan kota – kota, kebijakan pembangunan kota akan mempengaruhi wilayah dan pedesaan di sekitar kota tersebut. Pemanfaatan tanah yang baik akan menjamin ekosistem yang stabil , membatasi pencemaran udara, serta menciptakan struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional & masyarakat dan tidak terbatas pada perkembangan kota – desa saja. (Sukanto dan Karseno, 1993 : 11)

Perencanaan Kota dan daerah, perencanaan pengelolaan kota, perencanaan manajemen dan perencanaan administrasi negara seharusnya diperlakukan sebagai kegiatan – kegiatan yang setara. Menurut Branch (1996 : 51), Kepadatan perkotaan tergantung pada 3 kondisi yaitu :

- a. Persentase luas tanah yang tertutup oleh bangunan tanpa adanya ruang terbuka
- b. Ketinggian bangunan
- c. Banyaknya ruang terbuka yang permanen di seluruh wilayah kota

Perencanaan kota tidak dapat efektif, kecuali bila dilakukan dengan pengenalan, pemahaman, dan pemanfaatan struktur kekuatan pemerintah dan non pemerintah. Suatu proses yang mendasar bagi suatu kota, sebagaimana mendasarnya perencanaan bagi kota tersebut hanya berlaku bila disusun didalam struktur pemerintahan setempat dan manajemen kota yang reguler. Penyelenggaraan kegiatan perkotaan dan rencana – rencana yang disusun oleh dinas – dinas yang independent di tingkat kota juga merupakan bagian dari perencanaan kota beserta pemeberlakuannya. Departemen dan dinas – dinas

pelaksana merencanakan kota sesuai dengan tanggung jawab masing – masing yaitu berkaitan dengan penyediaan sistem dan pelayanan. (Branch, 1996 : 132).

Rencana induk kota merupakan alat utama untuk mengimplementasikan perencanaan penggunaan tanah, yang dirumuskan dan diterbitkan dalam bentuk publikasi yang dicetak. Zoning adalah jenis cara yang paling banyak digunakan untuk menetapkan penggunaan atau mengatur kegiatan yang diperbolehkan diatas sebidang tanah. Berbagai macam penggunaan khusus ditetapkan didalam suatu pengelompokan yang bersifat umum, yaitu pertanian, permukiman, komersial dan daerah industri. Semua mintakat / zoning secara bersama – sama merupakan alat yang sangat kuat didalam perencanaan dan pengendalian penggunaan lahan. Dengan menggunakan sekumpulan alat tersebut, kegagalan di dalam penyelenggaraan perencanaan fisik yang efektif sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh tidak cukupnya dukungan publik, politik atau struktur kekuatan lainnya , bukan disebabkan oleh tidak adanya prosedur untuk mencapai perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik. (Branch, 1996 : 143).

Peta – peta pokok biasanya telah dibuat sebelum pemintakatan / zoning dan penyusunan rencana induk kota. Peta – peta tersebut diperlukan untuk menunjukkan lokasi – lokasi jalan yang direncanakan sehingga akan mempengaruhi tempat – tempat pendirian bangunan dan prasarana. Keterangan Rencana Kota merupakan surat yang berisi data perencanaan kota beserta lampiran petanya di tempat yang diajukan / diterangkan dalam surat tersebut. Kebutuhan akan lahan untuk pembangunan seringkali mengalami benturan kepentingan. Pada umumnya benturan kepentingan ini mempunyai ciri yang sama, yaitu konflik antara ‘pembangunan dengan pendekatan kualitas’ dan ‘pembangunan dengan pendekatan kuantitas’. Yang pertama menginginkan pembangunan yang sekaligus mengembangkan segi – segi kualitas hidup, sedangkan yang kedua mengutamakan

petumbuhan yang menghasilkan penambahan materi. (Real Estat, No.2, 2000 : 7). Menurut Jurnal PWK No. 17 (1995 :18), Ijin pembangunan kawasan dapat dikelompokkan atas 3 bagian yaitu :

- a. Ijin kegiatan / sektor,
- b. Ijin pertanahan,
- c. Ijin perencanaan dan bangunan,
- d. Ijin lingkungan ,

Ijin pembangunan kawasan yang berjenjang membutuhkan acuan Rencana Tata Ruang dan Perencanaan Lingkungan yang berjenjang pula. Keterangan Rencana Kota merupakan bentuk dari ijin kegiatan / sektor yang berdasarkan rencana tata ruang kota yang telah ada peraturan daerahnya, serta dikeluarkan oleh instansi pengendali dan pengelola pemanfaatan ruang kota, sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. KRK termasuk salah satu bentuk keterangan / surat pengendalian tata ruang kota yang dikeluarkan secara resmi dari instansi yang berwenang dan dipakai sebagai acuan bagi perijinan yang lainnya.

Menurut Deliyanto (2000), Fungsi lahan sebagai sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi diantaranya adalah : lahan sebagai muka bumi, sebagai sarana produksi dan sebagai benda ekonomi. Lahan dipandang sebagai benda ekonomi, berfungsi sebagai benda yang dapat dijual belikan , sebagai tempat usaha , benda kekayaan, jaminan dan sebagainya. Pajak tanah mempengaruhi guna lahan dan dapat digunakan untuk mengendalikan atau merangsang pembangunan. (Branch, 1996 : 169). Salah satu sarana atau kriteria untuk membedakan tanah sebagai benda ekonomi adalah berdasarkan klas jalan, zoning dan NJOP dari tanah tersebut.

Salah satu pengendali rencana tata ruang kota adalah Keterangan Rencana Kota, seperti yang telah dilaksanakan di Kota Tegal berdasarkan Surat Edaran Walikota Tegal

tahun 1998, dengan instansi pengelola Dinas Perkotan (dahulu Dinas Tata Kota). KRK berisi tentang rencana tata ruang kota yang dilampiri dengan peta pada suatu lokasi yang diajukan KRK tersebut. Salah satu rencananya adalah zoning yaitu fungsi / penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang kota, seperti pada Peraturan Daerah Kota Tegal No. 2 tahun 1995 tentang Evaluasi dan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota.

2.3. Pelayanan Publik dan Retribusi Daerah

2.3.1. Pelayanan Publik

Menurut Dwidjowijoto (2003), pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Pelayanan Primer, yaitu pelayanan yang paling mendasar
- b. Pelayanan Sekunder, yaitu pelayanan pendukung namun bersifat kelompok spesifik
- c. Pelayanan Tersier, yaitu pelayanan yang berhubungan secara tidak langsung kepada publik.

Pelayanan primer atau pelayanan minimum yang dilakukan oleh pemerintah meliputi : a. Pelayanan kewargaan, b. Pelayanan kesehatan, c. Pelayanan pendidikan, d. Pelayanan ekonomi. Sedangkan Menurut Hoogerwerf dalam Sunggono (1994 : 24), definisi kebijakan publik adalah :

- a. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengenai langsung atau tidak langsung semua anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu.
- b. Kebijakan publik mengikat bagi anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu, juga disebabkan karena kebijaksanaan publik mengikat, maka selalu timbul pertanyaan apa yang menjadi atau harus menjadi ukuran kebijaksanaan

Sebuah kebijaksanaan publik yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang, sebelumnya diimplementasikan, serta dievaluasi hasil – hasil implementasinya, maka kebijaksanaan publik tersebut diberi bentuk hukum dengan pelbagai bentuk peraturan perundang – undangan yang ada. Hukum memberikan legitimasi bagi kebijaksanaan (law effectively legitimates policy). Berikutnya kebijaksanaan itu dapat dipaksakan berlakunya (pelaksanaannya) dan mengikat bagi orang – orang atau pihak – pihak yang mengadi sasaran kebijaksanaan. (Sunggono, 1994 : 53)

Menurut Dior dalam Sunggono (1994), bahwa penggunaan hukum sebagai instrumen kebijaksanaan mempunyai arti yang penting, karena penggunaan hukum memiliki beberapa kelebihan , yaitu hukum bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan dan memiliki sanksi. Implementasi kebijaksanaan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga – lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintah yang terendah. Disamping itu setiap pelaksanaan kebijaksanaan publik masih memerlukan pembentukan kebijaksanaan dalam wujud peraturan perundang – undangan . Selanjutnya, setidaknya – tidaknya terdapat 12 ciri yang terdapat dalam pembuatan kebijaksanaan publik yaitu :

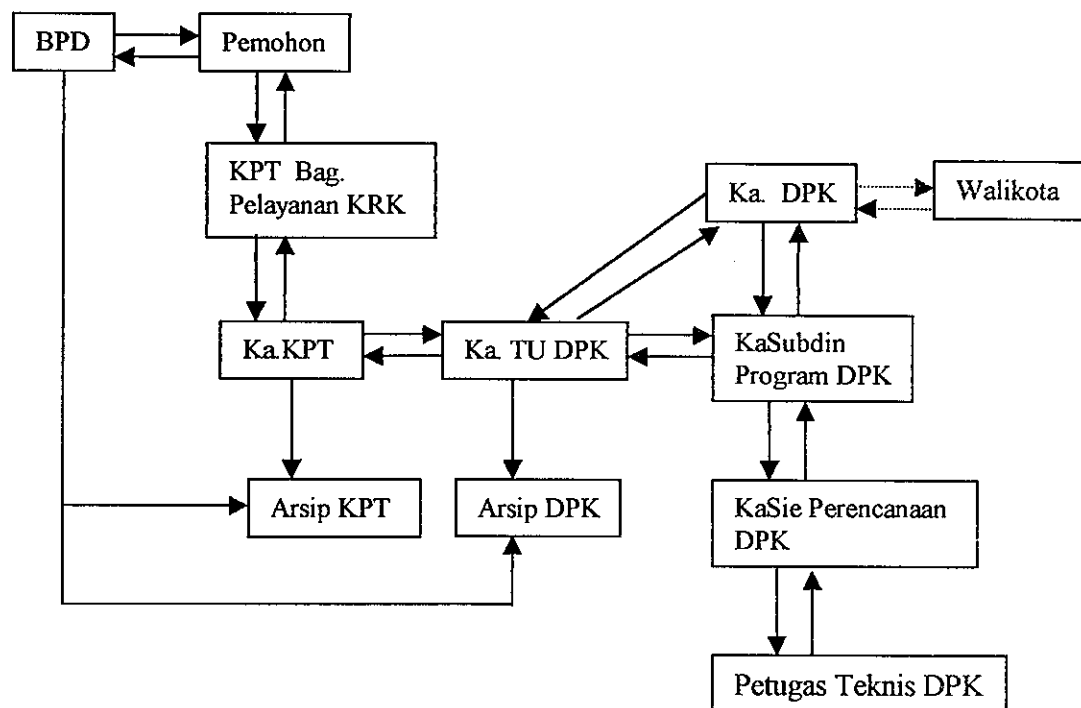
- a. Bersifat kompleks
- b. Prosesnya bersifat dinamis
- c. Komponen – komponen yang beragam
- d. Peran masing – masing sub struktur berbeda
- e. Memutuskan
- f. Sebagai pedoman umum
- g. Untuk mengambil tindakan
- h. Diarahkan pada masa depan

- i. Terutama dilakukan oleh lembaga - lembaga pemerintah
- j. Secara formal dimaksudkan untuk mencapai tujuan
- k. Apa yang tercermin dalam kepentingan umum
- l. Dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin

Menurut Dunn (2000 : 233), Model kebijakan (policy models) adalah representasi sederhana mengenai aspek – aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan – tujuan tertentu. Penggunaan model – model kebijakan bukanlah masalah pilihan, karena setiap orang menggunakan beberapa model. Terdapat 2 bentuk utama model kebijakan yaitu :

- a. Model deskriptif adalah menjelaskan dan atau memprediksikan sebab – sebab dan konsekuensi – konsekuensi dari pilihan – pilihan kebijakan. Model ini digunakan untuk memantau hasil – hasil dari aksi – aksi kebijakan.
- b. Model normatif adalah bertujuan tidak hanya menjelaskan dan / atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai).

Menurut Thomas R. Dye dalam (Dwidjowijoto, 2003), mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Pelayanan penerbitan KRK merupakan salah satu dari pelayanan primer yang juga merupakan kebijakan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah , karena ada keterkaitan dengan pendidikan / informasi serta ekonomi / hak milik pribadi. Dengan menggunakan model normatif, maka berdasarkan tupoksi yang terdapat di SOT pada KPT dan Dinas Perkotaan di Kota Tegal dapat digambarkan mekanisme penerbitan KRK seperti pada gambar 2.1 dan 2.2 dibawah .



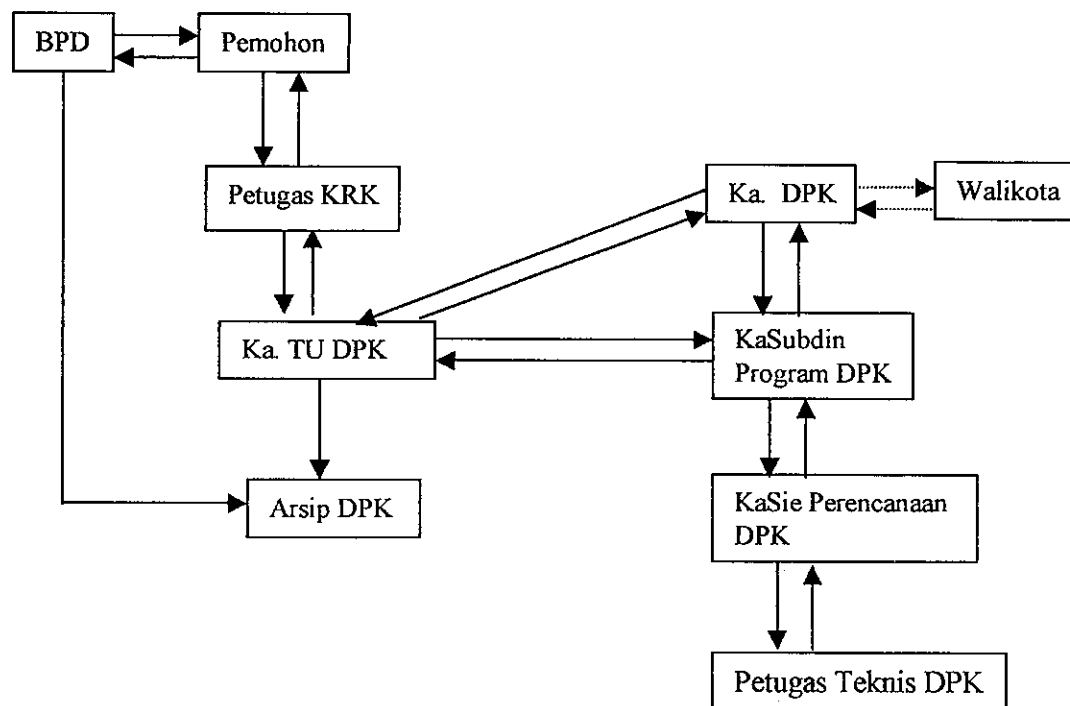
Keterangan :

—→ : Garis perintah (komunikasi satu arah)

↔ : Garis perintah dan koordinasi (komunikasi dua arah)

↔ : Garis perintah dan koordinasi apabila diperlukan

GAMBAR 2.1
MODEL 1
MEKANISME KRK PADA KPT BAGIAN PELAYANAN KRK



Keterangan :

- : Garis perintah (komunikasi satu arah)
- ↔ : Garis perintah dan koordinasi (komunikasi dua arah)
- ↔ : Garis perintah dan koordinasi apabila diperlukan

GAMBAR 2.2
MODEL 2
MEKANISME KKR PADA DINAS PERKOTAAN SUBDINAS PROGRAM

Menurut Warsito, (2001 : 184) Ada delapan sendi (manajemen) yang menjadi tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik yaitu :

1. Kesederhanaan
2. Kejelasan dan kepastian
3. Kenyamanan
4. Keterbukaan
5. Efisiensi
6. Ekonomis
7. Keadilan yang merata
8. Kepastian waktu

Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (profit). Pelayanan ini menurut KepMen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 tahun 1993 disebut dengan pelayanan umum.(Modul Pelatihan Pelayanan Prima, 2003).

Ruang lingkup pelayanan umum yang diberikan oleh aparatur pemerintah meliputi : melayani, mengayomi, dan menumbuhkan prakarsa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) No. 81 tahun 1993 adalah : segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan dalam lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pelayanan prima merupakan pelayanan yang memenuhi pelayanan standart terhadap permintaan pelanggan. Pelayanan yang memenuhi standart adalah kualitas suatu

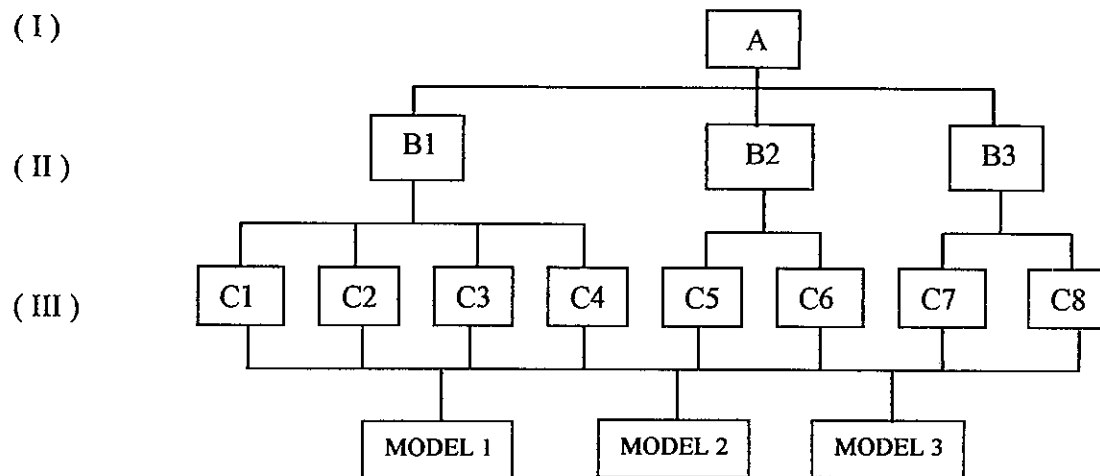
produk yang diharapkan oleh pelanggan, sehingga ada 2 hal yang berkaitan yaitu pelanggan dan kualitas. Sifat pelayanan umum yang prima adalah : sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, terjangkau. Menurut Modul Pelatihan Pelayanan Prima (2003), Pola – pola penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi :

- a. Pelayanan Fungsional
- b. Pelayanan Satu Atap
- c. Pelayanan Satu Pintu
- d. Pelayanan Secara Terpusat
- e. Pelayanan Satu Tempat

Pelayanan publik dinyatakan prima bila pelayanan tersebut memuaskan pelanggan yaitu melebihi standar yang ditetapkan atau minimal sama dengan standart, baik kepuasan pelanggan maupun standart pelayanan merupakan ukuran. Kepuasan pelanggan adalah efektivitas dari sistem organisasi yang mampu membantu pelanggan memenuhi kebutuhannya secara optimal.

Standart pelayanan adalah ukuran dasar untuk mengetahui mutu pelayanan, standart pelayanan bagi birokrasi pada umumnya ditentukan oleh undang – undang atau pendapat para ahli serta melalui riset / penelitian. Standart pelayanan yang ditetapkan dapat dilaksanakan oleh birokrasi adalah tepat waktu, tepat saji, tepat isi.

Mekanisme penerbitan Keterangan Rencana Kota yang juga merupakan kebijakan publik, maka harus memenuhi standar-standar pelayanan publik agar bisa seperti yang diharapkan yaitu pelayanan publik yang prima. Dari Model Hierarki dalam metode PHA seperti pada Gambar 1.5 maka didapat beberapa alternatif penerbitan mekanisme KRK yang memenuhi kriteria – kriteria pelayanan publik diatas, yang digambarkan pada Gambar 2.3 dibawah ini :



Keterangan : Hierarki terdiri dari 3 tingkat yaitu :

Tingkat 1 : Tujuan yang ingin dicapai (A)

Tingkat 2 : Pengelompokan elemen – elemen atas beberapa kriteria utama (B)

Tingkat 3 : Sub kriteria (C)

Sumber : Hasil Penulis untuk studi ini dari Model PHA pada Saaty, 1993

KETERANGAN :

Tingkat I = Tujuan, yaitu :

A = Mekanisme KRK

Tingkat II = Pengelompokan elemen atas beberapa kriteria , yaitu :

B1 = Persyaratan dan prosedur meliputi : C1,C2,C3,C4

B2 = Biaya meliputi : C5, C6

B3 = Waktu meliputi : C7, C8

Tingkat III = Sub Kriteria

C1 = Kesederhanaan

C2 = Keamanan

C3 = Keterbukaan

C4 = Efisiensi

C5 = Ekonomis

C6 = Keadilan yang merata

C7 = Kejelasan dan Kepastian

C8 = Kepastian waktu

GAMBAR 2.3
STRUKTUR HIERARKI ALTERNATIF MEKANISME PENERBITAN KRK

2.3.2. Retribusi Daerah

Berdasarkan pada Undang – undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1, Definisi Retribusi daerah , yang selanjutnya disebut retribusi , adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut peraturan tersebut diatas pada Pasal 18, maka :

Retribusi dibagi atas tiga golongan :

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perizinan tertentu

Selanjutnya pada pasal 24 tertulis :

- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Peraturan Daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut.

Kemudian dari peraturan tersebut diatas pada Pasal 18 ayat 3 ditulis bahwa Retribusi Jasa Umum : yaitu jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Pada ayat (3) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Sedangkan pada pasal 8 , Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Menurut Munawir (1992 : 4) maka Retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini

bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Jadi dengan perkataan lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan secara langsung dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi. Berdasarkan pada Undang – undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka Retribusi daerah , yang selanjutnya disebut retribusi , adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.4 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan. Unsur keuangan menyangkut segi – segi penerimaan, pengeluaran, dan pengurusan uang. Dalam bidang retribusi juga dilakukan pemungutan yang lebih intensif, dengan manajemen yang bisa dilakukan seperti dalam pajak daerah, dengan memperhatikan asas – asas yang berlaku dalam pemungutan retribusi daerah. (Warsito, 2001 : 135).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah pasal 2 , ayat (2) point I , salah satu jenis retribusi jasa umum adalah : Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Pada ayat (3) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan pada pasal 8 , Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan salah satu retribusi jasa umum seperti tercantum dalam PP No. 66 tahun 2001, maka kewenangan pemungutan retribusi tersebut terletak pada pemerintah kota/kabupaten, dengan berdasarkan pada peraturan daerah yang berlaku. Peta merupakan lampiran dari Keterangan Rencana Kota, sehingga apabila KRK telah diberlakukan sesuai dengan peraturan daerah, maka retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan potensi retribusi yang perlu dipungut sesuai dengan prinsip – prinsip pelayanan publik.

2.5. Peranan Pemerintah dalam Penerbitan KRK

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan publik mempunyai beberapa alasan , salah satu alasannya adalah dari segi Efektivitas, yang merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau pencapaian hasil guna yang semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut Drucker (1964), efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).

Upaya melaksanakan pemungutan terhadap sumber penerimaan retribusi daerah dipandang perlu adanya peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota untuk menggali potensi secara maksimal. Selain itu pemerintah kota juga harus mengenali dan meminimalkan kelemahan – kelemahan , memanfaatkan setiap peluang yang ada, serta mengidentifikasi dan mengatasi berbagai faktor penghambat melalui upaya pengawasan yang mantap. Fungsi utama dari pemerintah ialah mengatur , memerintah, menyediakan fasilitas serta memberi pelayanan kepada masyarakat.(Salusu, 1996).

Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karena perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Konsep pertanggungjawaban menurut Darwin dalam Widodo (2001:147) dibedakan dalam 3 macam yaitu akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*) dan responsivitas (*responsiveness*). Akuntabilitas merupakan istilah yang diterapkan untuk mengukur dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. (Hatry,1980:164). Tanggjawab merupakan konsep yang berkenaan dengan standart profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. (Darwin,1997:72). Responsivitas merupakan kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan rakyat atau cara yang efisien dalam memanager urus lokal dan pemberian pelayanan lokal. (Smith,1985:28).

Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan. Unsur keuangan menyangkut segi – segi penerimaan, pengeluaran, dan pengurusan uang. Dalam bidang retribusi juga dilakukan pemungutan yang lebih intensif, dengan manajemen yang bisa dilakukan seperti dalam pajak daerah, dengan memperhatikan asas – asas yang berlaku dalam pemungutan retribusi daerah. (Warsito, 2001 : 135).

Menurut Thomas R. Dye dalam Dwidjowijono (2003) terdapat beberapa model kebijakan publik yaitu : a. Model Kelembagaan, b. Model Proses, c. Model Kelompok, d. Model Elit, e. Model Rasional, f. Model Inkremental, g. Model Teori Permainan, h. Model Pilihan Publik, i. Model Sistem, j. Model Pengamatan Terpadu, k. Model Demokratis, l. Model Strategis. Model demokratis merupakan model yang paling efektif dalam implementasinya karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam

mencapai keberhasilan kebijakan, karena setiap pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan.

Pemerintah daerah juga harus memperhatikan beberapa asas untuk dapat mengenakan pajak dan retribusi bagi masyarakat diantaranya memenuhi aspek legal, aspek non distorsi, aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Upaya pemungutan retribusi daerah, khususnya retribusi penggantian biaya cetak peta diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung dalam bentuk kontribusi PAD yang akan menjadi faktor pendorong peningkatan kemandirian penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai gambaran dari usaha pemerintah Kota Semarang yang telah menerapkan retribusi untuk penggantian biaya cetak peta pada advise planning , didapat penerimaan daerah sebesar Rp. 1.758.676.570,- pada tahun 2001 dan sebesar Rp. 2.047.966.800,- pada tahun 2002. Sedangkan untuk Kota Surakarta yang telah menerapkan retribusi penggantian biaya cetak peta didapat penerimaan retribusi selama 2001 sebesar Rp. 234.327.300,- , dan tahun 2002 sebesar Rp.279.409.450,-.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sebenarnya pemerintah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pelayanan publik berupa penerbitan KRK yang diperkuat dengan peraturan pendukungnya serta dengan melihat daerah lain yang sudah menerapkannya sebagai salah satu cara pengendalian tata ruang kota, yang selanjutnya bisa dipungut retribusi penggantian biaya cetak peta sebagai lampiran KRK sesuai prinsip – prinsip retribusi jasa umum seperti pada PP No. 66 tahun 2001.

2.6. Kriteria dan Prinsip Penetapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

2.6.1. Dasar Pemungutan Retribusi

Pelaksanaan ekstensifikasi terhadap sumber retribusi penggantian biaya cetak peta yang merupakan salah satu retribusi jasa umum , harus didasarkan pada kriteria

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 UU No. 34 / 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 / 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, pada pasal 18 terdapat kriteria sebagai berikut :

Retribusi Jasa Umum :

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu,
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial , dan
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan / atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Menurut UU No. 34 / 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 / 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 66 / 2001 tentang Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa prinsip pemungutan retribusi daerah berbeda – beda sesuai dengan golongan retribusi daerah tersebut . Pasal 21 UU 34 / 2000, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan adalah : untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

masyarakat dan aspek keadilan. Karena Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta bisa dikategorikan retribusi jasa umum, maka prinsip – prinsipnya juga sesuai dengan prinsip – prinsip diatas.

2.6.2. Kemampuan dan Kemauan Membayar Retribusi

Pada prinsipnya setiap orang harus membayar pajak (retribusi) sesuai dengan kemampuan dan kemauannya untuk membayar. Terdapat 3 ukuran yang biasa dipakai untuk mengukur kemakmuran seseorang atau kemampuan seseorang membayar yaitu : a. pendapatan, b. pengeluaran konsumsi , c. kekayaan. Tetapi dari ketiga ukuran tersebut pada umumnya ukuran yang dipakai adalah pendapatan. Sehingga apabila ada 2 orang yang mempunyai pendapatan yang sama akan membayar dengan jumlah yang sama. (Mangkoesoebroto, 2001).

Untuk keadilan sistem pajak (retribusi) terdapat 2 prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat dan prinsip kemampuan membayar . Prinsip manfaat, pada prinsipnya setiap orang harus membayar pajak (retribusi) sebesar manfaat yang dia terima dari aktivitas pemerintah. Sehingga prinsip manfaat sesuai dengan keseimbangan anggaran yang berdasarkan model pertukaran suka rela. Adanya model suka rela sehingga bisa diasumsikan sebagai kemauan membayar pada setiap orang. (Mangkoesoebroto,2001)

2.6.3. Prinsip Keadilan dalam Pemungutan Retribusi

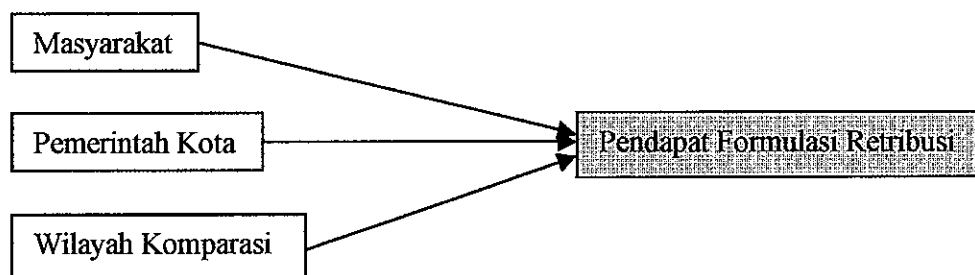
Suatu sistem pajak (retribusi) yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria , diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Distribusi dari beban pajak (retribusi) haruslah adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan bagiannya yang wajar.

- b. Sistem pajak (retribusi) harus dimengerti oleh wajib pajak
- c. Administrasi pajak (retribusi) dan biaya pelaksanaannya haruslah sesedikit mungkin
- d. Kepastian
- e. Dapat dilaksanakan
- f. Dapat diterima

Seperti diketahui untuk permohonan Keterangan Rencana Kota maka data yang diperlukan adalah letak tanah beserta luasnya. Sehingga untuk perhitungan retribusi penggantian biaya cetak peta yang merupakan lampiran dari KRK adalah tergantung dari letak tanah tersebut dan luasnya. Berdasarkan prinsip – prinsip keadilan dalam pemungutan pajak (retribusi) tersebut diatas , maka retribusi penggantian biaya cetak peta tergantung dari nilai ekonomis, zoning, klas jalan pada tanah yang diajukan KRKnya.

Penetapan formulasi retribusi penggantian biaya cetak peta yang merupakan kebijakan publik dengan menggunakan model demokratis, yaitu pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari masyarakat / stakeholder, karena model ini cocok untuk negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga pendapat formulasi retribusi berdasarkan dari masyarakat serta pemerintah dan juga melihat wilayah komparasi yang telah melaksanakan retribusi ini.



2.7. Keterkaitan Antara KRK Dengan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Keterangan Rencana Kota (KRK) merupakan salah satu pengendali rencana tata ruang kota. Isi dari KRK tersebut adalah rencana tata ruang kota disuatu lokasi dengan dilampiri peta pada lokasi tersebut. KRK bisa dipakai sebagai acuan untuk perijinan yang lainnya yaitu IMB, Ijin Sewa Tanah Pemda, Ijin Gangguan dan Ijin Lokasi, sehingga KRK sangat penting peranannya. Peta merupakan lampiran dari KRK, sehingga apabila penerbitan KRK sudah dilaksanakan dengan mekanisme tertentu , dapat sekaligus dipungut retribusi untuk penggantian biaya cetak petanya.

Pelaksanaan penerbitan KRK yang berdasarkan peraturan daerah dapat sekaligus ditetapkan dengan retribusi penggantian biaya cetak peta yang merupakan salah satu retribusi jasa umum sesuai PP No. 66 tahun 2001. Mekanisme penerbitan KRK termasuk retribusinya merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagai implementasi dari Undang – undang No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang serta PP No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Menurut Salusu (1996), Pengambilan keputusan penerbitan KRK dikaitkan dengan retribusi penggantian biaya cetak peta sesuai aliran hubungan kemanusiaan yaitu organisasi dapat berbuat lebih baik apabila lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi , dalam hal ini pemerintah memberikan perhatian pada masyarakat, dengan peningkatan pelayanan KRK beserta lampirannya.

Penerbitan KRK dikaitkan dengan retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan salah satu strategi pemerintah dalam implementasi UU NO. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang serta PP No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah. Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai

sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. (Salusu, 1996).

2.8. Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Berdasarkan Undang - Undang No. 22 / 1999 , UU No. 25 / 1999 serta UU No. 34 / 2000 maka peranan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya semakin meningkat. Disamping ketiga peraturan tersebut diatas masih terdapat juga Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang terdapat pada pasal 2 yaitu salah satu jenis dari retribusi jasa umum adalah retribusi penggantian biaya cetak peta. Dengan peraturan tersebut diharapkan daerah otonom bisa mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemandiriannya dengan menerapkan prinsip – prinsip *good governance*.

Pemerintah mempunyai tugas dalam perencanaan ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian ruang. Salah satu dari bentuk pengendalian tata ruang adalah dengan keterangan rencana kota, sehingga diharapkan isi dari KRK merupakan rencana tata ruang kota sekaligus advise planing yang bisa dipakai pedoman bagi pemohon. KRK merupakan salah satu persyaratan untu proses perijinan yang lainnya tetapi posisinya sampai saat ini belum ada perdanya sehingga tidak bisa dipaksakan dipungut retrbusinya.

Salah satu tugas pemerintah adalah dalam pelayanan publik, termasuk didalamnya memberikan advise planning dalam bentuk KRK, sehingga dalam pelayanan tersebut harus memenuhi persyaratan yang menjadi tuntutan masyarakat sebanyak 8 hal yaitu :

- kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, kenyamanan, keterbukaan, effisiensi, ekonomis, keadilan yang merata, kepastian waktu.

Terdapat beberapa bentuk penyelenggaraan pelayanan umum, tetapi untuk pelayanan KRK, hanya ada 3 kemungkinan bentuk pelayanan yaitu :

- a. Pelayanan satu atap
- b. Pelayanan satu pintu
- c. Pelayanan secara terpusat

Berdasarkan kriteria pelayanan publik yang berjumlah 8 serta adanya beberapa alternatif mekanisme penerbitan KRK, maka dengan analisa PHA akan dipilih satu model mekanisme KRK. Dengan adanya kepastian hukum, maka mekanisme penerbitan KRK bisa digunakan sebagai acuan perijinan yang lainnya.

Peta yang merupakan lampiran dari KRK, berdasarkan kewenangan daerah otonom maka bisa diberlakukan retribusi penggantian biaya cetak peta yang merupakan salah satu dari retribusi jasa umum sesuai PP No. 66 tahun 2001. Pasal 21 UU 34 / 2000, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif adalah : untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Karena Peta merupakan lampiran dari KRK, maka retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan potensi yang bisa direncanakan pemungutannya apabila sudah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku sebagai dasar hukumnya. Berdasarkan prinsip – prinsip penetapan tarif maka untuk kriteria formulasi dari retribusi pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta tergantung nilai ekonomis tanah, fungsi pada tata ruang kota / zoning, serta letak / lokasi dari tanah tersebut. Apabila dalam bentuk rumus maka :

$$\text{Retribusi tiap m}^2 = f(\text{nilai ekonomis}) + f(\text{zoning}) + f(\text{klas jalan})$$

Keterangan dari rumus diatas :

- Nilai ekonomis , tergantung pada nilai NJOP pada tahun terakhir yang terdapat dalam data PBB.
- Zoning, tergantung pada zoning perumahan, fasilitas sosial / rekreasi / kesehatan / pendidikan, perkantoran, jasa campuran, perdagangan , pergudangan , industri, yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota yang sudah ada Perdanya.
- Klas jalan, tergantung pada klas I, II, III, IV, yang sudah ada Perdanya.

Formulasi yang jelas bisa direncanakan / dihitung dari hasil data hasil kuesioner dan mengacu pada daerah komparasi yang telah terdapat peraturan daerah tentang retribusi penggantian biaya cetak peta. Penentuan formulasi pemungutan retribusi termasuk salah satu kebijakan publik yang merupakan sebuah hukum berfungsi untuk memastikan setiap warga untuk memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian , makna keadilan tidak sekedar distributif atau sama – rata – sama – rasa , melainkan juga *komutatif* atau yang bekerja akan memetik hasil, dan yang bekerja lebih banyak berhak atas hasil yang lebih banyak.

BAB III

KAJIAN UMUM DAN FORMULASI SERTA MEKANISME PENERBITAN KRK SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA DI WILAYAH STUDI

3.1. Kajian Umum Kota Tegal

3.1.1. Kajian Keruangan Kota Tegal

Kota Tegal merupakan sebuah kota yang terletak di persimpangan jalur pantura antara Jakarta / Cirebon – Semarang / Surabaya dengan Jakarta / Cirebon – Purwokerto / Yogyakarta serta berjarak 165 Km dari Kota Semarang kearah barat. Berdasarkan sejarah, Kota Tegal yang dikenal sebagai “Jepangnya Indonesia” ditetapkan sebagai sebuah kota dengan tanggal kelahiran 12 April 1580. Keadaan relief daerahnya termasuk dataran rendah karena tinggi dari permukaan air laut ± 3 m serta letak geografis antara $109^{\circ}08'BT$ - $109^{\circ}10'BT$ dan $06^{\circ}50'LS$ - $06^{\circ}53'LS$. Struktur tanah sebagian besar tanah pasir dan tanah liat, dengan temperatur rata – rata $27,1^{\circ}C$ serta curah hujan 2.135,3 mm. Kondisi geografis yang terletak di tepi laut Jawa dengan luas daerah sekitar $38,50 \text{ Km}^2$ merupakan potensi tersendiri bagi daerah tersebut untuk berkembang secara cepat sehingga tidak salah apabila ada istilah Tegal Kota Metropolitan.

Visi Kota Tegal yaitu : Kota Tegal sebagai pusat industri, perdagangan dan jasa dan maritim yang mempunyai keunggulan daya saing dan dapat menciptakan iklim kondusif bagi setiap kegiatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Berdasarkan SWP di Propinsi Jawa Tengah maka Kota Tegal merupakan pusat pertumbuhan dari SWP tersebut yang meliputi wilayah Kota Tegal , Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Pemalang. Kota Tegal terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kec. Tegal Timur(6,36

Km²), Kec. Tegal Barat (13,95 Km²), Kec. Tegal Selatan (6,43 Km²), Kec. Margadana (11,76 Km²). (Kota Tegal Dalam Angka, 2002).

Kecamatan Tegal Timur dan Kec. Tegal Barat termasuk wilayah kota lama , sehingga lebih padat dibanding dengan Kec. Margadana dan Kec. Tegal Selatan yang termasuk wilayah pengembangan. Kota Tegal merupakan kota yang bercirikan perdagangan, jasa , industri, maritim , disebut juga Tegal Kota Metropolis, dari Rencana Tata Ruang Kota maka terdapat beberapa zoning perdagangan / jasa yaitu :

- a. Zoning perdagangan : sepanjang Jl. Veteran – Jl. Sultan Agung, Jl. Setiabudi – Jl. S. Parman , Jl. Sudirman – Jl. Sugiono, Jl. Blanak – Jl. Brawijaya, Jl. KS. Tubun, Jl. Martoloyo,
- b. Zoning Jasa : sepanjang Jl. Werkudoro – Jl. KS. Tubun, Jl. Gajah Mada, Jl. Kartini, Jl. Pemuda, Jl. P. Tendean, Jl. Sudibyo, Jl. Ciptomangunkusumo
- c. Zoning Industri : sepanjang Jl. Mataram, Jl. Poso(utara), Jl. Cempaka
- d. Zoning Maritim dan Rekreasi : sepanjang di pantai utara, sebelah utara Jl. Martoloyo – Jl. Brawijaya .
- e. Untuk zoning lainnya bisa dilihat pada Peta Rencana Tata Guna Lahan

Rencana Tata Guna Lahan Kota Tegal seperti terlihat pada Gambar 3.1 dibawah ini :



MAGISTER TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2004

FORMULASI DAN MEKANISME PENERBITAN
KETERANGAN RENCANA KOTA SEBAGAI DASAR
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMA
CETAK PETA DI KOTA TEGAL

RENCANA TATA GUNA LAHAN KOTA TEGAL

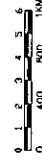
PETA

KETERANGAN

- Kawasan Wisata Terbuka
- Pengolahan Ikan
- Kawasan Industri
- Lahan Cudang 20 Ha
- Sawah
- TPA
- Terminal Bus
- Peternakan
- Lingkungan Industri Kecil
- Sub Pusat Kota
- Kawasan Perdagangan
- Kawasan Campuran
- Kawasan Ase Campuran
- Perumahan Pelembutan
- Terminal Ped Kemas
- Kawasan Pelabuhan
- Kawasan Wisata PAI
- Kawasan Pendidikan
- Perkantoran Pemerintahan
- Stadion KA
- Terminal Kargo Barang
- Fasilitas Pendidikan
- Fasilitas Kesehatan (RS)
- Sub Terminal
- Pasir

UTARA

SKALA

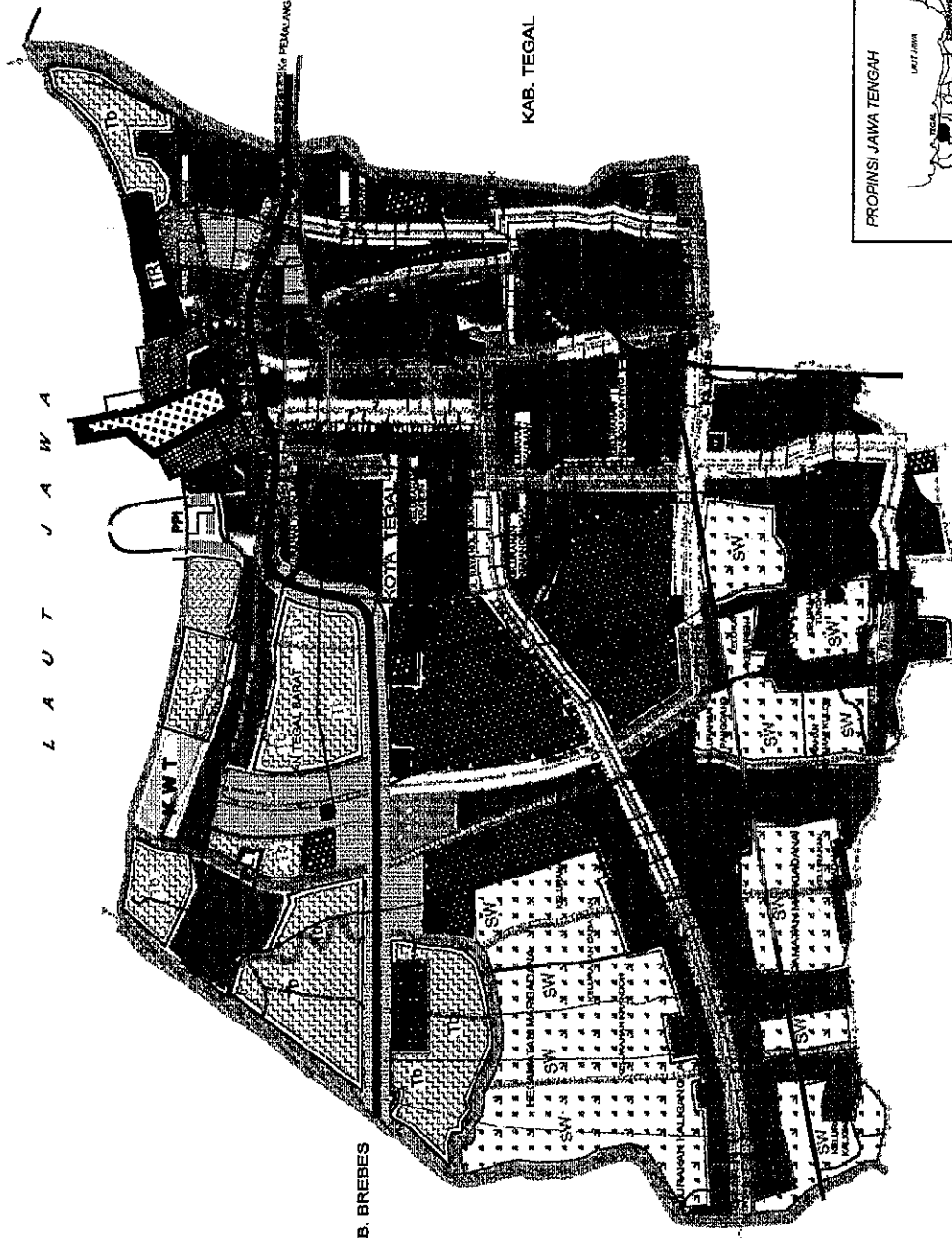


GAMBAR HALAMAN

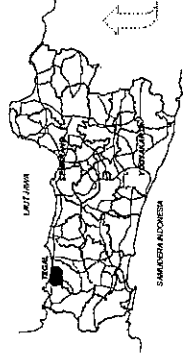
G.3.1 --- 58

SUMBER

BAPPEDA KOTA TEGAL



PROVINSI JAWA TENGAH



KAB. TEGAL

KAB. BREBES

KAB. TEGAL

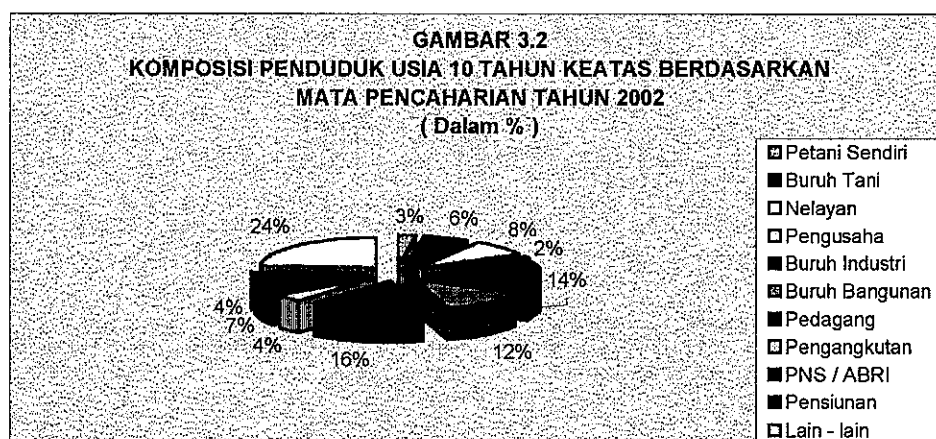
3.1.2. Keadaan Sosial Ekonomi Kota Tegal

Berdasarkan data dari buku Kota Tegal dalam angka tahun 2002 , maka jumlah penduduk tahun 2001 sejumlah 240.762 jiwa, dengan jumlah terbanyak di Kec. Tegal Timur : 69.423 jiwa serta paling sedikit di Kec. Margadana sebanyak 50.436 jiwa. Kepadatan penduduk : 6.254 jiwa / Km² serta laju pertumbuhan penduduk : 1,90 %, Komposisi penduduk usia diatas 10 tahun berdasarkan mata pencaharian seperti dalam Tabel . III.1 dan Gambar 3.2.

TABEL III.1
KOMPOSISI PENDUDUK USIA 10 TAHUN KEATAS
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2002

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (Jiwa)	PROSENTASE (%)
1	Petani Sendiri	4.089	2,58
2	Buruh Tani	6.317	6,33
3	Nelayan	7.326	8,40
4	Pengusaha	1.940	1,56
5	Buruh Industri	17.282	14,21
6	Buruh Bangunan	16.753	12,29
7	Pedagang	18.326	16,07
8	Pengangkutan	4.744	3,96
9	PNS / ABRI	7.915	7,16
10	Pensiunan	3.174	3,52
11	Lain – lain	29.015	23,92
	J U M L A H	242.067	100

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka tahun 2002



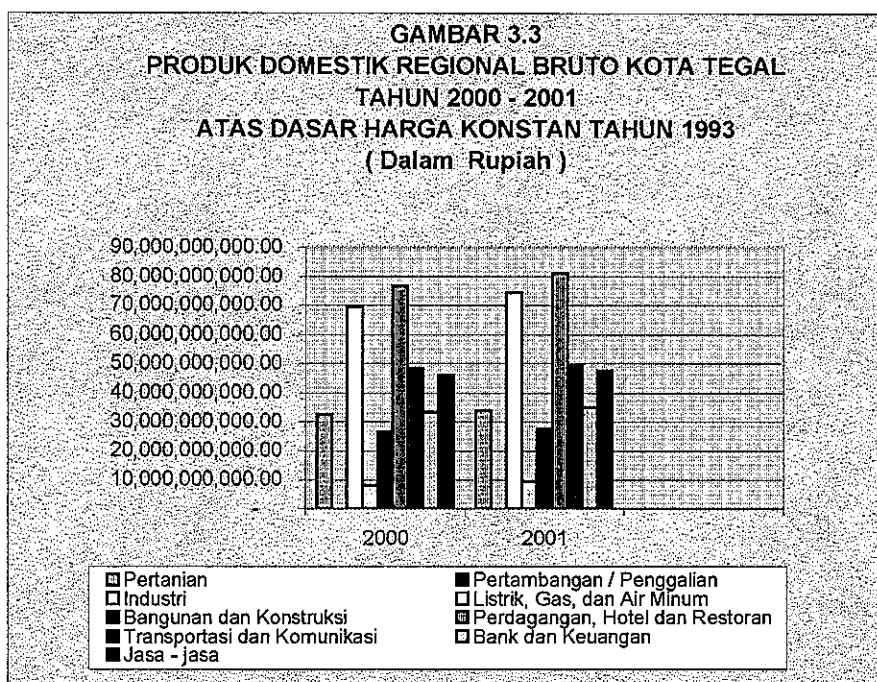
Sumber : Kota Tegal Dalam Angka tahun 2002

Dari sumber data tersebut diatas maka pendapatan (income) perkapita tahun 2001 atas dasar harga berlaku : Rp. 3.506.939,77 dan pendapatan(income) per kapita tahun 2001 atas dasar harga konstan tahun 1993: Rp. 1.389.217,44. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tegal sangat pesat , pada tahun 2000 yaitu : 5,11 % dan tahun 2001 sebesar 5,22 %, dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional : 3,5 %, serta laju pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah : 3,33 %. Perkembangan sektor – sektor perekonomian (PDRB) berdasarkan harga berlaku pada tahun 2001 sebesar Rp. 948.945.790.620,00 sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 1993 sebesar Rp. 358.969.475.600,00 dengan rincian seperti terlihat pada Tabel III.2 dan Gambar 3.3.

TABEL III.2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA TEGAL 2000 - 2001
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1993 (Dalam Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2000		2001	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Pertanian	32.614.106.800	9,55	33.968.911.270	9,46
2	Pertambangan / Penggalian	-	-	-	-
3	Industri	69.516.961.500	20,36	74.409.256.260	20,73
4	Listrik, Gas dan Air Minum	8.121.988.400	2,38	9.367.619.630	2,61
5	Bangunan dan Konstruksi	26.514.823.900	7,76	27.801.955.600	7,74
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	76.548.327.500	22,41	81.193.297.100	22,62
7	Transportasi dan Komunikasi	48.547.428.300	14,22	49.541.783.420	13,80
8	Bank dan Keuangan	33.386.758.900	9,78	35.097.723.770	9,78
9	Jasa – Jasa	46.258.163.500	13,54	47.588.928.550	13,26
	JUMLAH PDRB (Rp)	341.508.558.800	100	358.969.475.600	100
	PENDUDUK TENGAH TH (Jiwa)	236.268		240.762	
	INCOME PER KAPITA (Rp)	1.524.655,55		1.389.217,44	

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2002



Sumber : Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2002

3.1.3. Keuangan Pemerintah Kota Tegal

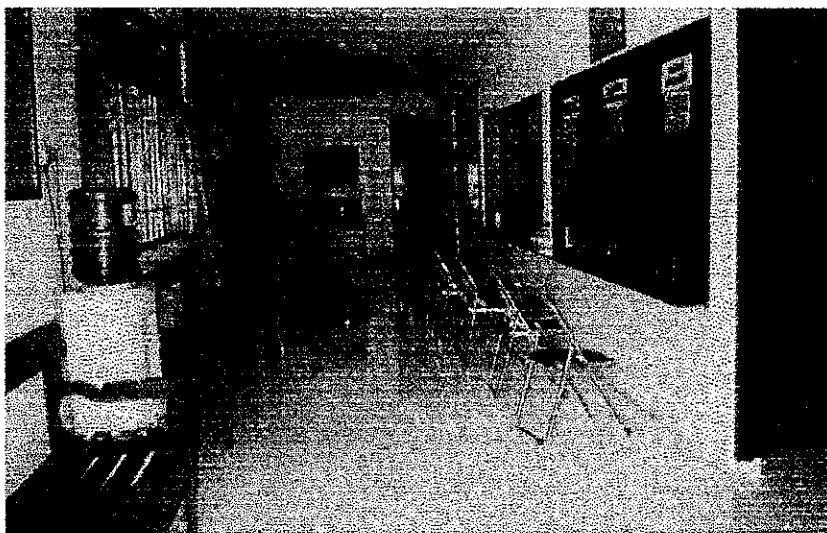
Kota Tegal masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat / Propinsi (DAU) dengan jumlah yang relatif besar sekitar 55,75 %, sehingga pemerintah kota masih ada ketergantungan terhadap pusat / propinsi. Berdasarkan buku Kota Tegal Dalam Angka tahun 2001 , maka penerimaan daerah otonom Kota Tegal seperti terlihat pada Tabel III.3 dibawah ini.

TABEL III.3
PENERIMAAN DAERAH OTONOM KOTA TEGAL TAHUN 2001
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	JENIS PENERIMAAN	1999 / 2000	2000	2001
1	APBD (Total)	32.649.357	35.142.438	235.520.994
2	PADS	8.167.305	6.765.212	18.695.289
3	Pajak daerah th. 2001	-	-	2.778.699
4	Retribusi daerah th. 2001	-	-	9.499.788

Sumber dari Kota Tegal dalam Angka Tahun 2002

Kota Tegal belum ada penerimaan dari Retribusi Keterangan Rencana Kota, padahal jumlah KRK selama tahun 2003 sebanyak 178 buah , sedangkan mulai dari tahun 2000 – Oktober 2003 sebanyak 725 buah , hal ini disebabkan karena belum adanya perda tentang retribusi penggantian biaya cetak peta. KRK diperlukan sebagai salah satu rekomendasi untuk permohonan Ijin sewa tanah pemda, Ijin gangguan, Ijin lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan. Salah satu ruangan pelayanan publik di KPT Kota Tegal yang dilengkapi dengan loket dan ruang tunggu untuk memudahkan pelayanan perijinan pada masyarakat seperti terlihat pada Gambar 3.4 dibawah ini.



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2004

GAMBAR 3.4
RUANGAN PELAYANAN PERIJINAN DI KPT KOTA TEGAL

3.2. Kota Semarang dan Kota Surakarta Sebagai Wilayah Komparatif

3.2.1. Perbandingan Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Tegal

Kota Semarang dan Kota Surakarta merupakan 2 buah kota di Propinsi Jawa Tengah yang pada saat ini telah melaksanakan retribusi penggantian biaya cetak peta dengan berdasarkan Peraturan Daerah Setempat. Disamping itu terdapat beberapa alasan yang menjadikan dasar sehingga ke dua kota tersebut dijadikan wilayah komparasi dalam penelitian ini. Salah satunya karena kedua kota tersebut merupakan wilayah perkotaan

sehingga diperkirakan permasalahan perkotaan hampir sama dengan kota Tegal. Dengan mengambil wilayah komparasi Kota Semarang dan Kota Surakarta diharapkan bisa mewakili kota di Jawa Tengah untuk bisa dijadikan acuan bagi Kota Tegal yang belum ada retribusi penggantian biaya cetak peta. Berdasarkan Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Tegal dalam angka tahun 2002 , didapat data perbandingan seperti terlihat dalam Tabel III.4 sebagai berikut :

TABEL III.4
PERBANDINGAN KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, DAN KOTA TEGAL TAHUN 2001

NO	PEMBANDING	KOTA	KOTA SEMARANG	KOTA SURAKARTA	KOTA TEGAL
1	Luas Wilayah th. 2002 (Km2)		373,70	44,04	35,80
2	Jumlah Penduduk th. 2002 (Jiwa)		1.350.005	553.580	242.067
3	Kepadatan Penduduk th. 2002 (Jiwa / Km2)		3.612	71.318	6.254
4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku th. 2001 (Rp)		15.097.150.928.000	2.965.128.910.000	948.945.790.620
5	PDRB At.Das.Har.Konstan th.1993 pada th. 2001 (Rp)		5.405.239.394.000	1.302.715.920.000	358.969.475.600
6	Realisasi Penerimaan Daerah th.2001 (Rp)		448.627.502.000	186.006.068.071	235.520.994.000
7	Pendapatan Perkapita At.Das. Harga Berlaku th. 2001 (Rp)		11.419.483	5.356.000	3.506.939
8	Pendapatan Perkapita At.Das. Hrg.Konstan th.1993 di th.2001 (Rp)		4.088.423	2.353.000	1.389.217
9	Bentuk Daerah Otonom		Kota	Kota	Kota
10	Wilayah Propinsi		Jawa Tengah	Jawa Tengah	Jawa Tengah
11	Letak Geografis		Tepi Laut Jawa	Tengah Pulau	Tepi Laut Jawa
12	Perda Tentang Retribusi Cetak Peta		NO. 9 Tahun 1999	NO. 14 Tahun 1998	--
13	SK Walikota		NO.974 / 150 / 1999	No. 11 tahun 2000	--
14	Penerimaan Retribusi Penggantian Cetak Peta tahun 2001 (Rp)		1.758.676.570	234.327.300	--
15	Penerimaan Retribusi Penggantian Cetak Peta tahun 2002 (Rp)		2.047.966.800	279.409.450	--
16	Jumlah pemohon AP / KRK tahun 2002		1.357	229	--
17	Instansi Pengelola Sesuai Perda		DTK	DTK	DTK
18	Syarat Pengajuan AP / KRK		KTP, PBB, Surat Bukti Tanah	KTP, Surat bukti tanah	KTP, Surat bukti tanah
19	Manfaat KRK / AP		IMB, Ijin Gangguan, Hak Atas tanah	IMB dan Ijin Usaha	IMB, Ijin gangguan, Ijin sewa tanah, Ijin lokasi
20	Masa Berlaku KRK / AP		5 Tahun	Selama tak ada perubahan pada RTRK	Selam tak ada perubahan pada RTRK
21	Tarif Minimal Per m2		Rp. 250,-	0,5 x NJOP	--
22	Tarif Maximal Per m2		Rp. 1700,-	0,75 x NJOP	--
23	Perhitungan Tarif Berdasarkan		Zoning dan luas	Zoning, NJOP, luas	--
24	Retribusi Didasarkan		Jumlah Peta	Jumlah peta dan luas	--

Sumber : Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2002

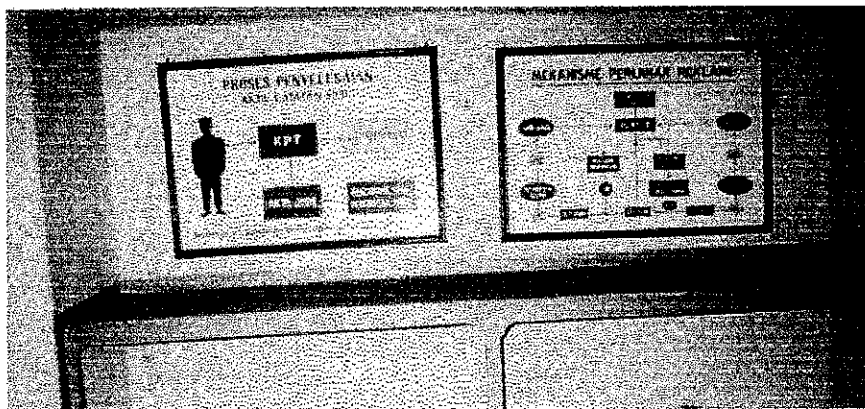
Dengan data tersebut diatas, maka bisa dianggap Kota Semarang dan Kota Surakarta dapat mewakili kota di Jawa Tengah yang bisa dijadikan wilayah komparasi bagi Kota Tegal untuk pelaksanaan retribusi penggantian biaya cetak peta. Disamping itu juga kedua kota tersebut merupakan daerah otonom yang berbentuk kota sehingga diharapkan permasalahan – permasalahan perkotaan yang terjadi disana hampir sama yang terjadi di Kota Tegal terutama dalam hal pengendalian rencana tata ruang kota dan upaya peningkatan pendapatan daerah.

Beberapa Bagian di UPT Kota Surakarta yaitu Bagian Informasi dan Bagan Alur Proses Perijinan untuk pelayanan pada masyarakat, seperti Gambar 3.5 dan Gambar 3.6 dibawah .



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2004

GAMBAR 3.5
BAGIAN INFORMASI PADA UPT KOTA SURAKARTA



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2004

GAMBAR 3.6
BAGAN ALUR PROSES PERIJINAN PADA UPT KOTA SURAKARTA

3.2.2. Formulasi dan Mekanisme Penerbitan Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Semarang dan Kota Surakarta

a. Kota Semarang

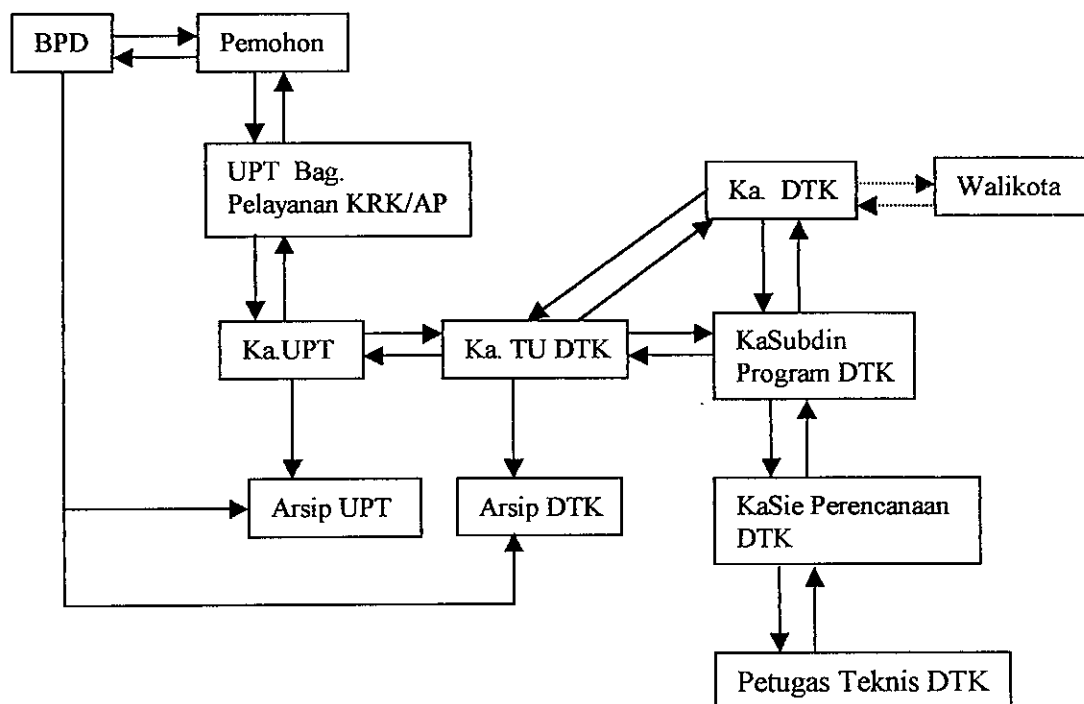
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No 14 tahun 1998 maka Formulasi retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Semarang sebagai salah satu wilayah komparasi seperti terlihat pada Tabel III.5 dibawah ini :

TABEL III.5
TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA KOTA SEMARANG
(per m²)

PERUNTUKAN LUAS	KOMERSIAL	NON KOMERSIAL
≤ 200 M ²	Rp. 450,00	Rp. 250,00
> 200 s/d 500 m ²	Rp. 650,00	Rp. 400,00
> 500 m ²	Rp. 1.700,00	Rp. 1.000,00

Sumber : Perda Kota Semarang No. 14 / 1998

Mekanisme penerbitan Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) di Kota Semarang adalah seperti terlihat pada Gambar 3.7 dibawah ini.



Keterangan :

- : Garis perintah / komando
- ↔ : Garis perintah dan koordinasi
- ↔... : Garis perintah dan koordinasi apabila diperlukan

GAMBAR 3.7
MEKANISME PENERBITAN KETERANGAN RENCANA KOTA (ADVICE PLANNING) DI KOTA SEMARANG

b. Kota Surakarta

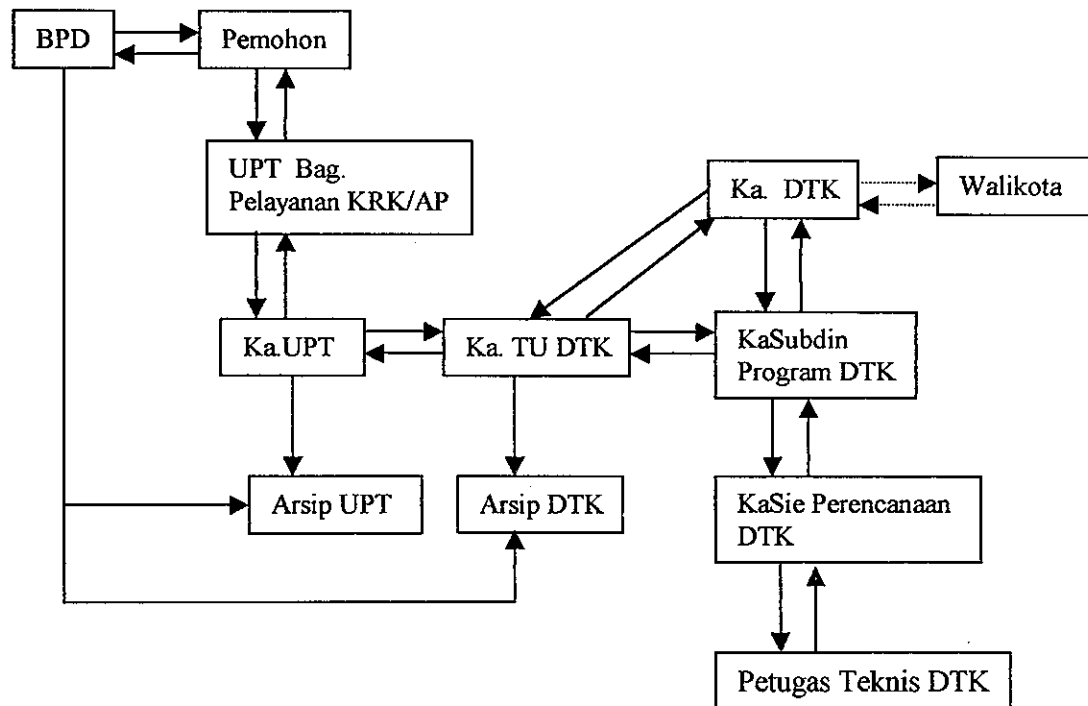
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta No 9 tahun 1999 maka Formulasi retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Surakarta sebagai salah satu wilayah komparasi seperti terlihat pada Tabel III.6 dibawah ini :

TABEL III.6
TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA KOTA SURAKARTA
(per m²)

PERUNTUKAN KOMERSIAL	PERUNTUKAN NON KOMERSIAL
0,75 % x NJOP	0,50 % x NJOP

Sumber : Perda Kota Surakarta No. 9 / 1999

Mekanisme penerbitan Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) di Kota Surakarta adalah seperti terlihat pada Gambar 3.8 dibawah ini.



Keterangan :

- : Garis perintah / komando
- ↔ : Garis perintah dan koordinasi
- ↔ : Garis perintah dan koordinasi apabila diperlukan

GAMBAR 3.8
MEKANISME PENERBITAN KETERANGAN RENCANA KOTA (ADVICE PLANNING) DI KOTA SURAKARTA

3.3. Gambaran dan Kajian Umum Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal

3.3.1. Gambaran dan Kajian Umum Formulasi Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal

Penerbitan KRK di Kota Tegal saat ini sudah berjalan melalui KPT yang kemudian diproses oleh instansi pengelola yaitu Dinas Perkotaan, tetapi hal tersebut belum ada perda yang mengatur prosedur tetapnya (protap) serta retribusinya. Pemohon KRK dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat, karena sekarang KRK sudah menjadi salah satu acuan untuk pemberian perijinan yang lainnya yaitu ijin gangguan, ijin sewa tanah pemda, ijin lokasi dan ijin mendirikan bangunan.

Jumlah KRK yang pernah diterbitkan sebanyak 178 buah pada tahun 2003 merupakan potensi awal yang bisa ditingkatkan lagi apabila didukung dengan peraturan dan pelayanan yang prima. Untuk jumlah keseluruhan KRK dari tahun 2000 – 2003 sebanyak 725 buah, yang meliputi pemohon dari seluruh kecamatan yang ada. KRK belum ada peraturan yang mengatur retribusinya sehingga belum ada penerimaan dari retribusi penggantian biaya cetak peta seperti tercantum dalam PP No. 66 tahun 2001. Dengan adanya formulasi retribusi KRK yang merupakan penggantian biaya cetak peta diharapkan bisa dipakai sebagai dasar untuk pemungutan retribusi sebagai upaya peningkatan PAD di Kota Tegal

Berdasarkan sumber Kota Tegal dalam Angka tahun 2002, maka didapat data pendapatan (income) perkapita tahun 2001 atas dasar harga berlaku : Rp. 3.506.939,77 dan pendapatan(income) per kapita tahun 2001 atas dasar harga konstan tahun 1993: Rp. 1.389.217,44, serta laju pertumbuhan ekonomi 5,22 % pada tahun 2001. Dari data diatas, sudah saatnya masyarakat ikut berperan serta dalam pengendalian rencana tata ruang kota

serta usaha – usaha peningkatan PAD dengan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Penerimaan Retribusi bisa dilihat pada Tabel III.7 sebagai berikut ini :

TABEL III.7
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH OTONOM KOTA TEGAL TAHUN 2001
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	JENIS PENERIMAAN	2000	2001
1	Retribusi daerah	-	9.499.788
2	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	-	104.561
3	Retribusi IMB	-	163.245
4	Retribusi Ijin Gangguan	-	80.695
5	Retribusi dari KRK	-	-

Sumber dari Kota Tegal dalam Angka Tahun 2002

KRK yang telah terbit untuk tanah seluas 519.039 m², sedangkan luas tanah di Kota Tegal yang bisa diajukan untuk KRK adalah 34.423.300 m², sehingga yang belum bisa diajukan KRK seluas 33.904.261 m². Peta Potensi KRK yang telah terbit terdapat pada Gambar 3.9 dibawah ini :



MAGISTER TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2004

FORMULAS DAN MEKANISME PENERBITAN
KETERANGAN RENCANA KOTA SEBAGAI DASAR
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA
CETAK PETA DI KOTA TEGAL

PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA YANG TELAH TERBIT

KETERANGAN

	Sungai
	Batas Kota Tegal
	Batas Kecamatan
	Batas Desa
	Rel KA
	Jalan Arteri Primer
	Jalan Arteri Sekunder
	Jalan Kolektor
	Primer
	Jalan Kolektor Sekunder
	Jalan Lokal
	Batas Kec. Tegal Barat
	Batas Kec. Margadawa
	Batas Kec. Tegal Selatan
	Batas Kec. Tegal Timur
	a = Kecamatan
	b = Kelurahan
	c = Luas tanah (m²)

UTARA

SKALA



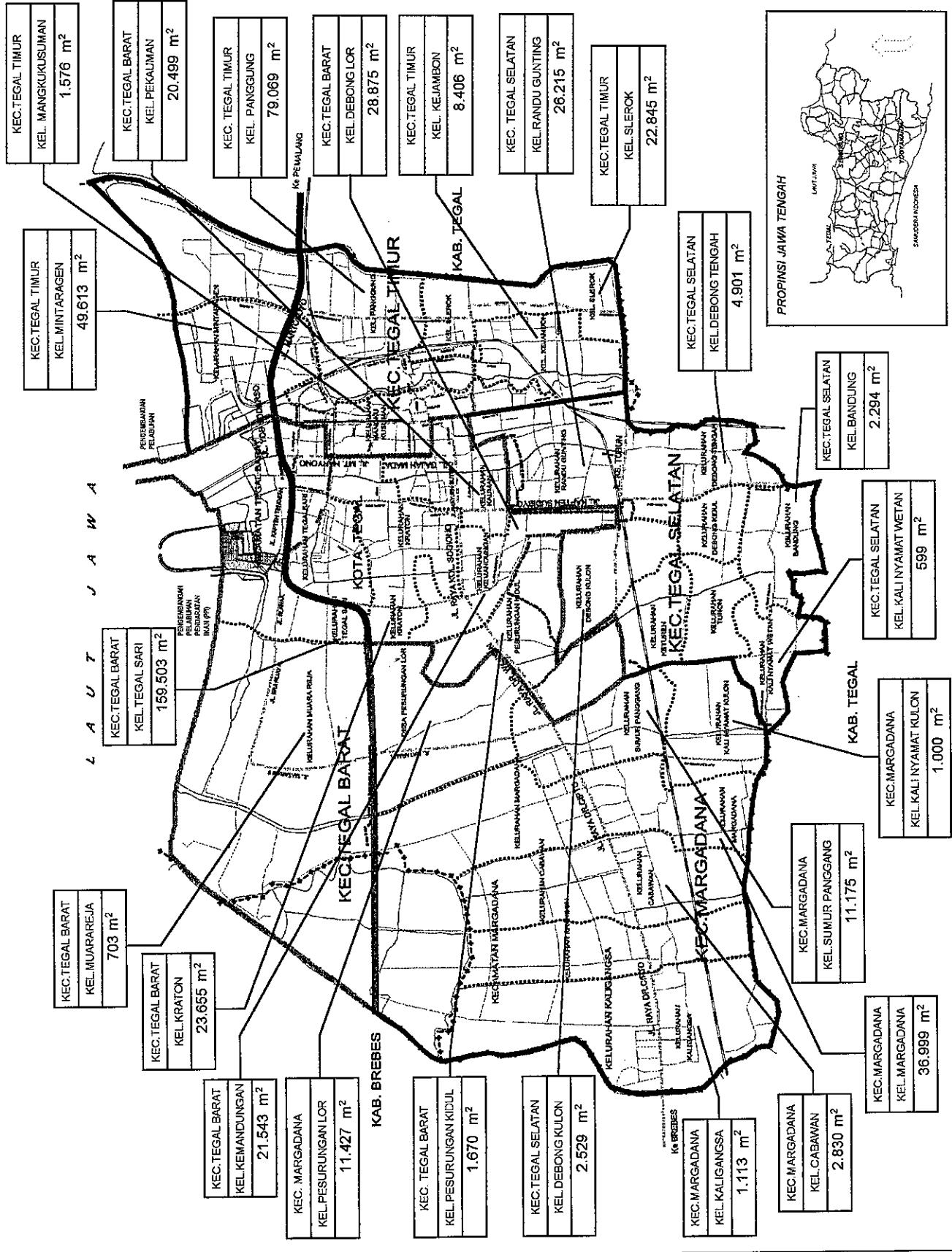
0 1 2 3 4 5
0 400 800 1200
M

GAMBAR HALAMAN

G.3.9 ----- 72

SUMBER

BAPPEDA KOTA TEGAL



3.3.2. Kajian Umum Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 / 1999 dan UU No. 25 / 1999 merupakan peningkatan kewenangan di daerah terutama dalam pembuatan peraturan dan pengelolaan sumber daya yang ada. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, maka daerah bisa melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan UU No. 34 / 2000 dan PP No.66 / 2001. Mekanisme Penerbitan KRK merupakan mekanisme yang telah dilaksanakan di Kota Tegal, tetapi belum ada faktor pendukungnya yaitu peraturan daerah sebagai landasan hukum untuk pemungutan retribusinya. Yang dimaksud mekanisme penerbitan KRK adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan pelayanan publik yang dimulai pendaftaran di KPT kemudian diproses di instansi pengelola Dinas Perkotaan (dahulu Dinas Tata Kota) sesuai Surat Keputusan Walikota Tegal tanggal 24 Oktober 1998, yang berisi tentang data – data perencanaan tata ruang kota beserta lampirannya berupa peta.

Terdapat beberapa mekanisme penerbitan KRK , yaitu melalui KPT, langsung instansi pengelola yaitu Dinas Perkotaan SubDinas Program (dahulu Dinas Tata Kota) , atau kerjasama antara KPT dan instansi pengelola (Dinas Perkotaan). Ketiganya bisa dilaksanakan, tetapi karena belum ada prosedur tetapnya maka ada beberapa alternatif mekanismenya, tetapi pengesahan dari KRK tetap dari satu instansi pengelola yaitu Dinas Perkotaan Kota Tegal. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota tersebut diatas, dan juga fungsi dari KRK sebagai acuan bagi perijinan yang lainnya, maka mekanisme KRK perlu diperhatikan dengan peraturan yang lebih kuat sebagai landasan hukumnya bagi kejelasan pelaksanaan mekanisme penerbitan KRK.

Berdasarkan data yang ada, jumlah pemohon tahun 2003 sebanyak 178 orang, bisa dihitung pula jumlah sampelnya untuk data primer, maka dari data primer tersebut

diharapkan bisa diketahui pendapat masyarakat tentang mekanisme penerbitan KRK, serta tentang kemampuan membayar retribusi penggantian biaya cetak peta. Sehingga bisa di rencanakan formulasi dari retribusi penggantian biaya cetak peta sebagai lampiran dari KRK. Penetapan tarif retribusi tersebut berdasarkan pendapat dari masyarakat dan pemerintah, karena berdasarkan NJOP, zoning, dan kelas jalan pada tanah yang diajukan KRK. Dengan data KRK yang telah terbit di Kota Tegal sejak tahun 2000 – Oktober 2003 sebanyak 725 buah, maka sudah mulai dirintis pelaksanaan pengendalian tata ruang kota melalui penerbitan KRK. Berdasarkan PP No. 66 tahun 2001 maka daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya melalui pemungutan retribusi daerah berdasarkan prinsip – prinsip penetapan retribusi. Dengan berdasarkan data KRK serta peraturan yang berlaku , maka retribusi penggantian biaya cetak peta yang merupakan lampiran dari KRK merupakan potensi yang perlu di perhatikan dengan melengkapi peraturan – peraturan sebagai landasan hukum bagi pemungutan retribusi tersebut.

3.4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Sebagai Hasil Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK di Kota Tegal

UU No. 34 / 2000 dan PP No.66 / 2001 memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk memungut retribusi daerah sesuai dengan prinsip – prinsip pemungutan retribusi daerah. Salah satu retribusi jasa umum adalah retribusi penggantian biaya cetak peta, sehingga pemerintah daerah dapat memungut retribusi tersebut dengan mekanisme serta formulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan daerah setempat.

Kota Tegal pada saat ini telah melaksanakan penerbitan KRK yang terdapat lampirannya berupa peta, sehingga hal ini merupakan potensi untuk dipungut retribusinya sesuai kemampuan pemerintah, kemampuan masyarakat serta peraturan yang ada. Dengan

adanya retribusi penggantian biaya cetak peta diharapkan bisa meningkatkan PAD di Kota Tegal, disamping itu daerah lain yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta telah ada retribusi tersebut yang ditetapkan dengan peraturan daerah setempat.

Pada saat ini KRK merupakan acuan bagi perijinan lainnya tetapi belum ada peraturan daerahnya sehingga untuk pemungutan retribusi KRK tidak ada dasar hukumnya, tetapi dengan adanya retribusi penggantian biaya cetak peta yang nantinya ditetapkan dengan perda, bisa diterapkan karena ada dasar hukumnya yaitu PP No. 66 tahun 2001. Proses perijinan yang menggunakan peta pada saat ini hanyalah KRK, sehingga retribusi penggantian biaya cetak peta dapat diimplementasikan pada penerbitan KRK karena peta merupakan lampiran KRK di Kota Tegal.

BAB IV

ANALISIS, FORMULASI DAN MEKANISME PENERBITAN KRK SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA DI KOTA TEGAL

4.1. Analisis Formulasi Keterangan Rencana Kota Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Analisa Kuantitatif seperti dalam kerangka pikir yang telah ada, akan digunakan untuk menganalisis dan menghitung potensi dari Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan dari Dinas Perkotaan selama tahun 2000 - 2003 yaitu sebanyak 725 buah, sedangkan selama tahun 2003 sebanyak 178 buah. Dari Rumus (2) adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Jumlah output}}{\text{Jumlah input}}$$

Jumlah output adalah jumlah hasil atau penerimaan minimal yang diharapkan dari pendapatan / retribusi penggantian biaya cetak peta selama 1 tahun, dengan data selama tahun 2003. Jumlah input adalah jumlah modal atau pengeluaran rata – rata untuk seluruh perangkat / kebutuhan guna pelayanan penggantian biaya cetak peta selama 1 tahun.

Tingkat efisiensi adalah merupakan perbandingan dari jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran , apabila tingkat efisiensi ≥ 1 , maka secara ekonomi retribusi penggantian biaya cetak peta bisa dilaksanakan sebagai lampiran dari KRK, karena dari sisi pemerintah tidak mengalami kerugian. Apabila tingkat efisiensi ≤ 1 , maka secara ekonomi retribusi penggantian biaya cetak peta belum bisa dilaksanakan, tetapi apabila dari pemerintah bisa memberikan subsidi untuk kebutuhan rutin setiap tahunnya , maka bisa saja retribusi tersebut diberlakukan, dengan asumsi tujuan dari pemerintah adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka pengendalian rencana tata ruang kota , bukan semata – mata untuk mencari keuntungan.

Prinsip dari pemungutan retribusi adalah asas manfaat (*benefit principles*). Dalam menilai manfaat melalui beberapa langkah yaitu : identifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya dan kemudian diterapkan dalam nilai rupiah dengan harga pasar / harga batang pengganti / mengadakan survey tentang kesediaan membayar (*willingness to pay*). (Suparmoko, 2002).

Berdasarkan hasil kuesioner pada masyarakat, dengan pengambilan sampel dengan cara *accidental sampling* yang jumlah sampelnya 123 orang, ternyata setelah disortir hanya 110 orang yang memberikan jawaban yang lengkap. Dari hasil kuesioner yang masuk maka didapatkan hasil bahwa penghasilan total dalam satu keluarga tiap bulannya sebanyak 41% antara Rp. 1.005.000 – 1.500.000,- ; 39 % berpenghasilan antara Rp. 1.505.000 – 2.500.000,- ; 15 % berpenghasilan antara Rp. 705.000 – 1.000.000,- ; dan 5 % berpenghasilan dibawah Rp. 700.000,- .

Menurut Akture (Tokman , 1984 : 95), yang membagi jumlah pendapatan dalam 3 kategori adalah : a. Kategori berpendapatan rendah bila $< 3 \times \text{UMR}$, b. pendapatan sedang antara $3-7 \times \text{UMR}$, c. pendapatan tinggi bila $> 7 \times \text{UMR}$. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/52/2002 tanggal 20 Nopember 2002 maka UMR di Kota Tegal adalah sebesar Rp.364.000,- per bulan, sehingga didapat batasan sebagai berikut :

1. Batasan atas berpendapatan rendah = $3 \times \text{Rp. } 364.000,- = \text{Rp. } 1.092.000,-$
2. Batas atas berpendapatan sedang = $7 \times \text{Rp. } 364.000,- = \text{Rp. } 2.548.000,-$
 Batas berpendapatan sedang antara Rp. 1.092.000,- dan Rp. 2.548.000,-
3. Batas bawah berpendapatan tinggi = Rp. 2.548.000,-

Dengan batasan tersebut diatas dan hasil penelitian , didapat sekitar 80 % masyarakat, batasan pendapatan minimal Rp. 1.005.000,- maka sebagian besar masyarakat Kota Tegal

berdasarkan sampel yang ada termasuk kategori berpenghasilan sedang tetapi termasuk batas bawahnya.

Rencana pelaksanaan retribusi penggantian biaya cetak peta memerlukan pendapat masyarakat juga sebagai subyek dari retribusi tersebut subyek sehingga masyarakat sudah ada sebagian yang mengetahui apabila telah diberlakukan peraturan daerah tersebut. Dari hasil survei terhadap 110 orang sampel yang datanya lengkap maka didapat :

35 % setuju apabila retribusi tersebut segera dilaksanakan, 25% setuju apabila retribusi tersebut dilaksanakan 5 tahun lagi, 23 % setuju apabila retribusi tersebut dilaksanakan sekitar 3 tahun lagi, sedangkan 17 % respondent mengharapkan pemerintah menggali retribusi dari sumber lainnya. Sehingga dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 83 % respondent mengharapkan retribusi penggantian biaya cetak peta segera dilaksanakan maksimal 5 tahun lagi.

Dengan menggunakan salah satu model formulasi kebijakan yaitu **model pilihan publik** (Nugroho, 2003) maka penentuan formulasi sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian cetak peta yaitu : $R = f (\text{nilai ekonomis}) + f (\text{zoning}) + f (\text{klas jalan})$ berdasarkan pendapat masyarakat melalui hasil kuisioner. Berdasarkan luas wilayah kota Semarang > luas Kota Tegal serta Perda Kota Semarang No. 14 tahun 1998 sebagai komparasinya yang hanya membagi klasifikasi luas tanah hanya dibagi 3, dan dari data pemohon 2003 yang sebagian besar (> 60 %) hanya mempunyai tanah maksimal 300 m², maka formulasi retribusi penggantian biaya cetak peta di Tegal hanya dibagi 2 klasifikasi, menurut luas tanahnya yaitu :

- a. Formulasi retribusi untuk luas tanah $\leq 300 \text{ m}^2$
- b. Formulasi retribusi untuk luas tanah $> 300 \text{ m}^2$

Selain pembagian klasifikasi luas tanah, penentuan formulasi itu berdasarkan Perda retribusi di Kota Semarang dan Kota Surakarta sebagai wilayah komparasi, yaitu retribusi minimal di Kota Semarang < di kota Surakarta, sehingga digunakan acuan pada Perda di Kota Semarang. Data menunjukkan pendapatan per kapita di Kota Tegal < pendapatan per kapita di Semarang, sehingga formulasi retribusi sebagai berikut :

$$= \text{Retribusi minimal per m}^2 \text{ di Tegal} \leq \text{Retribusi minimal per m}^2 \text{ di Semarang}$$

$$= f(\text{nilai ekonomis}) + f(\text{zoning}) + f(\text{klas jalan}) \leq \text{Rp. 250,-}$$

Perbedaan formulasi berdasarkan luas tanah hanya untuk $f(\text{nilai ekonomis})$ saja, sedangkan untuk $f(\text{zoning}) + f(\text{klas jalan})$ tidak dibedakan berdasarkan klasifikasi luas tanah, karena zoning dan klas jalan sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan nilai ekonomis tergantung dari NJOP. Formulasi untuk retribusi berdasarkan klasifikasi luas tanah adalah :

- a. Untuk luas tanah $\leq 300 \text{ m}^2$

$$R = \{k_1 \times f(\text{nilai ekonomis})\} + f(\text{zoning}) + f(\text{klas jalan})$$

- b. Untuk luas tanah $> 300 \text{ m}^2$

$$R = \{k_2 \times f(\text{nilai ekonomis})\} + f(\text{zoning}) + f(\text{klas jalan})$$

Berdasarkan hasil kuisioner pada masyarakat Kota Tegal, maka untuk formulasi berdasarkan pembagian luas yaitu luas tanah $\leq 300 \text{ m}^2$, $R = \{k_1 \times f(\text{nilai ekonomis})\}$ adalah : 48 % setuju rumus $R = 0,3 \times 1/1000 \times \text{NJOP}$, 27 % setuju dengan rumus $R = 0,5 \times 1/1000 \times \text{NJOP}$, sedangkan 25 % respondent tidak setuju karena dianggap membebankan masyarakat dan sebagian besar masyarakat belum mengerti tentang retribusi ini,

Jadi rumus retribusi per m^2 untuk luas tanah $\leq 300 \text{ m}^2$ pada semua lokasi adalah :

$$R(1) = \frac{(48 \times 0,3) + (27 \times 0,5)}{75} \times 1/1000 \times \text{NJOP}$$

$$R(1) = 0,372 \times 1/1000 \times \text{NJOP} \dots\dots\dots (4)$$

Dari hasil survei, pendapat masyarakat untuk Formulasi retribusi penggantian biaya cetak peta untuk per m² (luas > 300 m²), $R = \{k1 \times f(\text{nilai ekonomis})\}$ adalah : 47 % setuju rumus $R = 0,5 \times 1/1000 \times \text{NJOP}$, 29 % setuju dengan rumus $R = 0,7 \times 1/1000 \times \text{NJOP}$, 24 % tidak setuju karena dianggap membebankan masyarakat dan sebagian besar masyarakat belum mengerti tentang retribusi ini,

Jadi rumus retribusi per m² untuk luas tanah > 300 m² pada semua lokasi adalah :

$$R(2) = \frac{(47 \times 0,5) + (29 \times 0,7)}{76} \times 1/1000 \times \text{NJOP}$$

$$R(2) = 0,576 \times 1/1000 \times \text{NJOP} \dots\dots\dots (5)$$

Formulasi retribusi selain dari NJOP, juga dilihat dari sisi letak zoning dan klas jalan pada suatu lokasi tanah. Dari hasil survei didapat pendapat masyarakat tentang tambahan retribusi berdasarkan zoning sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Tegal yang terdapat dalam Perda Kota Tegal No. 2 tahun 1995 adalah :

- 66 % setuju apabila tambahan retribusi tanah di zoning perumahan : Rp.100, zoning fasilitas sosial/pendidikan/kesehatan/rekreasi : Rp.200, zoning perkantoran : Rp.300, zoning Jasa Campuran : Rp.400, zoning perdagangan : Rp.500, zoning pergudangan : Rp.600, zoning industri : Rp.700;
- 7 % setuju apabila tambahan retribusi tanah di zoning perumahan :Rp.200, zoning fasilitas sosial/pendidikan/kesehatan/rekreasi : Rp.300, zoning perkantoran : Rp.400, zoning Jasa Campuran : Rp.500, zoning perdagangan : Rp.600, zoning pergudangan : Rp.700, zoning industri : Rp.800;
- 27 % tidak setuju karena dianggap memberatkan masyarakat dan sebagian masyarakat belum banyak mengetahui tentang manfaat retribusi ini;

Dari hasil survei diatas , maka Tambahan retribusi per m² untuk tanah di zoning perumahan adalah :

$$R(3) = \frac{(66 \times 100) + (7 \times 200)}{73}$$

$$R(3) = \text{Rp. 109,5,- , sehingga dibulatkan Rp.110,-}$$

Tambahan retribusi per m² untuk tanah di zoning fasilitas sosial / pendidikan / kesehatan /

rekreasi adalah :

$$R(4) = \frac{(66 \times 200) + (7 \times 300)}{73}$$

$$R(4) = \text{Rp. 209,5,- sehingga dibulatkan Rp. 210,-}$$

Tambahan retribusi per m² untuk tanah di zoning perkantoran adalah

$$R(5) = \frac{(66 \times 300) + (7 \times 400)}{73}$$

$$R(5) = \text{Rp. 309,5,- sehingga dibulatkan Rp. 310,-}$$

Tambahan retribusi per m² untuk tanah di zoning jasa campuran adalah :

$$R(6) = \frac{(66 \times 400) + (7 \times 500)}{73}$$

$$R(6) = \text{Rp. 409,5,- sehingga dibulatkan Rp. 410,-}$$

Tambahan retribusi per m² untuk tanah di zoning perdagangan adalah :

$$R(7) = \frac{(66 \times 500) + (7 \times 600)}{73}$$

$$R(7) = \text{Rp. 509,5,- sehingga dibulatkan Rp. 510,-}$$

Tambahan retribusi per m² untuk tanah di zoning pergudangan adalah :

$$R(8) = \frac{(66 \times 600) + (7 \times 700)}{73}$$

$$R(8) = \text{Rp. 609,5,- sehingga dibulatkan Rp. 610,-}$$

Tambahan retribusi per m² untuk tanah di zoning perindustrian adalah :

$$R(9) = \frac{73}{(61 \times 700) + (7 \times 800)} R(9) = \text{Rp. } 709,5,- \text{ sehingga dibulatkan Rp. } 710,-$$

Formulasi retribusi penggantian cetak peta selain dilihat dari NJOP dan zoning

adalah dari kelas jalan. Berdasarkan hasil survei pada masyarakat, maka pendapat tentang imbah retribusi berdasarkan kelas jalan sesuai dengan kelas jalan pada Perda No. 11 tahun

1987 adalah :

- 61 % setuju apabila tambahan retribusi bila tanah di tepi kelas jalan IV : Rp.100, kelas jalan III : Rp.200, kelas jalan II : Rp.300, kelas jalan I : Rp.400;

- 9 % setuju apabila tambahan retribusi bila tanah di tepi kelas jalan IV : Rp.200, kelas jalan III : Rp.300, kelas jalan II : Rp.400, kelas jalan I : Rp.500;

- 30 % tidak setuju karena dianggap memberatkan masyarakat dan sebagian masyarakat belum banyak mengetahui tentang manfaat retribusi ini;

Tambahan retribusi per m² untuk tanah di tepi kelas jalan IV adalah :

$$R(10) = \frac{70}{(61 \times 100) + (9 \times 200)}$$

R(10) = Rp. 112,8,- sehingga dibulatkan Rp. 115,-

Tambahan retribusi per m² untuk tanah di tepi kelas jalan III adalah :

$$R(11) = \frac{70}{(61 \times 200) + (9 \times 300)}$$

R(11) = Rp. 212,8,- sehingga dibulatkan Rp. 215,-

Tambahan retribusi per m² untuk tanah di tepi kelas jalan II adalah :

$$R(12) = \frac{70}{(61 \times 300) + (9 \times 400)}$$

R(12) = Rp. 312,8,- sehingga dibulatkan Rp. 315,-

Tambahan retribusi per m² untuk tanah di tepi kelas jalan I adalah :

$$R(13) = \frac{(61 \times 400) + (9 \times 500)}{70}$$

$$R(13) = \text{Rp. 412,8,- sehingga dibulatkan Rp. 415,-}$$

Dari hasil survei pada masyarakat, maka rumus retribusi penggantian biaya cetak peta

untuk luas tanah $\leq 300 \text{ m}^2$ adalah sebagai berikut :

$$\text{Retribusi per m}^2 = (0,372 \times 1/1000 \times \text{NJOP}) + f(\text{zonig}) + f(\text{klas jalan}) \dots (6)$$

Untuk luas tanah $> 300 \text{ m}^2$, maka rumus retribusi penggantian biaya cetak peta adalah

sebagai berikut :

$$\text{Retribusi per m}^2 = (0,576 \times 1/1000 \times \text{NJOP}) + f(\text{zonig}) + f(\text{klas jalan}) \dots (7)$$

Keterangan :

NJOP = nilai jual obyek pajak / m²

f(zonig) = tambahan retribusi sesuai dengan zonig tertentu

f(klas jalan) = tambahan retribusi sesuai dengan klas jalan tertentu

Berdasarkan hasil kuesioner, maka tambahan Retribusi per m² berdasarkan zonig dan

klas jalan, seperti terlihat pada Tabel IV.1 dibawah ini :

TABEL IV.1
RETRIBUSI UNTUK FUNGSI ZONING DAN KLAS JALAN
 (Dalam Rupiah / m²)

ZONING	KLAS JALAN			
	KLAS I	KLAS II	KLAS III	KLAS IV
Perumahan	415	315	215	115
Fas.Sos./pendd./kesh./rekr.	525	425	325	225
Perkantoran	625	525	425	325
Jasa Campuran	725	625	525	425
Perdagangan	825	725	625	525
Pergudangan	925	825	725	625
Industri	1025	925	825	725
	1125	1025	925	825

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Daftar Klas Jalan berdasarkan Perda Bangunan Kota Tegal No. 11 tahun 1987 adalah seperti pada Tabel IV.2 dibawah ini :

TABEL IV.2
DAFTAR KLAS JALAN DI KOTA TEGAL

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
	Klas Jalan I (satu)		Klas Jalan 2 (dua)	55	Jl. Cinde Kencana
1	Jl. Martoloyo	7	Jl. Abimanyu		
2	Jl. Galah Mada	8	Jl. Cendrawasih		Klas Jalan 3 (tiga)
3	Jl. Sutoyo	9	Jl. Merak	1	Jl. Ruslani
4	Jl. Sugiyono	10	Jl. Perkutut	2	Jl. Kemuning
5	Jl. Pemuda	11	Jl. Cempaka	3	Jl. Tanjung
6	Jl. Veteran	12	Jl. Melati	4	Jl. Jongkor
7	Jl. A. Yani	13	Jl. Batanghari	5	Jl. Arum
8	Jl. Diponegoro	14	Jl. Durian	6	Jl. Kenanga
9	Jl. Sultan Agung	15	Jl. Srigunting	7	Jl. Irian
10	Jl. AR. Hakim	16	Jl. Waringin	8	Jl. Nakula
11	Jl. Sudirman	17	Jl. Waru	9	Jl. Abimanyu
12	Jl. Panjaitan	18	Jl. Cemara	10	Jl. Patimura
13	Jl. Proklamasi	19	Jl. Jati	11	Jl. Layang
14	Jl. Cokroaminoto	20	Jl. Arjuna	12	Jl. Kutiang
15	Jl. Alun - alun	21	Jl. Sumbodro	13	Jl. Kepodang
16	Jl. Sudibyo	22	Jl. Flores	14	Jl. Beo
17	Jl. KS. Tubun	23	Jl. Delima	15	Jl. Nuri
18	Jl. KH. Mansyur	24	Jl. Jalak	16	Jl. Ayam
19	Jl. KH. Wahid Hasyim	25	Jl. Slamet	17	Jl. Milwis
20	Jl. Pancasila	26	Jl. Mangga	18	Jl. Banyar
21	Jl. Martadinata	27	Jl. Blimbing	19	Jl. Bethk
22	Jl. Kesatrian	28	Jl. Asem Tiga	20	Jl. Cucut
23	Jl. Slamet Riyadi	29	Jl. Cimannuk	21	Jl. Glatik
24	Jl. Hang Tuah	30	Jl. Sawo	22	Jl. Gandaria
25	Jl. Setiabudi	31	Jl. Sepat	23	Jl. Cinde
26	Jl. Katamso	32	Jl. KH. Mukhlis	24	Jl. Kartunajawa
27	Jl. Tengiri	33	Jl. Sembilang	25	Jl. Halimahera
28	Jl. Ismail	34	Jl. Manggis	26	Jl. Seram
29	Jl. Kartini	35	Jl. Nanas	27	Jl. Barito
30	Jl. Lawu	36	Jl. Layur	28	Jl. Depo
31	Jl. Ahmad Dahlan	37	Jl. Bawal	29	Jl. Kambaja
32	Jl. Suprpto	38	Jl. Sumbing		
33	Jl. Semeru	39	Jl. Cempedak		
34	Jl. Tendean	40	Jl. Kapuas		Klas Jalan 4 (empat)
35	Jl. S. Partman	41	Jl. Citarum	1	Jalan - jalan kampung
36	Jl. M. Supeno	42	Jl. Brantas	2	Jalan - jalan tanah
37	Jl. Sugianto	43	Jl. Jeruk	3	Lontong
38	Jl. Werkudoro	44	Jl. Nakula	4	Gang - gang
39	Jl. Poso	45	Jl. Duku	5	Jln-jln tak ada nama
40	Jl. Zaenal Arifin	46	Jl. Jambu		
		47	Jl. Mawar		
	Klas Jalan 2 (dua)	48	Jl. Wader		
1	Jl. Bali	49	Jl. Teri		
2	Jl. Sumbawa	50	Jl. Gurame		
3	Jl. Bandeng	51	Jl. Kakap		
4	Jl. Merpati	52	Jl. Udang		
5	Jl. Serayu	53	Jl. Tawes		
6	Jl. Kaloran	54	Jl. Imam Bonjol		

Sumber : Perda Kota Tegal No. 11 / 1987

Dari rumus diatas, maka bisa dihitung pendapatan dan pengeluaran dari Pemerintah Kota Tegal dengan berdasarkan data pemohon KKK selama tahun 2003 sebanyak 178 orang. Jumlah pengeluaran atau input untuk modal pelayanan penggantian biaya cetak peta selama 1 tahun untuk jumlah pemohon 178 orang, terdiri dari :

$$\begin{aligned} \text{Fotocopy A3} &= \text{Rp. } 2.000 \times 178 = \text{Rp. } 356.000,- \\ \text{Jasa pelayanan + transportasi survei} &= \text{Rp. } 5.000 \times 178 = \text{Rp. } 890.000,- \\ \hline \text{Jumlah pengeluaran} &= \text{Rp. } 1.246.000,- \end{aligned}$$

Perkiraan jumlah pemasukan minimal atau output yang diharapkan dari retribusi penggantian biaya cetak peta, berdasarkan data tahun 2003, yang terdiri dari 80 % pemohon berlokasi di perumahan dan terletak di tepi jalan kelas II , dengan luas tanah minimal 100 m² , dengan NJOP diambil rata – rata Rp. 100.000 per m² , maka dari hasil kuesioner diambil rumus (10) untuk retribusi dengan luas ≤ 300 m² adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Retribusi} &= \text{luas} \times [f(\text{nilai ekonomis}) + f(\text{zoning}) + f(\text{klas jalan})] \\ \text{Retribusi} &= 100 \text{ m}^2 \times [(0,372 \times 1/1000 \times \text{Rp. } 100.000) + \text{Rp. } 110 + \text{Rp. } 115] \\ &= \text{Rp. } 26.220,- \text{ per orang} \\ \text{Jumlah total penerimaan untuk 178 orang} &= 178 \times \text{Rp. } 26.220,- \\ &= \text{Rp. } 4.667.160,- \end{aligned}$$

Dari rumus (2) didapat :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \text{Jumlah output} / \text{Jumlah input}$$

$$= \text{Rp. } 4.667.160 / \text{Rp. } 1.246.000 = 3,74 > 1$$

Karena tingkat efisiensi 3,74 > 1, maka dari segi ekonomi retribusi penggantian biaya cetak peta bisa diberlakukan.

4.2. Analisis Keadilan dan Kemampuan Membayar Retribusi Penggantian Biaya

Cetak Peta

4.2.1. Analisis Keadilan Dalam Membayar Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Untuk menganalisis keadilan dalam membayar retribusi penggantian biaya cetak peta dengan analisa kualitatif dengan prinsip kepuasan atau balas jasa (*benefit approach*), yaitu dengan melihat pada zoning dan klas jalan yang ada. Untuk permohonan KRK, maka berdasarkan hasil *survey* lapangan dapat dihitung retribusi penggantian biaya cetak peta yang berdasarkan NJOP, zoning serta klas jalan yang dibagi dalam beberapa kriteria seperti pada analisa 4.1. Dengan perbedaan kriteria tersebut diatas, maka retribusi tersebut dapat diterapkan, sedangkan koefisien dari retribusi tergantung dari pendapat masyarakat yang merupakan pembayar retribusi tersebut.

4.2.2. Analisis Kemampuan Membayar Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Seperti terlihat pada hasil analisa 4.1 maka sebagian besar penduduk Kota Tegal yang menjadi sampel mempunyai penghasilan tingkat sedang antara Rp. 1.092.000 – Rp. 2.548.000 per bulannya. Menurut Suparmoko (2002), prinsip pemungutan retribusi adalah asasa manfaat (*benefit principles*) dengan langkah – langkah seperti pada analisa 4.1, maka retribusi penggantian biaya cetak peta dapat diformulasikan . Retribusi tersebut belum dilaksanakan di Kota Tegal, masih dalam rencana sehingga apabila dihitung *ability to pay / ATP* masyarakat terhadap retribusi tersebut belum bisa dilihat, karena ATP dihitung / dilihat dari penghasilan masyarakat terhadap retribusi yang telah ada / dilaksanakan.

4.3. Analisis Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Analisis Penerbitan KRK Sebagai dasar Pemungutan Retribusi Daerah menggunakan 2 analisis yaitu Analisis Normatif dan Analisis Skoring. Analisis Normatif

dilaksanakan untuk mengetahui tentang pengambilan kebijakan KRRK dan pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta. Analisis ini berdasarkan suatu aturan ditetapkan oleh instansi tertentu, maupun landasan hukum atau lainnya. Dalam studi ini analisis normatif digunakan untuk menganalisa kelayakan dari KRRK beserta retribusi cetak peta yang merupakan salah satu ekstensifikasi retribusi dalam upaya peningkatan PAD di Kota Tegal. Kriteria – kriteria tersebut berdasarkan pada Undang – undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada pasal 18 ayat (3), tercantum kriteria untuk retribusi jasa umum yang meliputi 7 hal yaitu : a. Retribusi Jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang atau badan yang diharuskan membayar retribusi; disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; d. Jasa tersebut layak untuk dikenalkan retribusi; e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya; f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; g. Pemungutan retribusi memungkinkan jasa tersebut dengan tingkat dan / atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Kriteria diatas untuk retribusi diperkuat dengan 3 hal yang meliputi : h. sudah diterapkan di daerah lain, i. termasuk dalam bidang Kimpraswil dan perencanaan wilayah dan kota, j. sudah ada pelaksanaan tahap awal di Kota Tegal, meskipun belum optimal. Penilaian dilakukan dengan memberi skoring untuk setiap kriteria dengan tanda (√) menyatakan bahwa kriteria tersebut memenuhi / sesuai dengan kondisi yang ada saat ini

dan tanda (x) menyatakan bahwa kriteria tersebut tidak sesuai dengan kondisi di Kota Tegal. Apabila dari 10 kriteria tersebut diatas , sudah ada minimal 7 kriteria yang ada sesuai dengan UU No. 18 / 1997 , maka retribusi penggantian biaya cetak peta dianggap layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan kriteria – kriteria tersebut diatas , maka penulis membuat analisa normatif dari retribusi penggantian biaya cetak peta seperti dalam Tabel IV.3 dibawah ini :

TABEL IV.3
ANALISIS SKORING KELAYAKAN NORMATIF
RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA DIKOTA TEGAL

NO	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA										Layak
		RETRIBUSI JASA UMUM										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
1	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Sumber : Hasil Analisis , 2004

Keterangan :

- Retribusi Jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat jasa usaha atau retribusi
- Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang atau pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
- Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan / atau kualitas pelayanan yang lebih baik;
- Sudah diterapkan di daerah lain;
- Termasuk dalam bidang Kimpaswil dan perencanaan wilayah dan kota;
- Sudah ada pelaksanaan tahap awal di Kota Tegal, meskipun belum optimal.

Berdasarkan hasil uji kelayakan normatif terhadap retribusi pengantian biaya

cetak peta yang merupakan lampiran KRK, maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi

tersebut dapat memenuhi 10 kriteria sehingga retribusi tersebut bisa termasuk dalam

retribusi jasa umum yang layak untuk diterapkan di Kota Tegal.

Analisa Skoring digunakan untuk menganalisa jumlah kepegawaian pada suatu

instansi / kantor yang sangat berpengaruh pada kelancaran tugas pelayanan publik, dan juga kaitannya dengan tupoksi pada instansi yang akan berpengaruh pada mekanisme KRR. Hasil dari analisa tersebut bisa didapatkan beberapa alternatif mekanisme penerbitan KRR, sehingga bisa dilaksanakan untuk perbaikan pelayanan publik di masa – masa mendatang, dengan memperhatikan jumlah pegawai yang ada pada saat ini serta tupoksi pada instansi tersebut. Analisa skoring dilaksanakan 2 kali yaitu untuk menganalisa keterkaitan tupoksi instansi dengan penerbitan KRR. Instansi yang dinilai meliputi Bappeda, Dinas Perkotaan, Dinas Pendapatan Daerah, BPN, KPT, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum. Sedangkan kriteria dari tupoksi yang ada keterkaitan dengan KRR meliputi Perencanaan tata ruang kota, pengendalian tata ruang kota, retribusi penggantian biaya cetak peta.

Berdasarkan tupoksi pada instansi dan fungsi KRR sebagai pengendalian tata ruang kota dan sarana pemungutan retribusi penggantian cetak peta, maka terdapat 3 kriteria dengan nilai bobot dengan perencanaan (35 %), pengendalian (35%) dan retribusi (30%). Perencanaan dan pengendalian diberi nilai bobot yang sama sedangkan retribusi diberi nilai agak kecil karena merupakan implementasi lanjutan dari KRR, tetapi ketiga kriteria tersebut secara garis besar mempunyai nilai yang sama. Penilaian keterkaitan tupoksi instansi dengan penerbitan KRR diberi nilai dengan asumsi penulis antara 1 – 5, makin tinggi nilainya berarti makin kuat keterkaitannya, sedangkan jumlah nilai yang tertinggi merupakan instansi yang paling mempunyai keterkaitan tupoksi dengan KRR, kemudian diambil 3 instansi yang paling dominan. Hasil analisa skoring seperti terlihat pada Tabel IV.4 dibawah ini :

Analisa Skoring yang kedua dipakai untuk menganalisa instansi terpilih dari tabel IV.4 dengan beberapa alternatif mekanisme KRK. Dari definisi Thomas R Dye dalam Nugroho, 2003 tentang kebijakan publik, maka mekanisme KRK bisa dikategorikan kebijakan publik. Menurut Nugroho, 2003, peran pemimpin dalam kebijakan publik sangat vital, dan peranan tersebut didukung kemampuan pribadi serta oleh sumber daya yang ada dan organisasi yang dipimpinnya. Untuk analisa berikut ini menggunakan kriteria sumber daya serta organisasi yang ada dalam rangka pelaksanaan mekanisme KRK. Dengan nilai pembobotan yang sama yaitu sumber daya = 50 % serta organisasi atau SOT = 50 % . Sedangkan penilaian sumber daya , diambil jumlah PNS yang ada keterkaitan tugas dengan KRK, untuk PNS di Bappeda = 2 orang, di DPK = 4 orang, di KPT = 1 orang. Sedangkan SOT atau tupoksi secara legal, terdapat di Bappeda (Bag. Perencanaan TRK), DPK

retribusi penggantian biaya cetak peta.

KRK yang berfungsi sebagai pengendali tata ruang kota sekaligus sarana pemungutan ketiga instansi tersebut dengan kombinasinya akan dianalisa untuk menentukan mekanisme biaya cetak peta, yaitu Dinas Perkotaan , Bappeda, Kantor Pelayanan Terpadu. Selanjutnya keterkaitan dengan penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan retribusi penggantian

Dari hasil analisa skoring diatas, maka diambil 3 instansi yang paling mempunyai

Sumber : Hasil Analisis , 2004

NO	INSTANSI	PERENCANAAN	PENGENDALIAN	RETRIBUSI	JUMLAH
		%	N	%	(% X N)
1	BAPPEDA	35	5	35	3,10 (2)
2	DINAS PERKOTAAN	35	4	30	4,00 (1)
3	DISPENDA	35	1	30	2,25
4	BPN	35	3	30	2,75
5	KPT	35	1	30	2,90 (3)
6	BAG. TAPEM	35	1	30	1,70
7	BAG. HUKUM	35	2	35	2,05

TABEL IV.4
KETERKAITAN TUPOKSI INSTANSI DENGAN PENERBITAN KRK

(Bag. Pengendalian TRK) dan KPT (Bag. Pelayanan Perijinan). Sesuai tupoksi , maka penilaiannya adalah Perencanaan = 1, pengendalian = 2, perijinan = 3 , karena penerbitan KRK merupakan salah satu bentuk perijinan atau rekomendasi. Sedangkan untuk penilaian jumlah pegawai untuk sumber daya adalah jumlah pegawai 1-2 nilai = 1, jumlah pegawai 3-4 nilai = 2, jumlah pegawai 5-6 nilai = 3, sehingga makin banyak jumlah pegawainya , maka makin banyak pegawai makin tinggi nilainya. Data dari kepegawaian maka didapat jumlah pegawai yang langsung ada keterkaitan dengan KRK adalah : pegawai di Bappeda = 2 orang, di DPK = 4 orang, di KPT = 1 orang. Hasil analisa skoring ini diambil 3 dengan jumlah nilai tertinggi, dan dapat dilihat pada Tabel IV.5 dibawah ini :

TABEL IV.5
KETERKAITAN INSTANSI DENGAN MEKANISME PENERBITAN KRK

NO	INSTANSI	SDM BD.TATA RUANG			SOT YANG ADA			JUMLAH
		%	JML	NILAI	%	JML	NILAI	
1	BAPPEDA	50	1	0,5	50	1	0,5	1,0
2	DINAS PERKOTAAN (DPK)	50	2	1,0	50	2	1,0	2,0
3	KANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT)	50	1	0,5	50	3	1,5	2,0
4	BAPPEDA & KPT	50	2	1,0	50	0	0	1,0
5	BAPPEDA & DPK	50	3	1,5	50	0	0	1,5
6	DPK & KPT	50	3	1,5	50	0	0	1,5

Sumber : Hasil Analisis , 2004

Berdasarkan hasil analisis diatas, dilihat bahwa terdapat 2 nilai sama yaitu 1,5 pada gabungan instansi di no. 5 dan 6, tetapi karena KRK lebih ditekankan pada pengendalian dan perijinan maka sesuai dengan tupoksi lebih mengarah pada gabungan DPK dan KPT. Jadi dari analisa diatas diambil 3 alternatif mekanisme KRK yaitu di Dinas Perkotaan, Kantor Pelayanan Terpadu, serta Gabungan DPK dan KPT. Kemudian 3

alternatif tersebut akan dianalisa PHA untuk menentukan alternatif yang paling efektif sesuai pendapat dari nara sumber / instansi yang terkait.

4.4. Analisa Mekanisme Penerbitan KRR Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Analisis kualitatif lainnya yang dilakukan adalah Analisis Proses Hierarki

Analitik (PHA) pada pemilihan alternatif mekanisme KRR. Penggunaan ini didasarkan pada pertimbangan antara lain : metode ini mempunyai kemampuan untuk mengkuantitatifkan data kualitatif dan mampu menangkap persepsi dari mereka yang dianggap mengetahui dan mengerti tentang persoalan yang dihadapi. Kelebihan metode Proses Hirarki Analitik (PHA) ini adalah data yang bersifat kualitatif dapat dikuantitatifkan, dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan tujuan majemuk dan kriteria majemuk. PHA ini juga mempunyai kemampuan dalam menentukan keputusan yang didasarkan pada aspek akademis, aspek kepakaran dan aspek intuisi dan terakhir dapat digunakan untuk merinci keadaan yang bersifat kompleks dan tidak tenkur sehingga menghasilkan keputusan terbaik.

Dengan berdasarkan 3 alternatif mekanisme KRR diatas, dan dengan beberapa kriteria pelayanan publik yang meliputi : a. Kesederhanaan, b. Kejelasan dan kepastian, c. Keamanan, d. Keterbukaan, e. Efisiensi, f. Ekonomis, g. Keadilan yang merata, h. Kepastian waktu , akan dipilih alternatif yang terbaik dengan analisa PHA. Ketiga alternatif mekanisme tersebut adalah a. KPT, b. Dinas perkotaan, c. Gabungan KPT dan Dinas Perkotaan. Penentuan tingkat kepentingan antara kriteria dengan alternatif mekanisme KRR didapat dari hasil survei pada instansi terkait yaitu a. KPT, b. Dinas Perkotaan, c. Bappeda, d. BPN, e. Dinas Pendapatan Daerah, f. Bag. Tata Pemerintahan, g. Bag. Hukum, h. Anggota DPR, i. Praktisi ekonomi / Akademik dari UPS. Berdasarkan

kriteria – kriteria pelayanan publik dan model – model alternatif mekanisme KRK, menurut skema Saaty (1993) maka bisa digambarkan seperti pada Gambar ' 4.1. Sedangkan alternatif mekanisme KRK di KPT, DPK dan Gabungan KPT dan DPK seperti terlihat pada Gambar 4.2, 4.3, 4.4 dibawah ini.

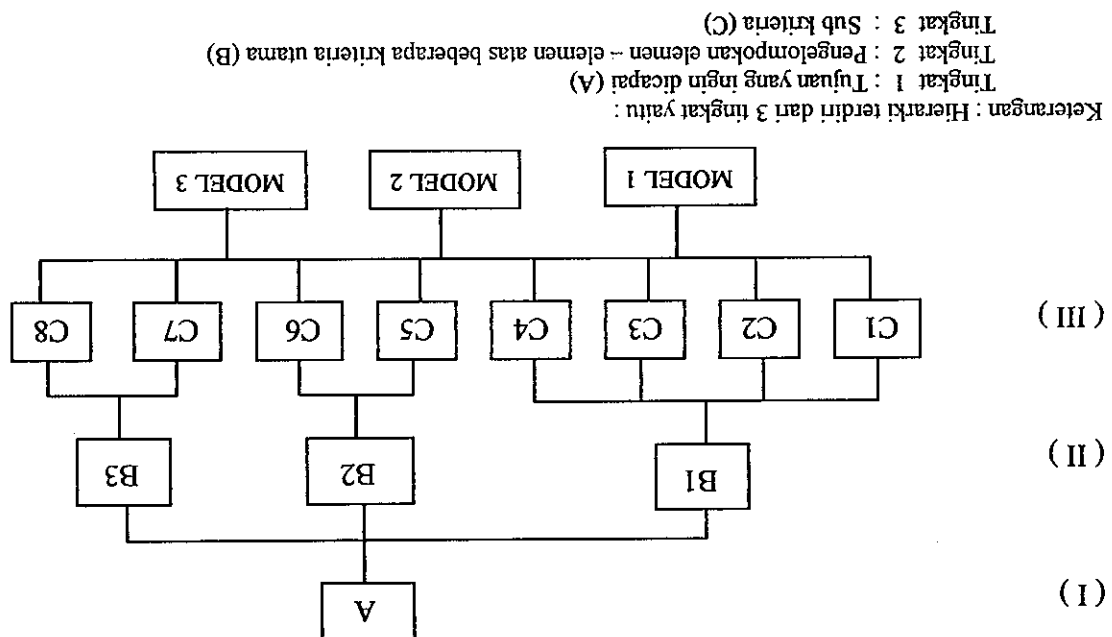
STRUKTUR HIERARKI ALTERNATIF MEKANISME PENERBITAN KRK DI KOTA TEGAL

GAMBAR 4.1

Model 1 adalah Mekanisme KRK di Kantor Pelayanan Terpadu Bagian Pelayanan
Keterangan Rencana Kota
Model 2 adalah Mekanisme KRK di Dinas Perkotaan Subdin. Program
Model 3 adalah Mekanisme KRK di Gabungan KPT dan Dinas Perkotaan

KETERANGAN :
Tingkat I = Tujuan, yaitu :
A = Mekanisme KRK
Tingkat II = Pengelompokan elemen atas beberapa kriteria, yaitu :
B1 = Persyaratan dan prosedur meliputi : C1,C2,C3,C4
B2 = Biaya meliputi : C5, C6
B3 = Waktu meliputi : C7, C8
Tingkat III = Sub Kriteria
C1 = Kesederhanaan
C2 = Keamanan
C3 = Keterbukaan
C4 = Efisiensi
C5 = Ekonomis
C6 = Keadilan yang merata
C7 = Kejelasan dan Kepastian
C8 = Kepastian waktu

Sumber : Hasil Analisis 2004

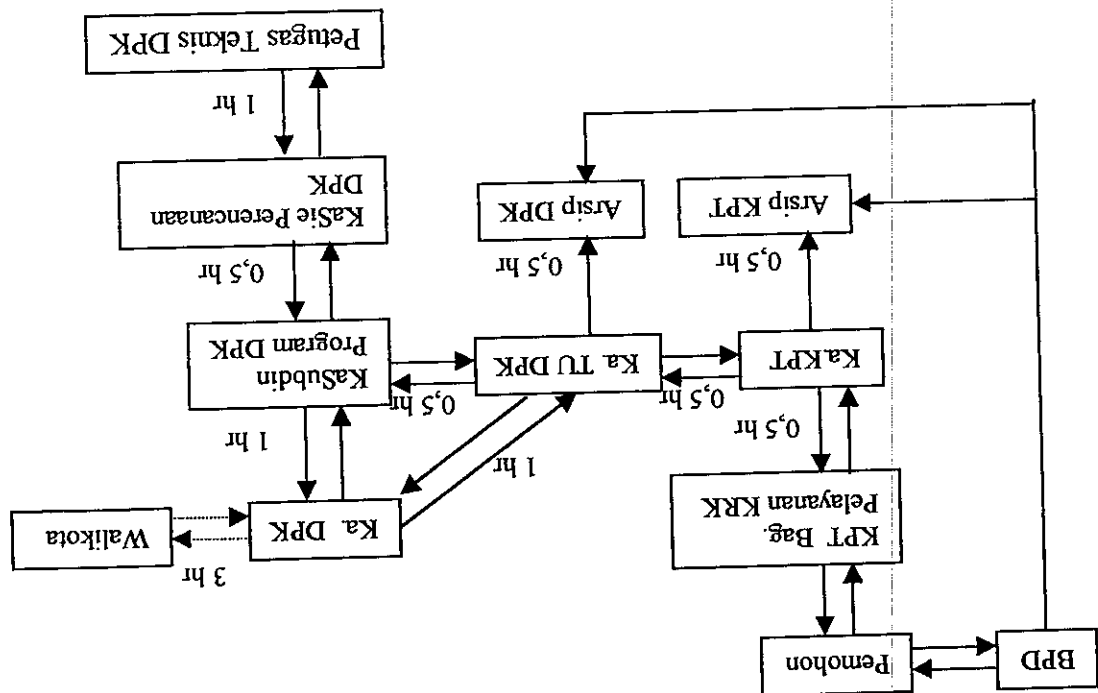


GAMBAR 4.2
MODEL I
MEKANISME KRK PADA KPT PADA BAGIAN PELAYANAN KRK

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Keterangan :

- : Garis perintah (komunikasi satu arah)
- ↔ : Garis perintah dan koordinasi (komunikasi dua arah)
- ⇄ : Garis perintah dan koordinasi apabila diperlukan

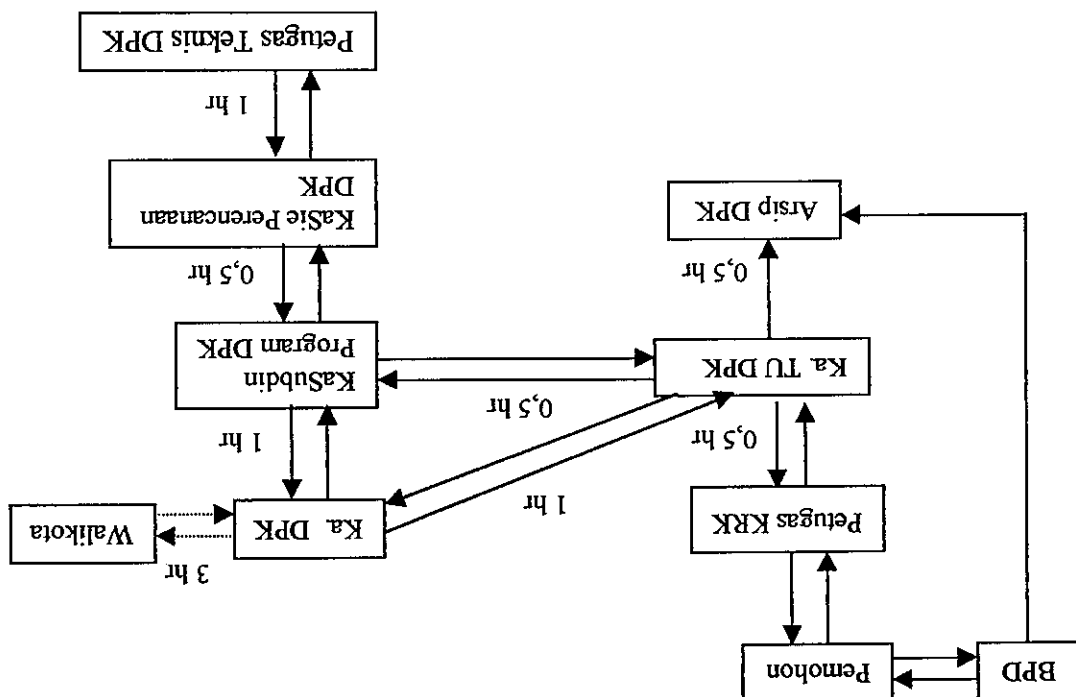


GAMBAR 4.3
MODEL 2
MEKANISME KRK PADA DINAS PERKOTAAN SUBDINAS PROGRAM

Sumber : Hasil Analisis, 2004

————— : Garis perintah (satu arah)
 <-----> : Garis perintah dan koordinasi (komunikasi dua arah)
 <-----> : Garis perintah dan koordinasi apabila diperlukan

Keterangan :

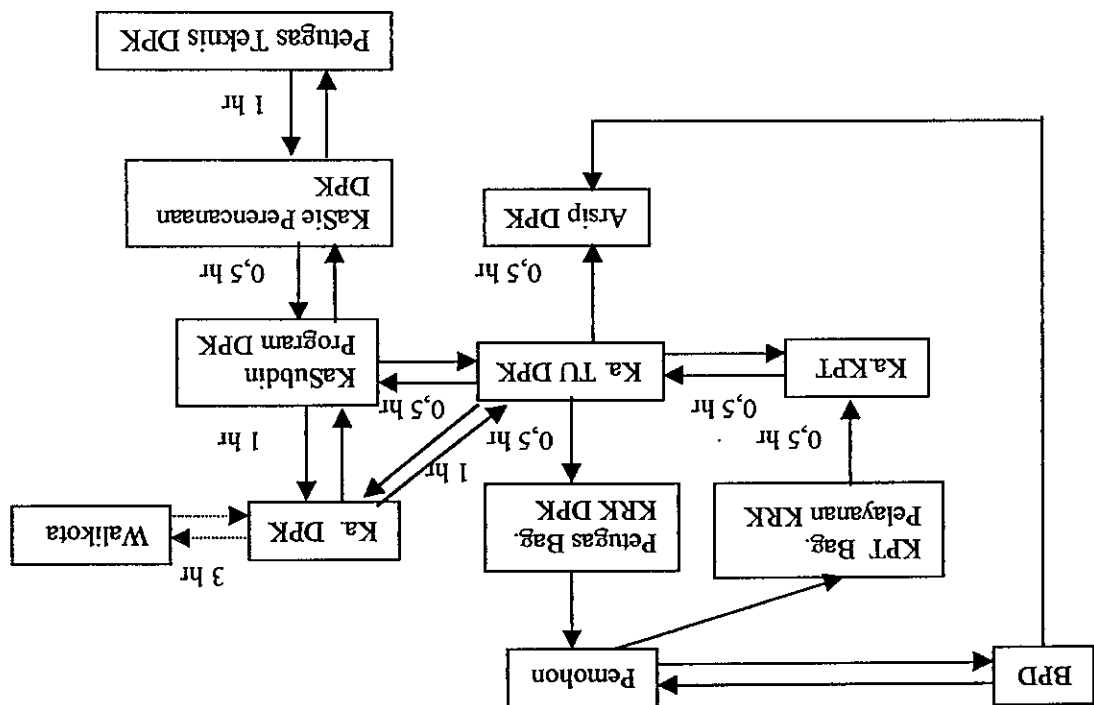


GAMBAR 4.4
MODEL 3
MEKANISME KRK PADA KPT DAN DINAS PERKOTAAN
SUBDINAS PROGRAM

Sumber : Hasil Analisis, 2004

: Garis perintah (komunikasi satu arah)
 : Garis perintah dan koordinasi (komunikasi dua arah)
 : Garis perintah dan koordinasi apabila diperlukan

Keterangan :



Tabel berikut ini merupakan perbandingan antara kriteria – kriteria dalam pelayanan publik yang didapat dari hasil pendapat instansi terkait dengan penerbitan KRK yang merupakan nara sumbernya.

TABEL IV.6
HASIL KUESIONER PERBANDINGAN BERPANGKALAN HIERARKI
DARI KRITERIA PELAYANAN PUBLIK

NO	KRITERIA I	KRITERIA II	NILAI RATA-RATA	KETERG.
1	Kesederhanaan	Kejelasan dan Kepastian	2,1	
2	Kesederhanaan	Keamanan	3,8	
3	Kesederhanaan	Keterbukaan	1,9	
4	Kesederhanaan	Efisiensi	2,3	
5	Kesederhanaan	Ekonomis	2,4	
6	Kesederhanaan	Keadilan yang Merata	3,2	
7	Kesederhanaan	Kepastian Waktu	2,1	
8	Kejelasan dan Kepastian	Keamanan	3,6	
9	Kejelasan dan Kepastian	Keterbukaan	2,2	
10	Kejelasan dan Kepastian	Efisiensi	2,8	
11	Kejelasan dan Kepastian	Ekonomis	3,7	
12	Kejelasan dan Kepastian	Keadilan yang Merata	3,1	
13	Kejelasan dan Kepastian	Kepastian Waktu	1,9	
14	Keamanan	Keterbukaan	3,4	
15	Keamanan	Efisiensi	3,3	
16	Keamanan	Ekonomis	3,2	
17	Keamanan	Keadilan yang Merata	3,6	
18	Keamanan	Kepastian Waktu	3,1	
19	Keterbukaan	Efisiensi	3,1	
20	Keterbukaan	Ekonomis	3,1	
21	Keterbukaan	Keadilan yang Merata	3,5	
22	Keterbukaan	Kepastian Waktu	2,6	
23	Efisiensi	Ekonomis	3,4	
24	Efisiensi	Keadilan yang Merata	2,6	
25	Efisiensi	Kepastian Waktu	2,2	
26	Ekonomis	Keadilan yang Merata	3,1	
27	Ekonomis	Kepastian Waktu	2,3	
28	Keadilan yang Merata	Kepastian Waktu	2,9	

Sumber : Hasil Analisis 2004

Berdasarkan hasil survei pada instansi terkait seperti pada lampiran, maka didapat tingkat kepentingan antara alternatif mekanisme pemberian KRK dibandingkan dengan masing – masing kriteria seperti terlihat pada Tabel IV.7 dibawah ini :

TABEL IV.7
HASIL KUESIONER PERBANDINGAN BERPASANGAN HIERARKI
ALTERNATIF MEKANISME KRK DI KOTA TEGAL

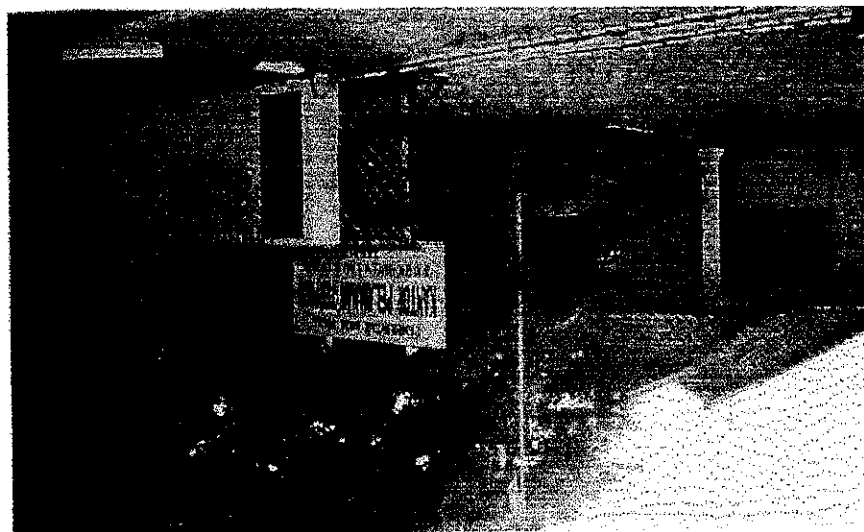
NO	KRITERIA I	KRITERIA II	NILAI	KETERG.
A	Kesederhanaan			
1	Type 1 (KPT)	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	5,2	
2	Type 1 (KPT)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	4,8	
3	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	2,4	
B	Keamanaan			
4	Type 1 (KPT)	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	3,9	
5	Type 1 (KPT)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	4,6	
6	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	3,4	
C	Keterbukaan			
7	Type 1 (KPT)	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	5,6	
8	Type 1 (KPT)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	4,7	
9	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	3,1	
D	Effisiensi			
10	Type 1 (KPT)	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	5,4	
11	Type 1 (KPT)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	4,7	
12	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	2,6	
E	Ekonomis			
13	Type 1 (KPT)	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	5,2	
14	Type 1 (KPT)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	4,7	
15	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	2,7	
F	Keadilan yang merata			
16	Type 1 (KPT)	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	4,8	
17	Type 1 (KPT)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	4,2	
18	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	3,0	
G	Kejelasan dan kepastian			
19	Type 1 (KPT)	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	4,8	
20	Type 1 (KPT)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	4,2	
21	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	2,5	
H	Kepastian waktu			
22	Type 1 (KPT)	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	3,9	
23	Type 1 (KPT)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	4,1	
24	Type 2 (Dinas Perkotaaan)	Type 3 (Gabungan KPT dan DPK)	3,6	

Sumber : Hasil Analisis, 2004

GAMBAR 4.6
KANTOR DINAS PERKOTAAN KOTA TEGAL



GAMBAR 4.5
KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA TEGAL



Kantor Pelayanan Terpadu dan Dinas Perkotaan Kota Tegal seperti terlihat pada Gambar 4.5 Dan Gambar 4.6 dibawah ini :

Berdasarkan perhitungan dengan analisa PHA seperti pada lampiran di belakang, maka di dapatkan alternatif yang terbaik dari 3 alternatif pilihan untuk penerbitan KRK yang memiliki 8 kriteria pelayanan publik. Hasil akhir dari analisa PHA adalah sebagai berikut :

1. Type 1 yaitu mekanisme di KPT memperoleh skor 0,651 artinya merupakan pilihan alternatif terbaik.
2. Type 2 yaitu mekanisme di Dinas Perkotaan memperoleh skor 0,252 artinya merupakan pilihan yang ke-2.
3. Type 3 yaitu mekanisme yang berada 2 kantor yang merupakan gabungan antara proses di KPT dan Dinas Perkotaan, memperoleh skor 0,099 artinya merupakan pilihan terakhir yang dipilih.

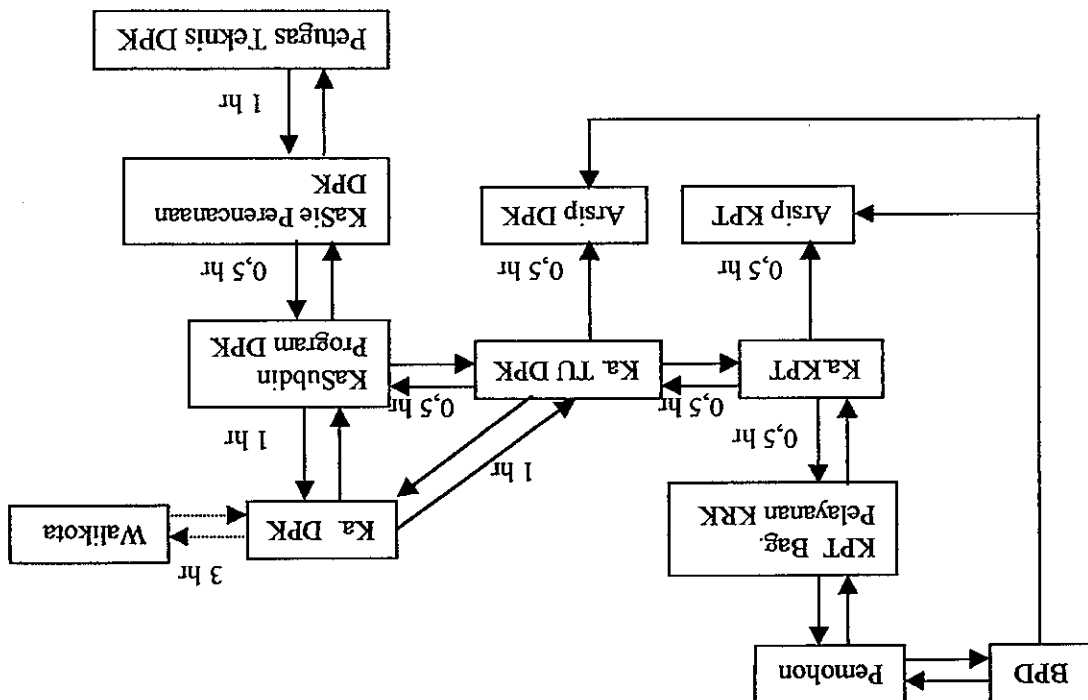
Dari hasil tersebut diatas, maka mekanisme penerbitan KRK beserta pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta yang paling efektif dan efisien dilaksanakan di KPT, prosesnya dimulai dari memasukkan permohonan lengkap dengan persyaratan sampai dengan selesainya KRK. Alternatif mekanisme KRK yang merupakan alternatif terpilih adalah Mekanisme KRK melalui KPT mulai dari pengajuan permohonan sampai selesainya proses KRK seperti terlihat dalam Gambar 4.7 dibawah ini :

GAMBAR 4.7
MEKANISME PENERBITAN KRK PADA KPT BAGIAN PELAYANAN
KETERANGAN RENCANA KOTA DI KOTA TEGAL

Sumber : Hasil Analisis, 2004

————— : Garis perintah (satu arah)
 ————— : Garis perintah dan koordinasi (komunikasi dua arah)
 ————— : Garis perintah dan koordinasi apabila diperlukan

Keterangan :



4.5. Formulasi Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal

Dari hasil analisis kuantitatif maka didapat formulasi penerbitan KRK sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Tegal adalah sebagai berikut :

a. Luas tanah $\leq 300 \text{ m}^2$

$$R \text{ per m}^2 = (0,372 \times 1/1000 \times NJOP) + f(\text{zoning}) + f(\text{klas jalan})$$

b. Luas tanah $> 300 \text{ m}^2$

$$R \text{ per m}^2 = (0,576 \times 1/1000 \times NJOP) + f(\text{zoning}) + f(\text{klas jalan})$$

Sedangkan untuk besarnya tambahan retribusi per m^2 berdasarkan zoning dan klas jalan seperti terlihat pada Tabel IV.1.

4.6. Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Tegal

Dari hasil analisis PHA didapat mekanisme penerbitan KRK sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Tegal adalah sebagai berikut :

Mekanisme penerbitan KRK yang terpilih adalah proses dimulai dan diakhiri di KPT yang dalam pelaksanaannya koordinasi dengan Dinas Perkotaan Kota Tegal, seperti terlihat pada Gambar 4.7 dengan alokasi waktu maksimal 5 hari kerja, tetapi untuk hal – hal khusus yang harus dikonsultasikan dengan Walikota Tegal maka waktunya bisa bertambah.

4.7. Program Rencana Tindak Formulasi dan Mekanisme Penerbitan KRK Sebagai Dasar Pemungutan Retribusi Panalisis Rencana Tindak Program

Analisis Rencana Tindak Program yang digunakan adalah Analisis Lingkungan Strategis (SWOT) adalah analisa yang bertujuan untuk menguasai kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memahami peluang dan tantangan eksternal organisasi sehingga

organisasi dapat mengantisipasi perubahan – perubahan di masa yang akan datang, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki , untuk menuju tujuan yang ingin dicapai. Penilaian internal dan eksternal adalah suatu pencermatan dan identifikasi tentang kondisi internal dan data eksternal, serta faktor – faktor yang mempengaruhi organisasi. Proses pelaksanaan dari penilaian tersebut berkaitan dengan analisis Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), Ancaman (Threat) atau biasa disingkat SWOT.

Analisa ini digunakan untuk menganalisa langkah – langkah rencana tindakan dari pemilihan alternatif mekanisme dan formulasi penerbitan Keterangan Rencana Kota (K RK) sebagai dasar pemungutan retribusi daerah di Kota Tegal. Rencana Tindakan tersebut disamping memperhatikan SWOT yang ada di Kota Tegal, juga memperhatikan Visi , Tugas dan Fungsi, Dasar Hukum SDM PNS, SDM Masyarakat.

a. Analisis Lingkungan Internal

Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor – faktor kekuatan (Strength), dan kelemahan (Weakness). Faktor Kekuatan (Strength) sekaligus dengan bobot nilai menurut tingkat kepentingannya, dengan nilai antara 1 – 5 sesuai asumsi berdasarkan tingkat kepentingannya terdiri dari :

- Adanya SOT Dinas Perkotaan dan SOT Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang sudah ada Perdanya (nilai 5).
- Adanya Surat Edaran Walikota Kota Tegal sebagai dasar penerbitan Keterangan Rencana Kota (K RK) (nilai 3).
- Adanya RUTRK, RTRK Kota Tegal sebagai acuan / dasar untuk pengendalian rencana tata ruang kota (nilai 4).

- Kemauan masyarakat untuk segera dilaksanakan retribusi penggantian biaya cetak

peta (nilai 2).

Faktor Kelemahan (Weakness) sekaligus dengan bobot nilai menurut tingkat kepentingan, dengan nilai antara (-1 sd -5) sesuai asumsi berdasarkan tingkat kepentingan, semakin tidak penting maka nilai mendekati (-5), yang terdiri dari :

- Kurang lengkapnya peta rencana tata ruang kota dan Perda RTRK karena belum seluruh wilayah Kota Tegal terdapat RTRK (nilai -2).

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk perencanaan dan pengendalian rencana tata ruang kota (nilai -5).

- Terbatasnya alokasi dana untuk peningkatan SDM di bidang pelayanan publik, perencanaan dan pengendalian tata ruang kota (nilai -4).

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang KRR (nilai -3).

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor Lingkungan Eksternal terdiri dari Faktor Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat). Faktor Peluang (Opportunity) sekaligus dengan bobot nilai menurut tingkat kepentingannya, dengan nilai antara 1 - 5 sesuai asumsi berdasarkan tingkat kepentingannya terdiri dari :

- Adanya peraturan – peraturan tentang kewenangan daerah seperti pada UU No. 22 / 1999, UU No. 25 / 1999, dan PP No. 66 / 2001 tentang retribusi daerah (nilai 5).
- KRR dipakai sebagai acuan untuk pemberian perijinan lain yaitu ijin sewa tanah penda, ijin gangguan, ijin lokasi dan IMB (nilai 4).
- Kondisi perekonomian yang semakin membaik dan iklim yang kondusif untuk dunia usaha dan investor (nilai 3).

- Adanya perencanaan yang terpadu antara Kota Tegal dan sekitarnya serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang (nilai 2).

Faktor Ancaman (Threat) sekaligus dengan bobot nilai menurut tingkat kepentingannya, dengan nilai antara (-1 sd -5) sesuai asumsi berdasarkan tingkat kepentingannya, semakin tidak penting maka nilai makin mendekati -5, yang terdiri dari :

- Pelanggaran tata ruang kota yang meningkat karena kurang tegasnya pasal – pasal dalam peraturan daerah. (nilai -2).

- Pembangunan fisik disekitar perbatasan dengan kota lain yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya persaingan antar daerah yang berbatasan (nilai -4).

- Meningkatnya harga lahan di wilayah perkotaan mengakibatkan masyarakat sangat menghargai miliknya sehingga kurang memperhatikan fungsi sosialnya (nilai -5).

- Peningkatan ekonomi yang meningkat mengakibatkan masyarakat kurang memperhatikan tata ruang kota serta lingkungan sekitar (nilai -3).

Interaksi antara Faktor – Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman terlihat pada Tabe IV.8 dibawah ini.

TABEL IV.8
PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN / STRENGTH (S)		KELEMAHAN / WEAKNESS (W)
	PELUANG / OPPORTUNITY (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
FAKTOR EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peraturan – peraturan tentang kewenangan daerah. KRK dipakai sebagai acuan untuk pemberian perijinan lain. Kondisi perekonomian yang semakin membaik dan iklim yang kondusif untuk dunia usaha dan investor Adanya perencanaan yang terpadu antara Kota Tegal dan sekitarnya serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya SOT Dinas Perkoalan dan SOT Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang sudah ada Perdaanya Adanya Surat Edaran Walikota Kota Tegal sebagai dasar penentuan Keterangan Rencana Kota (KKR) Adanya RUTRK, RTRK serta Rencana Retribusi Cetak Peta Kota Tegal sebagai dasar untuk pengendalian tata ruang kota dan income daerah Kemauan masyarakat untuk segera melaksanakan retribusi penggantian biaya cetak peta 	<ul style="list-style-type: none"> Kurang lengkapnya peta rencana tata ruang kota dan Perda RTRK karena belum seluruh wilayah Kota Tegal terdapat RTRK Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk perencanaan dan pengendalian tata ruang kota Terbatasnya alokasi dana untuk peningkatan SDM di bidang pelayanan publik, perencanaan dan pengendalian tata ruang kota Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi yang ada pada KKR
	<ul style="list-style-type: none"> Pelangan tata ruang kota yang meningkat karena kurang jelasnya peraturan yang ada. Pembangunan fisik disekitar perbatasan dengan kota lain yang semakin meningkat. Meningkatnya harga lahan di wilayah perkotaan mengakibatkan masyarakat mulai mengalihkan miliknya Peningkatan ekonomi yang mengakibatkan masyarakat kurang memperhatikan tata ruang kota serta lingkungan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya SOT yang tegas tumpuknya akan bisa mengendalikan pembangunan fisik disekitar perbatasan dengan daerah lain Adanya Surat Edaran Walikota tentang KKR akan bisa mengurangi pelanggaran tata ruang kota karena adanya informasi tata ruang dan peraturannya Adanya RUTRK dan RTRK sebagai pengendalian tata ruang kota untuk mengurangi pelanggaran tata ruang kota oleh masyarakat akibat perekonomian yang meningkat Adanya kemauan masyarakat untuk melaksanakan retribusi penggantian biaya cetak peta untuk mengurangi peningkatan harga lahan di wilayah perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kelengkapan peta dan RTRK beserta perdanya akan mengendalikan pembangunan fisik di perbatasan dengan kota lain Peningkatan sarana dan prasarana untuk perencanaan kota akan mengurangi kesenjangan harga tanah karena pemerataan pertumbuhan kota Pemambahan alokasi dana perencanaan SDM di bidang pelayanan dan perencanaan akan menurunkan pelanggaran tata ruang di masyarakat karena peningkatan perekonomian Peningkatan sosialisasi pada masyarakat tentang KKR akan menurunkan pelanggaran tata ruang kota karena masyarakat mengerti peraturan
ANCAMAN / THREAT (T)		STRATEGI S-T	STRATEGI W-T

Hasil Interaksi Antar Faktor beserta nilainya adalah sebagai berikut :

a. Strategi Antara S - O

1. Adanya SOT DPK dan KPT untuk meningkatkan pelayanan KRK sebagai acuan untuk pemberian perijinan lainnya ($5 + 4 = 9$)

2. Adanya Surat Edaran Walikota Tegal tentang KRK untuk meningkatkan retribusi daerah sesuai kewenangan daerah berdasarkan peraturan yang ada ($3 + 5 = 8$)

3. Adanya RUTRK, RTRK dan Perda retribusi cetak peta akan meningkatkan perencanaan terpadu di Kota Tegal dan sekitarnya ($4 + 2 = 6$)

4. Adanya kemauan masyarakat untuk melaksanakan retribusi ini akan meningkatkan kondisi perekonomian dan iklim yang kondusif ($2 + 3 = 5$)

b. Strategi Antara W - O

1. Adanya peraturan tentang kewenangan daerah akan melengkapi pengadaaan peta dan peraturan RTRK yang belum ada ($5 - 2 = 3$)

2. Adanya KRK sebagai acuan perijinan yang lainnya untuk melengkapi sarana dan prasarana perencanaan yang masih terbatas ($4 - 5 = -1$)

3. Adanya ekonomi yang membaik dan iklim yang kondusif bagi investor akan meningkatkan dana untuk peningkatan SDM dibidang pelayanan publik,

4. Adanya perencanaan yang terpadu di Kota Tegal dan sekitarnya serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KRK ($2 - 3 = -1$)

c. Strategi Antara S - T

1. Adanya SOT yang tegas tujuksinya akan bisa mengendalikan pembangunan fisik disekitar perbatasan dengan daerah lainnya ($5 - 4 = 1$)

2. Adanya Surat Edaran Walikota tentang KRK akan bisa mengurangi pelanggaran tata ruang kota karena adanya informasi tata ruang dan peraturannya ($3 - 2 = 1$)
3. Adanya RU TRK dan RTRK sebagai pengendalian tata ruang kota untuk mengurangi pelanggaran tata ruang kota oleh masyarakat akibat perekonomian yang meningkat ($4 - 3 = 1$)
4. Adanya kemauan masyarakat untuk melaksanakan retribusi penggantian biaya cetak peta untuk mengurangi pelanggaran harga lahan di wilayah perkotaan ($2 - 5 = -3$)

d. Strategi Antara W – T

1. Peningkatan kelengkapan peta dan RTRK beserta perdanya akan mengendalikan pembangunan fisik di perbatasan dengan kota lainnya ($-2 - 4 = -6$)
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk perencanaan kota akan mengurangi kesenjangan harga tanah karena pemerataan pertumbuhan kota ($-5 - 5 = -10$)
3. Penambahan alokasi dana untuk SDM di bidang pelayanan, perencanaan dan pengendalian akan menurunkan pelanggaran tata ruang di masyarakat karena peningkatan perekonomian ($-4 - 3 = -7$)
4. Peningkatan sosialisasi pada masyarakat tentang KRK akan menurunkan persaingan harga lahan di wilayah perkotaan karena masyarakat semakin mengetahui fungsi sosial dari tanahnya ($-3 - 2 = -5$)

Dari strategi – strategi tersebut diatas, maka diambil strategi yang mempunyai nilai paling tinggi, dengan nilai 9 yaitu Adanya SOT DPK dan KPT untuk meningkatkan pelayanan KRK sebagai acuan untuk pemberian penilaian lainnya. Strategi tersebut termasuk dalam kuadran I yaitu adanya kekuatan yang dimiliki (S) untuk meraih peluang yang ada (O).

Program – program yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tegal adalah :

1. Meninjau kembali / merevisi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Perkotaan dan Kantor Pelayanan Terpadu tentang penerbitan KRK
2. Membuat prosedur serta persyaratan penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) yang disyahkan oleh Walikota Tegal
3. Membuat peraturan daerah tentang KRK dan retribusi penggantian biaya cetak peta serta petunjuk teknisnya
4. Meningkatkan SDM pegawai di bidang urban planning, sehingga bisa memahami perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian rencana tata ruang kota
5. Menambah sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran tugas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian rencana tata ruang kota
6. Meningkatkan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan pada semua dinas / instansi / bagian , sehingga koordinasi pembangunan bisa berjalan antar sektor yang terkait dengan wadahnya rencana tata ruang yang telah ada perdanya.
7. Meningkatkan supremasi hukum sehingga adanya ketegasan dalam pelaksanaan dan pengendalian rencana tata ruang kota, dengan penguatan kelembagaan dan SDM pada pelaksanaan dan pengendalian rencana tata ruang kota
8. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pada masyarakat dengan melibatkan instansi terkait, agar masyarakat lebih memahami dan mengerti tentang tata ruang kota, sehingga diharapkan akan mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengendalian tata ruang kota yang telah ada
9. Kegiatan evaluasi pelaksanaan tata ruang kota senantiasa dilaksanakan untuk memonitor perkembangan kota baik secara fisik atau nilai – nilai kemasyarakatan, sehingga data akan semakin lengkap dan teratur

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa untuk mencari formula dan mekanisme pemberian Keterangan Rencana Kota (K RK) sebagai dasar pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Tegal, maka terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil yaitu :

1. Potensi pemohon K RK di Kota Tegal pada tahun 2000-2003 sebanyak 725 serta pada tahun 2003 sebanyak 178 merupakan potensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Tegal, karena saat ini K RK merupakan acuan bagi pertimbangan lainnya, tetapi secara hukum kedudukannya belum kuat karena belum ada peraturan daerah yang mengatur K RK serta retribusi penggantian biaya cetak peta, padahal di kota lainnya sudah ada.

2. Surat Edaran dari Walikota Tegal tanggal 24 Oktober 1998 tentang Keterangan Rencana Kota harus segera diperbaharui dengan SK Walikota yang baru, karena sudah lama dan sifatnya kurang mengikat sebagai dasar hukum pemberian K RK dan isinya harus memenuhi persyaratan , prosedur / mekanisme serta retribusinya

3. Rumus Retribusi penggantian biaya cetak peta per m² berdasarkan hasil kuesioner pada masyarakat, untuk luas tanah ≤ 300 m² adalah :

$$R = (0,372 \times 1/1000 \times NJOP) + F (zoning) + F (klas jalan), \text{ sedangkan}$$
Rumus Retribusi penggantian biaya cetak peta per m² berdasarkan hasil kuesioner pada masyarakat, untuk luas tanah > 300 m² adalah :

$$R = (0,576 \times 1/1000 \times NJOP) + F (zoning) + F (klas jalan)$$

4. Tambahan Besarnya Retribusi per m² berdasarkan fungsi zoning dan klas jalan, bisa dilihat pada Tabel IV.1 pada Bab IV

5. Mekanisme pemberian KKK yang terpilih dengan berbagai pendapat dari narasumber adalah alternatif I yaitu mulai dan selesai proses KKK di KPT, seperti pada gambar 4.7, dan perlu adanya revisi pada SK Walikota No. 11 tahun 2000 tentang Pedoman Prosedur Pelayanan Umum pada KPT Kota Tegal, karena pada SK tersebut belum disebutkan pemberian Keterangan Rencana Kota (KKR) termasuk dalam pelayanan umum di KPT.

6. Retribusi penggantian biaya cetak sebaiknya segera dilaksanakan, dari hasil sampel pada saat survey 83 % masyarakat menyetujui pelaksanaan retribusi tersebut maksimal 5 tahun lagi.

5.2. Rekomendasi

5.2.1. Rekomendasi Kepada Pemerintah Kota Tegal

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang bisa diusulkan :

1. Penguatan kelembagaan yang meliputi Revisi SOT dan tupoksinya pada KPT
2. Pembaharuan surat edaran dari Walikota Tegal tahun 1998 tentang Pemberitan KKK yang sudah lama dan kurang kuat secara hukum serta isinya kurang lengkap
3. Pembuatan Perda dan petunjuk teknis untuk Keterangan Rencana Kota

meliputi persyaratan permohonan, retribusi, mekanisme serta instansi pengelolaanya

5.2.2. Rekomendasi Studi Lanjut

1. Pembuatan studi lanjutan tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi penggantian biaya cetak peta yang merupakan lampiran dari KRR .
2. Pembuatan studi lanjutan tentang evaluasi kinerja Kantor Pelayanan Terpadu pada bagian pelayanan KRR.
3. Pembuatan studi lanjutan tentang efisiensi pemanfaatan lahan dari penerbitan KRR yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Benveniste, Guy, 1994, *Birokrasi*, Penerjemah : Sehat Sinamora, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Branch, Malville C., 1996, *Teori Perencanaan Kota Komprehensif*, Terjemahan : Bambang Hari Wibisono, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N., 2000, *Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan : Samodra Wibawa, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijono, Riant Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Hendar dan Kusnadi, 2002, *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI.
- J. Supranto, 1992, *Teknik Sampling*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Jayadinata, Johara T., 1986, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*, Bandung : ITB.
- Koestoeer, Raldi Hendro, 1997, *Perspektif Desa dan Kota – Teori dan Kasus*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Kumarjo, 1996, *Perencanaan dan Pembudayaan Pembangunan*, Jakarta : UI Press.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok – Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia.
- Malarangeng, Andi M., 2001, *Otonomi Daerah – Perspektif, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Bigraf Publishing Bekerjasama dengan UMM.
- Mangkoesoebroto, Guitmo, 2001, *Ekonomi Publik, Edisi 3*, Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi.
- Muhajir, Noeng, 2003, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research. Integrasi Penelitian, Kebijakan dan Perencanaan*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Munawir, 1992, *Perpajakan*, Yogyakarta : Liberty.
- Munir, Badrul, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, NTB : Bappeda Propinsi NTB.

Nasution, 2002, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara.

Nurmandi, Achmad, 1999, *manajemen Perkotaan*, Yogyakarta, Lingakaran Bangsa.

Osborne, David dan Ted Gaebler, 1996, *Mewirauasahakan Birokrasi (Reinventing Government)*, Penerjemah : Abdul Rosyid, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.

Reksosahadiprodjo, Sukanto dan AR. Karseno, 1993, *Ekonomi Perkotaan*, Yogyakarta, BPF.

Saaty, Thomas L., 1993, *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin – Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*, Terjemahan Liana Setiono, Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Singarimbun, Masri, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Editor : Sofian Effendi, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.

Sugianto, et.al., 2001, *Teknik Sampling*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sujanto, 1990, *Otonomi Daerah, Yang Nyala dan Berlanggungjawab*, Jakarta : Ghalia.

Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.

Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik – Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Andi

W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Editor : Yovita Hardiwati, Jakarta : Grasindo.

Warsito et.all, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah – Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*, Editor : Teguh Yuwono, Semarang : Gapps Diponegoro University.

Wibawa, Samodra et.all, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance - Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi - Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya, Insan Cendekia.

DOKUMEN

Undang – Undang RI Nomor 24 tahun 1992 tentang *Penaataan Ruang*.

Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang – Undang RI Nomor 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang – Undang RI Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1995 tentang Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota tahun 1994 – 2004 Kodya Dati II Tegal.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1987 tentang Bangunan Kodya Dati II Tegal.

Keputusan Walikota Tegal Nomor 13 tahun 1999 tentang Unit Pelayanan Terpadu.

Keputusan Walikota Tegal Nomor 11 tahun 2000 tentang Pedoman Prosedur Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Tegal.

Keputusan Walikota Tegal Nomor 07 tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas – Dinas Kota Tegal.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah X Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor KEP/WPJ.10/bd.05/2003 Tentang Klarifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota / Kabupaten Tegal.

Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 14 tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 974 / 150 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang No. 14 tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 9 tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Keputusan Walikota Surakarta No. 11 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang No. 9 tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

ARTIKEL

Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota No. 17, 1995, Bandung : Kerjasama P3WK-ITB Jurusan Teknologi Planologi, FTSP-ITB dan IAP.

SKRIPSI / TESIS

Wiantanta, I Nengah, 2003, *Eksistensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pembangunan Kota Mataram*, Tesis tidak diterbitkan, Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro , Semarang.

DATA / LAPORAN

- Pendapatan Regional Kota Tegal Tahun 2001, 2002, Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kota Tegal, Tegal : BPS .*
- Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2001, 2002, Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kota Tegal, Tegal : BPS .*
- Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2001, 2002, Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Semarang : BPS.*
- Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2001, 2002, Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Surakarta : BPS.*